

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Konsep, Strategi, dan Praktik Pengembangan
Program Berbasis Partisipasi**

Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si.
Dr. Ir. Helda Ibrahim, S.P., M.Si.



PT. GHANI PRESS GROUP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Konsep, Strategi, dan Praktik Pengembangan Program Berbasis Partisipasi

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si. dan Dr. Ir. Helda Ibrahim, S.P., M.Si.

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Rizki Baehtiar Afandi

Editor Naskah:

Dr. Esther Kembauw, S.P., M.Si.

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Zain, A. Majdah M. & Helda Ibrahim

Pemberdayaan masyarakat: konsep, strategi, dan praktik pengembangan program berbasis partisipasi 2026 / penulis, Zain, A. Majdah M. & Helda Ibrahim, Lamongan: PT. Ghani Press Group, 2026.

V + 165 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-634-97264-7-4

1. Pemberdayaan Masyarakat

I. Judul

307.14 [23]

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Strategi, dan Praktik Pengembangan Program Berbasis Partisipasi” ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan bahan ajar yang sistematis, mutakhir, dan kontekstual bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis, khususnya dalam menempuh mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pengalaman panjang pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai objek semata tidak menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berdaya, berpartisipasi, dan mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri terbukti lebih mampu menciptakan kesejahteraan yang berakar dan bertahan lama. Oleh karena itu, kemampuan memberdayakan masyarakat menjadi kompetensi wajib bagi sarjana agribisnis yang kelak akan bekerja bersama petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan komunitas perdesaan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, khususnya sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Makassar, Agustus 2026
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENGANTAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1
BAB II	
PARTISIPASI MASYARAKAT	19
BAB III	
STRATEGI DAN METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35
BAB IV	
PENDIDIKAN MASYARAKAT.....	51
BAB V	
KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN	65
BAB VI	
EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL.....	77
BAB VII	
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN.....	91
BAB VIII	
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN	105

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN REFLEKSI PROGRAM
PEMBERDAYAAN 125

LAMPIRAN 141

GLOSARIUM 157

BIODATA PENULIS 165

BAB I

PENGANTAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab ini membahas fondasi konseptual pemberdayaan masyarakat yang meliputi definisi dan konsep dasar, filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, sejarah dan perkembangan pemikiran pemberdayaan masyarakat dari pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* menuju pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community-driven development*), kerangka teori kekuasaan, serta peran para pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta, dan masyarakat itu sendiri dalam proses pemberdayaan. Pada bagian akhir, bab ini menempatkan pemberdayaan masyarakat dalam konteks agribisnis dan pembangunan perdesaan Indonesia.

Relevansi

Pemahaman yang benar tentang konsep pemberdayaan adalah prasyarat bagi seluruh materi pada bab-bab berikutnya. Tanpa fondasi konseptual yang kuat, praktik pemberdayaan mudah tergelincir menjadi sekadar pemberian bantuan yang justru melanggengkan ketergantungan. Bagi mahasiswa agribisnis, materi ini penting karena sebagian besar persoalan pembangunan pertanian rendahnya posisi tawar petani, lemahnya kelembagaan tani, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar pada dasarnya adalah persoalan

ketidakberdayaan yang penyelesaiannya menuntut pendekatan pemberdayaan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan secara lengkap definisi dan konsep pemberdayaan masyarakat.
- b. Menguraikan sejarah dan perkembangan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mendeskripsikan peran pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam pemberdayaan.
- d. Mengaitkan konsep pemberdayaan dengan konteks agribisnis dan pembangunan perdesaan.

➤ Definisi dan Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, yang berakar pada kata *power* (kekuasaan atau daya). Secara harfiah, pemberdayaan berarti proses memberikan atau menumbuhkan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Konsep ini bertolak dari pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat ketimpangan penguasaan sumber daya, akses, dan pengambilan keputusan, sehingga sebagian kelompok berada dalam kondisi *powerlessness* atau ketidakberdayaan.

Ketidakberdayaan tidak semata-mata berarti kemiskinan material. Seseorang atau kelompok disebut tidak berdaya apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkannya meningkatkan pendapatan
- c. Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Petani gurem yang tidak dapat menentukan harga jual hasil panennya, perempuan perdesaan yang tidak dilibatkan dalam musyawarah desa, atau nelayan kecil yang terjerat sistem ijon adalah contoh nyata ketidakberdayaan dalam kehidupan agraris Indonesia.

Para ahli memberikan tekanan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan pemberdayaan, tetapi terdapat benang merah yang sama. Pemberdayaan dapat dipahami sekurang-kurangnya dalam tiga pengertian yang saling melengkapi. *Pertama*, pemberdayaan sebagai proses, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan sebagai tujuan, yaitu keadaan yang ingin dicapai berupa masyarakat yang berdaya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. *Ketiga*, pemberdayaan sebagai pendekatan pembangunan, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, pembangunan.

Dalam literatur pembangunan mutakhir, pemberdayaan dipahami sebagai perluasan aset dan kapabilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, memengaruhi, mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka. Definisi ini menegaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal peningkatan pendapatan, melainkan juga soal perubahan relasi kekuasaan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga di sekitarnya. Alcántara, Nguyen, dan Alegría (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan sipil (*civic engagement*) dan resiliensi komunitas merupakan jalur penting menuju

keberdayaan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan.

Konsep pemberdayaan juga dapat dibedakan menurut dimensinya. Dimensi *psikologis* menyangkut tumbuhnya kesadaran kritis, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin (*sense of agency*). Dimensi *sosial* menyangkut menguatnya solidaritas, jejaring, dan kelembagaan masyarakat. Dimensi *ekonomi* menyangkut meningkatnya penguasaan aset produktif, pendapatan, dan akses pasar. Dimensi *politik* menyangkut meningkatnya kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan publik. Program pemberdayaan yang baik menggarap keempat dimensi ini secara berimbang.

➤ **Filosofi dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Filosofi pemberdayaan bertumpu pada keyakinan bahwa setiap manusia dan setiap komunitas memiliki potensi, daya, dan kearifan yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya; yang ada adalah masyarakat yang dayanya belum dikenali, belum dikembangkan, atau tertekan oleh struktur yang tidak adil. Oleh karena itu, pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses memampukan (*enabling*), memperkuat (*strengthening*), dan melindungi (*protecting*).

Dari filosofi tersebut diturunkan sejumlah prinsip pemberdayaan yang menjadi pedoman praktik, yaitu sebagai berikut.

- a. Pertama, prinsip partisipasi. Masyarakat harus terlibat aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Program yang dirancang tanpa keterlibatan masyarakat cenderung tidak sesuai kebutuhan dan tidak dirawat keberlanjutannya.

- b. Kedua, prinsip berbasis potensi lokal. Pemberdayaan bertolak dari apa yang dimiliki masyarakat sumber daya alam, keterampilan, kelembagaan, modal sosial, dan kearifan lokal bukan dari apa yang tidak dimiliki. Pendekatan ini dikenal sebagai pembangunan berbasis aset (*asset-based community development*).
- c. Ketiga, prinsip kemandirian dan keswadayaan. Bantuan pihak luar bersifat sementara dan berfungsi sebagai stimulan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat mampu melanjutkan dan mengembangkan kegiatan dengan kekuatan sendiri.
- d. Keempat, prinsip keberlanjutan. Program pemberdayaan dirancang agar manfaatnya bertahan dan berkembang setelah program berakhir, baik keberlanjutan ekonomi, sosial-kelembagaan, maupun lingkungan.
- e. Kelima, prinsip keadilan dan keberpihakan. Pemberdayaan berpihak kepada kelompok yang paling lemah petani gurem, buruh tani, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin agar mereka tidak semakin tertinggal.
- f. Keenam, prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Hubungan antara fasilitator dan masyarakat adalah hubungan kemitraan yang setara, bukan hubungan atasan-bawahan atau pemberi-penerima.
- g. Ketujuh, prinsip proses belajar sosial. Pemberdayaan adalah proses pendidikan dalam arti luas; masyarakat belajar dari pengalaman dan refleksi bersama, sehingga kesalahan pun menjadi bagian dari pembelajaran.

➤ Sejarah dan Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan pemberdayaan tidak lahir dalam ruang kosong; ia berkembang sebagai kritik terhadap praktik pembangunan yang gagal menyejahterakan lapisan bawah masyarakat. Perkembangannya dapat ditelusuri dalam beberapa periode.

- a. Pemanfaatan perangkat digital untuk pemberdayaan komunitas di Asia Selatan.

Perjalanan sejarah ini memperlihatkan pergeseran paradigma yang jelas: dari pembangunan *untuk* masyarakat, menjadi pembangunan *bersama* masyarakat, dan akhirnya pembangunan *oleh* masyarakat.

➤ Kerangka Teori Kekuasaan dan Pemberdayaan

Karena pemberdayaan berurusan dengan kekuasaan, memahami bagaimana kekuasaan bekerja menjadi keharusan. Kekuasaan dalam pemberdayaan tidak selalu berarti dominasi (*power over*), yaitu kemampuan satu pihak mengendalikan pihak lain. Terdapat bentuk-bentuk kekuasaan yang justru menjadi sasaran pemberdayaan, yaitu: *power to* (kemampuan untuk bertindak dan mewujudkan sesuatu), *power with* (kekuatan bersama yang lahir dari kerja sama dan solidaritas), dan *power within* (kekuatan dari dalam diri berupa harga diri, kesadaran, dan kepercayaan diri). Program pemberdayaan yang utuh menumbuhkan ketiganya: kesadaran diri individu, kapasitas bertindak, dan kekuatan kolektif.

Salah satu kerangka analisis kekuasaan yang banyak digunakan adalah *power cube* (kubus kekuasaan) yang dikembangkan John Gaventa. McGee dan Gaventa (2020) menjelaskan bahwa kekuasaan dapat dianalisis dalam tiga dimensi. *Pertama*, dimensi ruang (*spaces*): ruang tertutup (*closed*) di mana keputusan dibuat elite tanpa keterlibatan

masyarakat; ruang undangan (*invited*) di mana masyarakat diundang berpartisipasi, misalnya musyawarah perencanaan pembangunan; dan ruang yang direbut atau diciptakan sendiri (*claimed/created*) oleh masyarakat, misalnya forum warga dan aksi kolektif. *Kedua*, dimensi tingkat (*levels*): lokal, nasional, dan global. *Ketiga*, dimensi bentuk (*forms*): kekuasaan yang terlihat (*visible*) dalam aturan dan lembaga formal; kekuasaan tersembunyi (*hidden*) yang menentukan siapa dan isu apa yang boleh masuk agenda; dan kekuasaan yang terinternalisasi (*invisible*) berupa norma dan keyakinan yang membuat kelompok lemah menerima ketidakadilan sebagai kewajiban. Kerangka ini membantu fasilitator memetakan di ruang mana, pada tingkat mana, dan terhadap bentuk kekuasaan yang mana intervensi pemberdayaan perlu diarahkan.

➤ **Peran Pemerintah, LSM, Swasta, dan Masyarakat dalam Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat adalah kerja banyak pihak. Setiap aktor memiliki peran, kekuatan, dan keterbatasan masing-masing, sehingga sinergi antaraktor menjadi kunci.

- a. Peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator

Sebagai regulator, pemerintah menyediakan payung kebijakan yang berpihak, misalnya UU Desa, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan anggaran (antara lain dana desa), infrastruktur, tenaga pendamping (penyuluh pertanian, pendamping desa), serta layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai katalisator, pemerintah mendorong dan menghubungkan prakarsa masyarakat dengan sumber daya yang lebih luas. OECD (2021) menekankan bahwa

kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan lokal menuntut pemerintah bergeser dari penyedia tunggal layanan menjadi pendukung prakarsa warga. Tantangan klasik peran pemerintah adalah birokratisasi, keseragaman program yang mengabaikan konteks lokal, dan orientasi pada penyerapan anggaran ketimbang hasil.

b. Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM)

LSM atau organisasi masyarakat sipil berperan sebagai pendamping, penguat kapasitas, perantara (*intermediary*), dan pembela (advokat) kepentingan masyarakat. Kekuatan LSM terletak pada kedekatannya dengan komunitas, fleksibilitas pendekatan, dan inovasi metodologi banyak metode partisipatif lahir dan matang di tangan LSM. LSM juga berperan mengawal akuntabilitas pemerintah dan menjembatani suara masyarakat ke pengambil kebijakan. Keterbatasannya antara lain ketergantungan pada pendanaan donor, jangkauan yang terbatas, dan risiko menciptakan ketergantungan baru pada pendamping.

c. Peran swasta

Dunia usaha berperan melalui kemitraan rantai pasok (misalnya kemitraan inti-plasma dan *contract farming*), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR/TJSL), pengembangan kewirausahaan sosial, serta investasi yang membuka lapangan kerja. Kemitraan yang sehat memberikan kepastian pasar dan alih teknologi kepada petani; sebaliknya kemitraan yang timpang dapat menjadi bentuk baru ketergantungan. Karena itu keseimbangan posisi tawar melalui kelembagaan petani yang kuat menjadi prasyarat.

d. Peran masyarakat

Pada akhirnya, aktor utama pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat berperan sebagai

perencana, pelaksana, penerima manfaat, sekaligus pengawas pembangunan. Peran ini diwadahi kelembagaan lokal seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga adat. Pritchett dan Woolcock (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial kemampuan warga menuntut pertanggungjawaban penyelenggara layanan publik merupakan jalur penting membangun keberdayaan.

➤ **Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Agribisnis dan Pembangunan Perdesaan**

Sektor pertanian dan perdesaan adalah medan utama pemberdayaan masyarakat di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian. Persoalan mendasar petani Indonesia penguasaan lahan yang sempit, posisi tawar yang lemah dalam rantai nilai, keterbatasan akses permodalan dan teknologi, serta kerentanan terhadap perubahan iklim hanya dapat dijawab dengan menumbuhkan keberdayaan petani secara individu dan kolektif.

Dalam konteks agribisnis, pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan petani dan pelaku usaha perdesaan untuk mengelola usaha taninya secara menguntungkan dan berkelanjutan di seluruh subsistem agribisnis: subsistem hulu (sarana produksi), usaha tani (*on-farm*), hilir (pengolahan dan pemasaran), dan penunjang (pembiayaan, penyuluhan, kelembagaan). Penyuluh dan fasilitator agribisnis berperan penting dalam transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani, Ilyas, Ibrahim, dan Sulfiana (2026) pada petani bawang merah di Kabupaten Jeneponto.

Konteks lokal juga menuntut kepekaan terhadap kerentanan ekologis. Darma, dkk. (2025) masyarakat memiliki strategi adaptasi dan kelembagaan bagi-risiko yang tumbuh dari bawah; program pemberdayaan yang baik memperkuat, bukan menggantikan, kelembagaan semacam itu. Amandaria dkk. (2025), pentingnya memformalkan mekanisme bagi-risiko dan memperkuat kelembagaan lokal untuk keberlanjutan penghidupan petani di kawasan rawan banjir.

Studi Kasus 1.1 — Dari Bimas ke Dana Desa: Transformasi Pendekatan Pembangunan Perdesaan Indonesia.

Program Bimas (1960–1980-an) menempatkan petani sebagai pelaksana paket teknologi yang ditentukan dari pusat: benih, pupuk, dan jadwal tanam ditetapkan seragam. Produksi padi meningkat, tetapi kemandirian petani dan kelembagaan lokal melemah. Tiga dekade kemudian, PNPM Mandiri (2007–2014) membalik logika itu: masyarakat desa bermusyawarah menentukan sendiri kegiatan yang didanai, mengelola dananya, dan mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Pengalaman PNPM kemudian dilembagakan dalam UU Desa: setiap desa kini menerima dana desa dan memutuskan penggunaannya melalui musyawarah desa. Pelajaran pentingnya: perubahan hasil pembangunan menuntut perubahan relasi kekuasaan dari pemerintah sebagai penentu menjadi masyarakat sebagai pengambil keputusan, dengan pemerintah sebagai pendukung. Namun pengalaman juga menunjukkan risiko baru: dominasi elite desa (*elite capture*), formalitas musyawarah, dan kapasitas administrasi yang timpang. Pemberdayaan sejati menuntut penguatan kapasitas warga agar ruang partisipasi yang telah dibuka benar-benar terisi.

Sorotan Lapangan: Ketika Bantuan Datang Tanpa Pemberdayaan

Sebuah desa pernah menerima bantuan puluhan unit alat mesin pertanian dari program pemerintah. Dua tahun kemudian, sebagian besar alat teronggok rusak di halaman kantor desa. Penelusuran sederhana menemukan penyebabnya bukan pada mutu alat, melainkan pada prosesnya: jenis alat ditentukan dari atas tanpa menanyakan kebutuhan petani; tidak ada kelompok yang disiapkan untuk mengelola, merawat, dan mengatur giliran pemakaian; tidak ada iuran jasa untuk biaya perawatan; dan tidak ada pelatihan operator. Bandingkan dengan desa tetangga yang menerima bantuan serupa namun didahului musyawarah kebutuhan, pembentukan unit pengelola dengan aturan main tertulis, serta pelatihan operator dan mekanik lokal: alat-alatnya masih beroperasi dan bahkan menghasilkan pendapatan jasa bagi kelompok. Pelajaran pokoknya sederhana namun sering dilupakan: barang dapat dibagikan dalam sehari, tetapi keberdayaan harus ditumbuhkan melalui proses. Bantuan yang melompati proses penyadaran, pengorganisasian, dan peningkatan kapasitas hampir selalu berakhir sebagai monumen kegagalan. Inilah alasan bab ini menekankan pemberdayaan sebagai proses perubahan relasi dan kapasitas, bukan sekadar penyaluran sumber daya.

➤ Rangkuman

Pemberdayaan masyarakat adalah proses, tujuan, sekaligus pendekatan pembangunan untuk menumbuhkan daya kelompok lemah agar mampu memenuhi kebutuhannya, menjangkau sumber daya produktif, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip pokoknya meliputi partisipasi, berbasis potensi lokal, kemandirian, keberlanjutan, keadilan, kesetaraan, dan proses belajar sosial. Secara historis,

pendekatan pembangunan bergeser dari *top-down* (era modernisasi dan revolusi hijau) menuju partisipatif dan *community-driven development* yang di Indonesia dilembagakan melalui UU Desa. Kerangka *power cube* membantu menganalisis ruang, tingkat, dan bentuk kekuasaan yang menjadi sasaran pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kerja sinergis pemerintah (regulator-fasilitator), LSM (pendamping-advokat), swasta (mitra usaha), dan masyarakat sebagai aktor utama. Dalam konteks agribisnis, pemberdayaan diarahkan pada penguatan posisi petani di seluruh subsistem agribisnis dan penguatan kelembagaan lokal, termasuk kelembagaan adaptasi terhadap risiko iklim.

➤ Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Kondisi ketika seseorang tidak mampu menjangkau sumber daya produktif dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidupnya disebut
 - a. kemiskinan absolut;
 - b. *powerlessness*;
 - c. deprivasi relatif;
 - d. marginalisasi ekonomi
2. Pemberdayaan yang dipahami sebagai “keadaan masyarakat yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya” merupakan pengertian pemberdayaan sebagai
 - a. proses;
 - b. pendekatan;
 - c. tujuan;
 - d. metode

3. Prinsip pemberdayaan yang menekankan bahwa program harus bertolak dari sumber daya, keterampilan, dan kearifan yang telah dimiliki masyarakat adalah prinsip
 - a. partisipasi;
 - b. keberlanjutan;
 - c. keadilan;
 - d. berbasis potensi lokal
4. Program pembangunan pertanian era revolusi hijau di Indonesia yang bercorak *top-down* adalah
 - a. PNPM Mandiri;
 - b. Bimas/Inmas;
 - c. Program IDT;
 - d. Program Pengembangan Kecamatan
5. Dalam kerangka *power cube*, forum musyawarah perencanaan pembangunan di mana masyarakat diundang pemerintah untuk berpartisipasi termasuk kategori ruang
 - a. tertutup (*closed*);
 - b. undangan (*invited*);
 - c. diciptakan (*created*);
 - d. tersembunyi (*hidden*)
6. Kekuatan yang tumbuh dari solidaritas dan kerja sama kelompok disebut
 - a. *power over*;
 - b. *power to*;
 - c. *power with*;
 - d. *power within*
7. Peran pemerintah menyediakan payung kebijakan yang berpihak pada masyarakat lemah merupakan peran sebagai
 - a. fasilitator;
 - b. regulator;

- c. katalisator;
 - d. eksekutor
8. Kelemahan yang paling sering dikritik dari peran LSM dalam pemberdayaan adalah
- a. terlalu dekat dengan masyarakat;
 - b. metodologi yang kaku;
 - c. ketergantungan pada dana donor dan jangkauan terbatas;
 - d. tidak memiliki inovasi
9. Undang-undang yang melembagakan kewenangan desa dan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa adalah
- a. UU No. 19 Tahun 2013;
 - b. UU No. 6 Tahun 2014;
 - c. UU No. 23 Tahun 2014;
 - d. UU No. 11 Tahun 2020
10. Norma dan keyakinan yang membuat kelompok lemah menerima ketidakadilan sebagai hal yang wajar, dalam kerangka *power cube*, termasuk bentuk kekuasaan
- a. terlihat (*visible*);
 - b. tersembunyi (*hidden*);
 - c. terinternalisasi (*invisible*);
 - d. formal

➤ Tugas

Buatlah resume materi bab ini sepanjang 2–3 halaman yang memuat:

- a. Definisi pemberdayaan menurut pemahaman Anda sendiri.
- b. Waktu perkembangan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
- c. Satu contoh nyata peran pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam pemberdayaan di daerah asal Anda.

➤ Latihan Uraian

- a. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri perbedaan antara pemberdayaan sebagai proses dan pemberdayaan sebagai tujuan, serta berikan masing-masing satu contoh dalam konteks masyarakat tani.
- b. Uraikan mengapa pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* sering gagal menumbuhkan kemandirian masyarakat, dan bandingkan dengan pendekatan pemberdayaan.
- c. Analisislah pergeseran paradigma program pembangunan masyarakat di Indonesia dari era Bimas hingga era Undang-Undang Desa. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari setiap era?
- d. Mengapa analisis kuasa (*power*) penting dalam pemberdayaan? Berikan contoh bentuk kuasa yang menghambat petani kecil dalam rantai pemasaran hasil pertanian.
- e. Jelaskan peran ideal pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan agar tidak saling menggantikan peran satu sama lain.

➤ Bahan Diskusi Kelas

- a. Diskusikan dalam kelompok kecil: apakah pemberian bantuan langsung tunai termasuk pemberdayaan? Dalam kondisi apa bantuan semacam itu memberdayakan, dan dalam kondisi apa justru melemahkan?
- b. Perdebatkan pernyataan berikut: "Masyarakat desa tidak akan berubah tanpa dorongan pihak luar." Kelompok pro dan kontra masing-masing menyiapkan argumen berbasis konsep bab ini.

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- Kaitkan “proses” dengan tahapan penyadaran–pengkapasitasan–pendayaan, dan “tujuan” dengan kondisi masyarakat yang mandiri; contoh diambil dari kehidupan kelompok tani.
- Gunakan argumen ketergantungan, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan, dan matinya inisiatif lokal; kontraskan dengan prinsip partisipasi dan kepemilikan.
- Susun kronologis per era, identifikasi ciri pendekatannya (mobilisasi, proyek, partisipasi, kewenangan desa), lalu tarik pelajaran lintas era.
- Jelaskan bentuk-bentuk kuasa (terlihat, tersembunyi, terinternalisasi) dan tunjukkan posisinya dalam relasi petani–tengkulak–pasar.
- Gunakan prinsip subsidiaritas: pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan dasar, LSM sebagai fasilitator, swasta sebagai mitra usaha, masyarakat sebagai pelaku utama.

➤ **Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada lampiran, kemudian hitung tingkat penguasaan dengan rumus: $\text{Tingkat Penguasaan} = (\text{jumlah jawaban benar} \div 10) \times 100\%$. Kriteria: 90–100% = baik sekali; 80–89% = baik; 70–79% = cukup; di bawah 70% = kurang. Apabila mencapai 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 2. Apabila belum, pelajari kembali terutama subbab 1.1, 1.3, dan 1.4.

➤ **Bacaan Lanjutan Beranotasi**

- a. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Karya klasik yang meletakkan dasar konsep penyadaran kritis (konsientisasi); penting dibaca untuk memahami akar filosofis pemberdayaan sebagai pembebasan, bukan sekadar bantuan.
- b. Bebbington, A., & Bebbington, D. H. (2022) dalam *World Development*. Tinjauan mutakhir pendekatan pembangunan yang digerakkan masyarakat; berguna untuk memahami perdebatan terkini tentang efektivitas pemberdayaan akar rumput.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bacaan wajib untuk memahami kerangka hukum kewenangan desa, musyawarah desa, dan Dana Desa sebagai arena utama pemberdayaan di Indonesia.

➤ **Daftar Pustaka**

- Alcántara, C., Nguyen, H., & Alegría, M. (2021). Community resilience and civic engagement: Pathways to empowerment among marginalized groups. *Journal of Community Psychology*, 49(5), 1542–1560.
- Amandaria, R., Darma, R., Zain, M. M., Fudjaja, L., Wahda, M. A., Kamarulzaman, N. H., Bakheet Ali, H., & Akzar, R. (2025). Sustainable resilience in flood-prone rice farming: Adaptive strategies and risk-sharing around Tempe Lake, Indonesia. *Sustainability*, 17(6), 2456. <https://doi.org/10.3390/su17062456>
- Bebbington, A., & Bebbington, D. H. (2022). Participatory development and local institutions: New evidence from community-driven programs. *World Development*, 151, 105765.

- Chambers, R., & Pettit, J. (Eds.). (2023). *Community-led development in practice: Methods, impacts, and lessons*. Routledge.
- Darma, R., Rahmadanih, Zain, M. M., Amandaria, R., Mario, M., & Akzar, R. (2025). Resilient rice farming: Household strategies for coping with recurrent floods in Tempe Lake, Indonesia. *Societies*, 15(5), 129. <https://doi.org/10.3390/soc15050129>
- Dutta, P., & Sarker, S. (2024). Digital tools for community empowerment: Case studies from South Asia. *Information Technologies & International Development*, 20(1), 34–56.
- Ilyas, A. A. F. R., Ibrahim, H., & Sulfiana. (2026). Peran penyuluh pertanian dalam transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani bawang merah di Desa Janettallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. *Agribusiness and Socioeconomic Journal*. <https://asejournal.fapertauim.ac.id/index.php/ASEJournal/article/view/128>
- McGee, R., & Gaventa, J. (2020). The power cube and community empowerment: Theory to practice. *Journal of Development Studies*, 56(9), 1789–1805.
- OECD. (2021). *Community empowerment for local development: Policies and practice*. OECD Publishing.
- Pritchett, L., & Woolcock, M. (2021). Building empowerment through social accountability: Evidence and strategies. *Governance and Development Review*, 9(2), 77–101.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab ini membahas partisipasi masyarakat sebagai jantung pemberdayaan. Materi meliputi konsep dan teori partisipasi, tipologi dan jenjang partisipasi (tangga partisipasi Arnstein), ruang-ruang partisipasi dan pemberdayaan, peran partisipasi dalam pembangunan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal, faktor pendorong dan penghambat partisipasi, serta partisipasi kelompok marginal. Bab ditutup dengan studi kasus proyek pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif.

Relevansi

Hampir semua kegagalan program pemberdayaan dapat dilacak pada lemahnya partisipasi: masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, tidak merasa memiliki program, dan tidak merawat hasilnya. Sebaliknya, partisipasi yang bermakna meningkatkan ketepatan sasaran, rasa kepemilikan, dan keberlanjutan. Bagi calon sarjana agribisnis yang akan bekerja sebagai penyuluh, fasilitator, pendamping desa, atau perencana pembangunan, kemampuan menumbuhkan dan mengelola partisipasi adalah kompetensi inti.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- b. Membedakan jenjang dan tipologi partisipasi.
- c. Menganalisis peran partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- d. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi.
- e. Menganalisis studi kasus proyek pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif.

➤ Konsep dan Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti pengambilan bagian atau keikutsertaan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dengan kesadaran dan kesukarelaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Definisi ini mengandung beberapa unsur penting. *Pertama*, partisipasi bersifat aktif dan sukarela, bukan mobilisasi atau pengerahan massa. Warga yang dikerahkan bekerja bakti karena takut sanksi bukanlah partisipasi dalam arti sesungguhnya. *Kedua*, partisipasi mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya dalam pelaksanaan. Inilah pembeda utama antara partisipasi sejati dengan partisipasi semu. *Ketiga*, partisipasi menjangkau seluruh siklus pembangunan: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pemantauan dan evaluasi.

Secara teoretis, terdapat dua cara pandang besar terhadap partisipasi. Pandangan pertama melihat partisipasi sebagai *alat (means)* untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proyek: dengan melibatkan masyarakat, proyek menjadi lebih murah, lebih tepat sasaran, dan lebih terpelihara. Pandangan kedua melihat partisipasi sebagai *tujuan (end)* itu sendiri:

partisipasi adalah hak warga negara dan proses yang memberdayakan, terlepas dari untung-ruginya bagi proyek. Praktik pemberdayaan yang baik memadukan keduanya, tetapi menempatkan partisipasi sebagai hak sebagai fondasi.

Empat bentuk partisipasi dalam siklus pembangunan lazim dibedakan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya keikutsertaan dalam musyawarah desa menentukan prioritas penggunaan dana desa.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan, berupa sumbangan tenaga, dana, material, atau keterlibatan dalam pengelolaan kegiatan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu keikutsertaan menikmati dan memelihara hasil pembangunan.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, yaitu keterlibatan menilai proses dan hasil pembangunan serta mengawasi penyelenggaraannya.

➤ **Jenjang dan Tipologi Partisipasi: Tangga Arnstein dan Perkembangannya**

Tidak semua yang disebut “partisipasi” memiliki makna yang sama. Sherry Arnstein (1969) memperkenalkan metafora tangga partisipasi warga (*a ladder of citizen participation*) yang terdiri atas delapan anak tangga dalam tiga kelompok besar.

Kelompok pertama, nonpartisipasi, mencakup (1) *manipulation* dan (2) *therapy* warga dilibatkan hanya untuk dididik atau “disembuhkan” agar menerima keputusan yang sudah dibuat pihak berkuasa. Kelompok kedua, tokenisme (partisipasi semu), mencakup (3) *informing* (warga sekadar diberi informasi satu arah), (4) *consultation* (warga didengar pendapatnya tanpa jaminan diperhitungkan), dan (5) *placation* (beberapa wakil warga diberi kursi, tetapi keputusan tetap di

tangan elite). Kelompok ketiga, kekuasaan warga (*citizen power*), mencakup (6) *partnership* (kemitraan dengan pembagian tanggung jawab perencanaan dan keputusan), (7) *delegated power* (warga memegang kewenangan yang didelegasikan), dan (8) *citizen control* (warga mengendalikan penuh program).

Tangga Arnstein mengajarkan kepekaan kritis: banyak forum yang tampak partisipatif sesungguhnya berhenti pada tokenisme. Sosialisasi program yang dikemas sebagai “musyawarah”, atau konsultasi publik yang hasilnya tidak pernah memengaruhi keputusan, adalah contohnya. Tugas fasilitator pemberdayaan adalah mendaki tangga itu: menggeser praktik dari sekadar memberi informasi menuju kemitraan dan kendali warga.

Tipologi lain membedakan partisipasi berdasarkan motif keterlibatan, mulai dari partisipasi pasif (masyarakat hanya diberi tahu), partisipasi melalui pemberian informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi karena insentif material, partisipasi fungsional (masyarakat membentuk kelompok untuk tujuan proyek), partisipasi interaktif (masyarakat terlibat dalam analisis dan perencanaan bersama), sampai mobilisasi mandiri (*self-mobilization*), yaitu prakarsa yang tumbuh dari masyarakat sendiri tanpa menunggu pihak luar. Semakin ke arah mobilisasi mandiri, semakin tinggi kualitas partisipasi dan semakin dekat pada hakikat pemberdayaan.

➤ Ruang Partisipasi dan Pemberdayaan

Sebagaimana diperkenalkan pada Bab 1, partisipasi berlangsung dalam ruang-ruang yang tidak netral. Cornwall dan Coelho (2021) menegaskan kembali pentingnya membedakan ruang undangan (*invited spaces*) forum yang dibuka negara atau lembaga untuk mengundang partisipasi warga dengan

ruang yang diklaim atau diciptakan warga sendiri (*claimed/created spaces*). Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), badan permusyawaratan desa, dan komite sekolah adalah ruang undangan; sementara serikat tani, forum warga, arisan produktif, dan gerakan sosial adalah ruang yang diciptakan warga.

Kehadiran ruang tidak otomatis menghasilkan partisipasi bermakna. Ruang undangan sering diwarnai ketimpangan: warga hadir tetapi tidak bersuara; yang bersuara hanya elite; agenda telah ditentukan sebelumnya; bahasa teknokratis menyingkirkan warga biasa. Oleh karena itu, pemberdayaan bekerja pada dua sisi sekaligus: memperbaiki kualitas ruang undangan (aturan main yang adil, informasi yang terbuka, fasilitasi yang baik) dan memperkuat kemampuan warga untuk mengisi ruang tersebut serta menciptakan ruangnya sendiri (pengorganisasian, pendidikan kritis, penguatan organisasi rakyat).

➤ **Peran Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal**

Partisipasi memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan pada beberapa aras. Pada aras *efektivitas program*, partisipasi memastikan program sesuai kebutuhan riil, memanfaatkan pengetahuan lokal, dan mengurangi salah sasaran. Pada aras *efisiensi*, swadaya masyarakat menurunkan biaya dan mempercepat pelaksanaan. Pada aras *keberlanjutan*, rasa memiliki (*sense of ownership*) yang lahir dari keterlibatan membuat masyarakat merawat hasil pembangunan. Pada aras *demokratisasi*, partisipasi mendidik warga berorganisasi, bermusyawarah, dan mengawasi kekuasaan membangun kewargaan aktif. Pada aras *keadilan*, partisipasi membuka

saluran bagi kelompok lemah untuk menyuarakan kepentingannya.

Bebbington dan Bebbington (2022) berdasarkan bukti dari program-program *community-driven* menunjukkan bahwa hasil pembangunan partisipatif sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan lokal: program yang menumpang pada kelembagaan yang hidup dan dipercaya warga memberikan hasil lebih baik daripada program yang membentuk kelembagaan baru bentukan proyek yang mati setelah proyek berakhir. Pelajaran ini penting bagi Indonesia yang kaya kelembagaan lokal dari kelompok tani, subak, mapalus, sampai lembaga adat tetapi juga penuh pengalaman kelembagaan bentukan proyek yang tidak berumur panjang.

Dalam konteks pertanian, partisipasi petani melalui kelembagaan bagi-hasil dan bagi-risiko juga terbukti menjadi mekanisme bertahan menghadapi risiko iklim. Studi Darma dkk. (2025) dan Amandaria dkk. (2025) di kawasan Danau Tempe menunjukkan bahwa kerja sama informal antara petani penggarap, pemilik lahan, dan pengusaha pompa irigasi dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama merupakan kelembagaan partisipatif yang tumbuh dari bawah dan menjadi jaring pengaman saat banjir menggagalkan panen.

➤ **Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi**

Partisipasi tidak tumbuh otomatis. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi antara lain:

- a. Kesesuaian program dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat (*felt needs*).
- b. Manfaat yang jelas dan dapat dirasakan.
- c. Kepemimpinan lokal yang dipercaya.

- d. Kelembagaan dan modal sosial yang kuat, jaringan, norma timbal balik, dan kepercayaan.
- e. Keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan.
- f. Fasilitasi yang baik dan komunikasi yang setara.
- g. Dukungan kebijakan yang memberi kewenangan nyata kepada masyarakat.

Sebaliknya, faktor penghambat partisipasi meliputi:

- a. Pengalaman buruk masa lalu, janji program yang tidak ditepati menumbuhkan sikap apatis.
- b. Kemiskinan dan kesibukan mencari nafkah yang membuat warga tidak memiliki waktu luang (*opportunity cost* partisipasi tinggi).
- c. Budaya paternalistik dan feodal yang membuat warga sungkan berbeda pendapat dengan tokoh atau aparat.
- d. Dominasi elite (*elite capture*) yang membajak forum dan manfaat program.
- e. Rendahnya kepercayaan diri, pendidikan, dan akses informasi.
- f. Hambatan struktural bagi kelompok tertentu, misalnya norma yang membatasi perempuan hadir di forum publik.
- g. Desain program yang kaku, tergesa-gesa, dan berorientasi target administratif.

Memahami hambatan ini penting agar fasilitator tidak terjebak menyalahkan masyarakat sebagai “malas berpartisipasi”. Sering kali yang perlu diubah adalah desain dan cara kerja programnya, bukan masyarakatnya.

➤ **Partisipasi Kelompok Marginal dan Resiliensi Komunitas**

Perhatian khusus perlu diberikan pada partisipasi kelompok yang selama ini terpinggirkan: perempuan, pemuda, warga miskin, buruh tani tak bertanah, penyandang disabilitas, dan

masyarakat adat. Tanpa upaya afirmatif, forum partisipasi cenderung dikuasai laki-laki dewasa dari lapisan menengah ke atas. Upaya afirmatif dapat berupa kuota keterwakilan, forum khusus (misalnya musyawarah perempuan sebelum musyawarah desa), waktu dan tempat pertemuan yang ramah bagi kelompok rentan, serta pendampingan khusus untuk menumbuhkan kepercayaan diri.

Alcántara dkk. (2021) bagi kelompok marginal, keterlibatan sipil bukan hanya saluran menyampaikan aspirasi, melainkan juga jalur membangun resiliensi komunitas kemampuan komunitas bertahan, pulih, dan berkembang menghadapi tekanan. Fan dan Liu (2022) membuktikan bahwa aksi kolektif perempuan di komunitas perdesaan menjadi kendaraan pemberdayaan ekonomi sekaligus perubahan relasi gender. Partisipasi kelompok marginal bukan beban program, melainkan investasi bagi kekuatan komunitas itu sendiri.

Studi Kasus 2.1 — Partisipasi Aktif dalam Rehabilitasi Irigasi Desa.

Sebuah desa penghasil padi di Sulawesi Selatan menghadapi kerusakan saluran irigasi tersier yang menurunkan luas tanam. Melalui fasilitasi pendamping desa, persoalan ini diangkat dalam musyawarah dusun yang dihadiri petani pemilik, penggarap, buruh tani, dan kelompok perempuan tani. Warga sepakat menempatkan rehabilitasi saluran sebagai prioritas dana desa, membentuk tim pelaksana kegiatan dari unsur petani pemakai air, dan menyepakati swadaya tenaga kerja bergilir. Perempuan tani terlibat menentukan titik-titik saluran yang mengairi lahan sayur pekarangan. Pengumuman anggaran dipasang terbuka di balai desa. Hasilnya, saluran selesai lebih cepat dari jadwal dengan biaya lebih hemat, dan kelompok petani pemakai air menyepakati iuran pemeliharaan rutin. Analisis kasus: keberhasilan ini lahir dari (1) kesesuaian kegiatan

dengan kebutuhan yang dirasakan; (2) partisipasi dalam pengambilan keputusan, bukan hanya kerja fisik; (3) transparansi anggaran; (4) pelibatan kelompok yang biasanya terpinggirkan; dan (5) kelembagaan pemeliharaan yang menjamin keberlanjutan sebuah contoh partisipasi pada anak tangga kemitraan hingga kendali warga menurut Arnstein.

Sorotan Lapangan: Musyawarah yang Berubah Setelah Jam Rapat Digeser

Di sebuah desa, kehadiran perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan selalu di bawah sepuluh persen. Bertahun-tahun hal itu dianggap wajar: “ibu-ibu memang tidak berminat”. Seorang pendamping desa mencoba hal kecil: menggeser jam musyawarah dari malam hari ke sore hari setelah kegiatan posyandu, memindahkan tempatnya ke halaman yang terbuka, dan mengumumkannya lewat kader serta majelis taklim, bukan hanya lewat pengeras suara masjid. Kehadiran perempuan melonjak menjadi hampir separuh peserta, dan untuk pertama kalinya usulan pembangunan sarana air bersih dekat permukiman kebutuhan yang selama ini dipikul perempuan masuk daftar prioritas desa. Kisah ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sering bukan soal minat, melainkan soal hambatan struktural yang tidak terlihat oleh penyelenggara: waktu, tempat, saluran informasi, dan rasa aman untuk hadir. Fasilitator yang jeli membaca hambatan-hambatan ini dapat membuka ruang partisipasi tanpa biaya besar. Partisipasi yang bermakna dimulai dari pertanyaan sederhana: siapa yang tidak hadir di ruangan ini, dan mengapa?.

➤ Rangkuman

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan sukarela masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Partisipasi dapat dipandang sebagai alat sekaligus tujuan pembangunan. Tangga partisipasi Arnstein membedakan nonpartisipasi, tokenisme, dan kekuasaan warga, sedangkan tipologi lain merentang dari partisipasi pasif hingga mobilisasi mandiri. Partisipasi berlangsung dalam ruang undangan dan ruang yang diciptakan warga, yang keduanya perlu digarap. Partisipasi menyumbang pada efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, demokratisasi, dan keadilan pembangunan, dengan kelembagaan lokal sebagai penentu kualitas hasil. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi harus dikenali agar fasilitasi tepat, dan kelompok marginal memerlukan upaya afirmatif agar partisipasinya bermakna.

➤ Tes Formatif 2

1. Pembeda utama partisipasi sejati dengan mobilisasi adalah
 - a. jumlah warga yang terlibat;
 - b. kesadaran dan kesukarelaan serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan;
 - c. besarnya sumbangan dana;
 - d. adanya surat keputusan resmi
2. Warga yang hanya diberi informasi satu arah tentang program yang sudah diputuskan, menurut tangga Arnstein berada pada anak tangga
 - a. *manipulation*;
 - b. *informing*;
 - c. *partnership*;
 - d. *citizen control*

3. Kelompok anak tangga *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control* pada tangga Arnstein disebut
 - a. nonpartisipasi;
 - b. tokenisme;
 - c. kekuasaan warga;
 - d. partisipasi fungsional
4. Prakarsa masyarakat yang tumbuh tanpa menunggu pihak luar disebut
 - a. partisipasi pasif;
 - b. partisipasi karena insentif;
 - c. partisipasi fungsional;
 - d. mobilisasi mandiri
5. Musrenbang termasuk kategori ruang partisipasi
 - a. tertutup;
 - b. undangan;
 - c. diklaim warga;
 - d. informal
6. Dominasi tokoh atau elite lokal yang membajak forum dan manfaat program disebut
 - a. *free rider*;
 - b. *elite capture*;
 - c. *rent seeking*;
 - d. *moral hazard*
7. Rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang lahir dari keterlibatan disebut
 - a. *sense of belonging*;
 - b. *sense of ownership*;
 - c. *social capital*;
 - d. *self-help*

8. Bebbington dan Bebbington (2022), keberhasilan program pembangunan partisipatif paling ditentukan oleh
 - a. besarnya dana;
 - b. kualitas kelembagaan lokal;
 - c. jumlah tenaga ahli;
 - d. lamanya program
9. Menyelenggarakan musyawarah khusus perempuan sebelum musyawarah desa merupakan contoh
 - a. tokenisme;
 - b. upaya afirmatif;
 - c. mobilisasi;
 - d. formalitas
10. Fan dan Liu (2022), kendaraan pemberdayaan ekonomi perempuan perdesaan yang efektif adalah
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. aksi kolektif perempuan;
 - c. kredit individual;
 - d. pelatihan singkat

➤ Tugas

Carilah satu proyek atau program pemberdayaan masyarakat di sekitar Anda (misalnya kegiatan dana desa, program CSR, atau kegiatan LSM). Analisislah dengan menjawab:

- a. Pada anak tangga Arnstein manakah partisipasi masyarakat dalam program tersebut
- b. Faktor apa yang mendorong dan menghambat partisipasi
- c. Bagaimana keterlibatan kelompok perempuan dan warga miskin.

Tuliskan dalam bentuk resume 2–3 halaman.

➤ Latihan Uraian

- a. Jelaskan delapan anak tangga partisipasi Arnstein dan tunjukkan pada anak tangga mana umumnya musyawarah perencanaan pembangunan desa di Indonesia berada, disertai alasan.
- b. Bandingkan ruang partisipasi undangan (invited space) dan ruang partisipasi yang direbut warga (claimed space) beserta contohnya di lingkungan pedesaan.
- c. Uraikan faktor-faktor penghambat partisipasi kelompok perempuan dan buruh tani dalam pengambilan keputusan desa, serta usulkan strategi mengatasinya.
- d. Mengapa partisipasi yang bersifat tokenisme dapat lebih merugikan daripada tidak ada partisipasi sama sekali? Jelaskan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.
- e. Jelaskan hubungan antara kelembagaan lokal (seperti kelompok tani dan majelis taklim) dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat.

➤ Bahan Diskusi Kelas

- a. Amati pengalaman desa asal Anda: sejauh mana warga benar-benar menentukan prioritas penggunaan Dana Desa? Petakan pada tangga Arnstein dan diskusikan.
- b. Diskusikan dilema fasilitator: bagaimana mendorong partisipasi warga yang “diam” tanpa memaksa mereka berbicara di forum?

➤ Petunjuk Jawaban Latihan Uraian

- a. Urutkan delapan anak tangga dari manipulasi hingga kendali warga; nilai musyawarah desa berdasarkan siapa yang menentukan keputusan akhir.
- b. Bedakan dari sisi siapa yang membuka ruang dan siapa yang mengendalikan agenda; contoh: musrenbang

(undangan) versus forum warga penolak tambang (rebutan).

- c. Telaah hambatan waktu, norma, informasi, kepercayaan diri, dan struktur forum; strategi menjawab tiap hambatan secara spesifik.
- d. Bahas dampak tokenisme pada kepercayaan, kelelahan partisipasi, dan legitimasi semu bagi keputusan sepihak.
- e. Tunjukkan fungsi kelembagaan lokal sebagai wadah belajar bersuara, agregasi kepentingan, dan saluran menuju forum desa.

➤ **Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Hitung tingkat penguasaan Anda seperti pada Bab 1. Bila mencapai 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 3; bila belum, pelajari kembali subbab 2.2 dan 2.5.

➤ **Bacaan Lanjutan Beranotasi**

- a. Arnstein, S. R. (1969) dalam *Journal of the American Institute of Planners*. Artikel asli tentang partisipasi warga; singkat, tajam, dan tetap menjadi rujukan utama untuk menilai kadar partisipasi hingga kini.
- b. Cornwall, A., & Coelho, V. S. (2021) dalam *Development and Change*. Mengulas politik ruang partisipasi (invited dan claimed spaces); membantu memahami mengapa forum partisipatif formal sering tidak otomatis memberdayakan.
- c. Chambers, R., & Pettit, J. (2023). *Participation and empowerment in development practice*. Buku praktik partisipasi terkini dari perintis PRA; kaya contoh fasilitasi yang menghadirkan suara kelompok terpinggirkan.

➤ Daftar Pustaka

- Alcántara, C., Nguyen, H., & Alegría, M. (2021). Community resilience and civic engagement: Pathways to empowerment among marginalized groups. *Journal of Community Psychology*, 49(5), 1542–1560.
- Amandaria, R., Darma, R., Zain, M. M., Fudjaja, L., Wahda, M. A., Kamarulzaman, N. H., Bakheet Ali, H., & Akzar, R. (2025). Sustainable resilience in flood-prone rice farming: Adaptive strategies and risk-sharing around Tempe Lake, Indonesia. *Sustainability*, 17(6), 2456.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bebbington, A., & Bebbington, D. H. (2022). Participatory development and local institutions: New evidence from community-driven programs. *World Development*, 151, 105765.
- Cornwall, A., & Coelho, V. S. P. (2021). Spaces for participation and empowerment: Revisiting theory and practice. *Development and Change*, 52(2), 321–343.
- Darma, R., Rahmadanih, Zain, M. M., Amandaria, R., Mario, M., & Akzar, R. (2025). Resilient rice farming: Household strategies for coping with recurrent floods in Tempe Lake, Indonesia. *Societies*, 15(5), 129.
- Fan, L., & Liu, Y. (2022). Women's collective action and economic empowerment in rural communities. *Feminist Economics*, 28(3), 98–123.

BAB III

STRATEGI DAN METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

➤ **Pendahuluan**

Deskripsi Singkat

Bab ini menjembatani konsep (Bab 1–2) dengan praktik pemberdayaan. Materi meliputi strategi pemberdayaan pada aras mikro, mezzo, dan makro; tahapan proses pemberdayaan; metode-metode partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Rapid Rural Appraisal* (RRA), diskusi kelompok terarah (FGD), dan pemetaan sosial; peran dan keterampilan fasilitator; penguatan kelembagaan lokal dan modal sosial; serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan masyarakat.

Relevansi

Konsep pemberdayaan tanpa penguasaan strategi dan metode hanya berhenti sebagai wacana. Bab ini membekali mahasiswa dengan “peralatan kerja” fasilitator: bagaimana memilih aras intervensi, menahapkan proses, menggunakan teknik-teknik partisipatif di lapangan, dan memanfaatkan teknologi digital. Kompetensi ini langsung berkaitan dengan profil lulusan agribisnis sebagai penyuluh, fasilitator, dan konsultan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu

- a. Membedakan strategi pemberdayaan aras mikro, mezzo, dan makro.
- b. Menjelaskan tahapan proses pemberdayaan.

- c. Menerapkan metode partisipatif (PRA, FGD, pemetaan sosial) secara sederhana.
- d. Menguraikan peran dan etika fasilitator.
- e. Menjelaskan pemanfaatan teknologi digital dalam pemberdayaan.

➤ **Strategi Pemberdayaan: Aras Mikro, Mezzo, dan Makro**

Strategi pemberdayaan dapat dipetakan menurut aras (tingkat) sasarannya.

- a. Aras mikro menysasar individu dan keluarga. Bentuknya berupa bimbingan, konseling, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan motivasi. Tujuannya menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri individu — sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task-centered approach*). Contoh dalam agribisnis: pendampingan seorang petani muda menyusun rencana usaha hidroponik, atau konsultasi keluarga tani dalam mengelola keuangan rumah tangga.
- b. Aras mezzo menysasar kelompok dan komunitas. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi: pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok dipakai untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan kolektif. Contohnya sekolah lapang kelompok tani, penguatan kelompok wanita tani, pengembangan koperasi, dan pembentukan kelompok usaha bersama. Aras ini paling banyak digunakan dalam praktik pemberdayaan perdesaan karena kelompok menjadi wahana belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi sekaligus.

- c. Aras makro menyoasar sistem dan lingkungan yang lebih luas: kebijakan publik, peraturan, dan struktur sosial-ekonomi. Strateginya meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye publik, aksi sosial, lobi, dan advokasi. Pendekatan ini disebut strategi sistem besar (*large-system strategy*) karena memandang klien sebagai warga yang harus diperjuangkan haknya pada tingkat kebijakan. Contoh: advokasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau perjuangan kebijakan harga dasar gabah yang adil.

Ketiga aras saling melengkapi. Pelatihan petani (mikro) tidak akan banyak berarti bila kelembagaan taninya lemah (*mezzo*) dan kebijakan harganya merugikan (makro). Fasilitator yang baik mampu membaca pada aras mana simpul persoalan berada dan merancang intervensi berlapis.

➤ Tahapan Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan lazim ditahapkan sebagai berikut, meskipun dalam praktik tahapan ini berlangsung lentur dan berulang (*iteratif*).

- a. Tahap persiapan (*engagement*). Meliputi penyiapan petugas (penyamaan persepsi tim fasilitator) dan penyiapan lapangan (studi kelayakan awal, perizinan, silaturahmi dengan tokoh dan warga). Kunci tahap ini adalah membangun kepercayaan (*trust building*); tanpa kepercayaan, seluruh tahap berikutnya rapuh.
- b. Tahap pengkajian (*assessment*). Bersama masyarakat mengidentifikasi masalah, kebutuhan yang dirasakan, dan potensi/aset yang dimiliki. Di sinilah metode-metode partisipatif (subbab 3.3) digunakan.

- c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan. Fasilitator melibatkan warga berpikir tentang masalah dan cara mengatasinya, merumuskan tujuan, dan memilih kegiatan prioritas berdasarkan kriteria yang disepakati (kemendesakan, jangkauan manfaat, kelayakan sumber daya).
- d. Tahap formulasi rencana aksi. Gagasan dituangkan dalam rencana tertulis: kegiatan, penanggung jawab, jadwal, kebutuhan biaya, dan sumbernya termasuk proposal bila memerlukan dukungan pihak luar.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi). Rencana dijalankan dengan peran utama pada masyarakat; fasilitator mendampingi, memediasi, dan membantu memecahkan masalah yang muncul. Kaderisasi pelaku lokal dimulai sejak tahap ini.
- f. Tahap evaluasi. Bersama warga menilai proses dan hasil, memetik pembelajaran, dan merumuskan perbaikan (dibahas mendalam pada Bab 9).
- g. Tahap terminasi (pemandirian). Pemutusan hubungan pendampingan secara bertahap setelah masyarakat dinilai mampu melanjutkan sendiri. Terminasi yang baik direncanakan sejak awal (*exit strategy*), bukan terjadi mendadak karena proyek habis.

➤ Metode dan Teknik Partisipatif

- A. *Rapid Rural Appraisal* (RRA). RRA adalah teknik pengkajian keadaan desa secara cepat oleh tim luar dengan mengoptimalkan pengumpulan informasi dalam waktu singkat: wawancara semi-terstruktur, observasi lapang, penelusuran data sekunder, dan triangulasi antar sumber. Dalam RRA, orang luar masih menjadi aktor utama analisis; masyarakat lebih berperan sebagai sumber informasi.

- B. *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA di Indonesia dikenal sebagai Pengkajian Keadaan Desa secara Partisipatif mengembangkan RRA dengan membalik peran: masyarakatlah yang mengkaji, menganalisis, dan merencanakan; orang luar memfasilitasi. Prinsip-prinsip PRA meliputi: belajar dari masyarakat, orang luar sebagai fasilitator, saling belajar dan berbagi pengalaman, santai dan informal, keterlibatan semua kelompok (termasuk perempuan dan warga miskin), triangulasi, mengoptimalkan hasil (*optimal ignorance* tidak perlu tahu segalanya, cukup yang diperlukan), serta orientasi praktis dan berkelanjutan.

Teknik-teknik PRA yang penting dikuasai antara lain:

- a. Pemetaan desa (*village mapping*) warga menggambar peta sumber daya, permukiman, lahan, dan fasilitas untuk memahami kondisi wilayahnya.
- b. Transek (penelusuran lokasi) berjalan bersama warga menyusuri desa mengamati tata guna lahan, jenis tanah, vegetasi, dan masalah tiap zona.
- c. Kalender musim menggambarkan pola musim hujan/kemarau, pola tanam, curahan kerja, pendapatan, hama-penyakit, dan masa paceklik sepanjang tahun.
- d. Bagan alur kegiatan harian membandingkan curahan waktu laki-laki dan perempuan.
- e. Diagram Venn kelembagaan memetakan lembaga-lembaga yang ada, besar-kecil pengaruhnya, dan dekat-jauhnya dengan masyarakat.
- f. Bagan peringkat (*ranking* dan *scoring*) menentukan prioritas masalah atau pilihan kegiatan dengan matriks.
- g. Alur sejarah desa menelusuri kejadian penting yang membentuk kondisi kini.

- h. Analisis pohon masalah mengurai sebab-akibat masalah (diperdalam pada Bab 8).
- C. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*). FGD adalah diskusi terstruktur 7–12 peserta yang relatif homogen, dipandu fasilitator dengan pedoman pertanyaan, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan aspirasi tentang topik tertentu. Kunci FGD yang baik: pemilihan peserta yang tepat, suasana setara, pertanyaan terbuka, pencatatan yang teliti, dan fasilitator yang tidak mendominasi.
- D. Pemetaan sosial (*social mapping*). Pemetaan sosial memotret struktur sosial komunitas: pelapisan sosial, kelompok-kelompok kepentingan, tokoh kunci dan jejaring pengaruhnya, kelembagaan formal-informal, serta kelompok rentan. Hasilnya menjadi dasar menentukan strategi pelibatan: siapa perlu digandeng, siapa berpotensi menghambat, dan siapa harus dipastikan tidak tertinggal.

➤ **Peran, Keterampilan, dan Etika Fasilitator**

Fasilitator (pendamping, penyuluh, agen pemberdayaan) menjalankan beberapa peran sekaligus: peran edukasional (membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melatih); peran fasilitatif (memfasilitasi pertemuan, menjadi mediator dan negosiator, membangun konsensus, memberi dukungan); peran perwakilan (menghubungkan masyarakat dengan sumber daya luar, jejaring, dan advokasi); dan peran teknis (membantu analisis data, manajemen, dan keterampilan teknis usaha).

Keterampilan pokok fasilitator meliputi komunikasi dialogis (mendengar aktif, bertanya yang menggali, bahasa yang membumi), keterampilan memfasilitasi dinamika kelompok, kepekaan sosial-budaya, analisis masalah, dan manajemen konflik. Peran penyuluh pertanian dalam

transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani sebagaimana ditunjukkan Ilyas dkk. (2026) sangat ditentukan oleh intensitas pendampingan dan kesesuaian metode dengan kondisi petani.

Etika fasilitator antara lain: menghormati kearifan dan keputusan masyarakat, tidak menjanjikan yang tidak pasti, transparan tentang identitas dan kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, tidak menciptakan ketergantungan, dan berpihak pada kelompok paling lemah tanpa memecah belah komunitas.

➤ **Penguatan Kelembagaan Lokal dan Modal Sosial**

Kelembagaan lokal adalah wadah keberdayaan kolektif. Penguatan kelembagaan mencakup aspek:

- a. Organisasi — kejelasan tujuan, aturan main, kepengurusan, dan administrasi.
- b. Keanggotaan — partisipasi dan rasa memiliki anggota.
- c. Usaha — kegiatan produktif yang memberi manfaat nyata.
- d. Jejaring — hubungan dengan lembaga lain dan sumber daya luar.
- e. Kaderisasi — regenerasi kepemimpinan.

Modal sosial jaringan, norma timbal balik, dan kepercayaan yang memungkinkan kerja sama adalah bahan bakar kelembagaan. Modal sosial mengikat (*bonding*) merekatkan sesama anggota komunitas; modal sosial menjembatani (*bridging*) menghubungkan antarkomunitas; modal sosial mengait (*linking*) menghubungkan komunitas dengan lembaga yang lebih berkuasa. Program pemberdayaan yang baik merawat ketiganya: memperkuat kohesi internal tanpa menutup diri, dan membuka akses ke jejaring serta kekuasaan yang lebih luas. Praktik gotong royong, arisan,

jimpitan, dan lumbung desa adalah wujud modal sosial Indonesia yang dapat menjadi titik tumpu program.

➤ **Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemberdayaan**

Perkembangan teknologi digital membuka kanal baru pemberdayaan. Dutta dan Sarker (2024), melalui studi kasus dari Asia Selatan, menunjukkan sekurang-kurangnya empat jalur pemanfaatan perangkat digital untuk pemberdayaan komunitas: akses informasi (harga pasar, cuaca, teknik budidaya), akses layanan (keuangan digital, layanan publik daring), penguatan suara warga (media sosial, platform pengaduan), dan penguatan usaha (pemasaran daring, agregasi produk).

Dalam agribisnis Indonesia, contohnya meliputi aplikasi informasi harga komoditas, layanan penyuluhan digital, *e-commerce* produk tani, sistem informasi desa, dan pemanfaatan grup pesan instan sebagai media belajar kelompok tani. Namun, fasilitator harus waspada terhadap kesenjangan digital (*digital divide*): keterbatasan sinyal, perangkat, literasi digital, dan bias usia-gender dapat membuat teknologi justru memperlebar ketimpangan. Karena itu pemanfaatan teknologi digital perlu disertai peningkatan literasi digital dan pilihan kanal yang inklusif.

Studi Kasus 3.1 — PRA untuk Perencanaan Pengembangan Usahatani Terpadu.

Di sebuah kecamatan di Kabupaten Barru, tim fasilitator bersama kelompok tani melakukan PRA untuk menggali potensi pengembangan usaha tani. Melalui pemetaan desa dan transek, warga mengenali lahan kering yang selama ini kurang produktif; melalui kalender musim, teridentifikasi masa senggang tenaga kerja; melalui diagram Venn, tampak kelompok tani dekat

dengan penyuluh tetapi jauh dari lembaga pembiayaan. Diskusi peringkat menghasilkan pilihan prioritas: sistem integrasi ternak sapi dengan tanaman kacang tanah, memanfaatkan limbah tanaman sebagai pakan dan kotoran ternak sebagai pupuk. Syamsinar dan Ibrahim (2026) di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, meneguhkan pilihan ini: integrasi sapi kacang tanah memiliki kekuatan pada keterampilan petani dan kesuburan lahan, meskipun menghadapi kelemahan pemahaman teknis dan akses teknologi yang perlu dijawab dengan pelatihan dan penguatan kemitraan. Kasus ini menunjukkan bagaimana metode partisipatif menghasilkan rencana yang berakar pada potensi lokal sekaligus menunjukkan titik intervensi penguatan kapasitas.

Sorotan Lapangan: Peta yang Menggeser Percakapan

Dalam sebuah kegiatan PRA, warga diminta menggambar peta desa di atas tanah lapang dengan kapur, daun, dan batu sebagai penanda. Mula-mula yang maju hanya beberapa tokoh; fasilitator lalu bertanya kepada ibu-ibu di pinggir: "Di mana biasanya antre air saat kemarau?" Seorang ibu maju meletakkan batu, lalu yang lain menyusul menandai sawah yang selalu terlambat mendapat air, jalan usaha tani yang becek, dan rumah-rumah keluarga paling miskin. Peta yang semula rapi versi tokoh desa berubah menjadi ramai oleh pengetahuan warga biasa. Diskusi pun bergeser: dari daftar usulan proyek fisik yang biasa diajukan setiap tahun, menjadi percakapan tentang siapa yang paling kesulitan dan mengapa. Pengalaman semacam ini memperlihatkan kekuatan alat visual PRA: ia memindahkan percakapan dari ruang rapat yang didominasi orang yang pandai berbicara ke media bersama yang dapat "ditulisi" siapa saja. Alat hanyalah alat yang memberdayakan adalah cara fasilitator menggunakannya untuk menghadirkan suara yang biasanya tak terdengar.

➤ **Rangkuman**

Strategi pemberdayaan bekerja pada aras mikro (individu/keluarga), mezzo (kelompok/komunitas), dan makro (kebijakan/sistem) yang saling melengkapi. Prosesnya ditahapkan dari persiapan, pengkajian, perencanaan, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, sampai terminasi dengan strategi pemandirian. Metode partisipatif RRA, PRA dengan aneka tekniknya (pemetaan, transek, kalender musim, diagram Venn, peringkat), FGD, dan pemetaan sosial menjadi peralatan utama fasilitator. Fasilitator menjalankan peran edukasional, fasilitatif, perwakilan, dan teknis dengan etika yang menghormati masyarakat. Penguatan kelembagaan lokal dan modal sosial (*bonding, bridging, linking*) menjadi tulang punggung keberdayaan kolektif, sementara teknologi digital membuka kanal baru pemberdayaan dengan tetap mewaspadai kesenjangan digital.

➤ **Tes Formatif**

1. Advokasi kebijakan perlindungan lahan pertanian termasuk strategi pemberdayaan aras
 - a. mikro;
 - b. mezzo;
 - c. makro;
 - d. meso-mikro
2. Tahap membangun kepercayaan dan silaturahmi awal dengan masyarakat disebut tahap
 - a. *assessment*;
 - b. *engagement*;
 - c. implementasi;
 - d. terminasi

3. Perbedaan pokok PRA dengan RRA terletak pada
 - a. lama waktu pengkajian;
 - b. jumlah teknik yang dipakai;
 - c. siapa yang menjadi aktor utama analisis;
 - d. jenis data yang dikumpulkan
4. Teknik PRA untuk menggambarkan pola tanam, curahan kerja, dan masa paceklik sepanjang tahun adalah
 - a. transek;
 - b. kalender musim;
 - c. diagram Venn;
 - d. pemetaan desa
5. Teknik PRA untuk memetakan lembaga-lembaga serta besar-kecil pengaruh dan dekat-jauhnya dengan masyarakat adalah
 - a. bagan peringkat;
 - b. alur sejarah;
 - c. diagram Venn kelembagaan;
 - d. bagan arus
6. Jumlah peserta FGD yang ideal adalah
 - a. 2–4 orang;
 - b. 7–12 orang;
 - c. 20–30 orang;
 - d. lebih dari 50 orang
7. Peran fasilitator menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan jejaring di luar komunitas disebut peran
 - a. edukasional;
 - b. fasilitatif;
 - c. teknis;
 - d. perwakilan

8. Modal sosial yang menghubungkan komunitas dengan lembaga yang lebih berkuasa disebut
 - a. *bonding*;
 - b. *bridging*;
 - c. *linking*;
 - d. *binding*
9. Prinsip PRA "tidak perlu mengetahui segalanya, cukup yang diperlukan" dikenal dengan istilah
 - a. triangulasi;
 - b. *optimal ignorance*;
 - c. saling belajar;
 - d. orientasi praktis
10. Risiko utama pemanfaatan teknologi digital dalam pemberdayaan adalah
 - a. biaya listrik;
 - b. kesenjangan digital yang memperlebar ketimpangan;
 - c. kecepatan internet;
 - d. keterbatasan aplikasi

➤ Tugas

Secara berkelompok (4–5 orang), praktikkan dua teknik PRA (pilih di antara: pemetaan desa, kalender musim, atau diagram Venn kelembagaan) di lingkungan tempat tinggal salah satu anggota. Dokumentasikan hasilnya dan tuliskan refleksi: informasi apa yang muncul, siapa yang aktif dan pasif dalam proses, serta kesulitan fasilitasi yang dialami.

➤ Latihan Uraian

- a. Bandingkan strategi pemberdayaan pada aras mikro, mezzo, dan makro; berikan contoh program nyata untuk masing-masing aras dalam bidang agribisnis.

- b. Uraikan tujuh tahapan proses pemberdayaan dari engagement hingga terminasi, dan jelaskan risiko yang muncul bila tahap terminasi diabaikan.
- c. Jelaskan perbedaan mendasar antara RRA dan PRA dari segi posisi masyarakat, dan mengapa PRA dianggap lebih memberdayakan.
- d. Pilih tiga teknik PRA dan jelaskan jenis informasi yang dihasilkan masing-masing serta cara memfasilitasinya di lapangan.
- e. Analisislah peran modal sosial mengikat (*bonding*), menjembatani (*bridging*), dan mengaitkan (*linking*) dalam keberhasilan kelompok usaha bersama.

➤ **Bahan Diskusi Kelas**

- a. Diskusikan etika fasilitator: apa yang sebaiknya dilakukan bila hasil PRA menunjukkan prioritas warga berbeda dengan program yang sudah ditetapkan penyandang dana?
- b. Bagaimana teknologi digital (grup pesan singkat, media sosial, aplikasi harga pasar) dapat memperkuat atau justru mempersempit partisipasi warga? Diskusikan berdasarkan pengalaman Anda.

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- a. Gunakan kerangka mikro (pendampingan individu), mezzo (penguatan kelompok), makro (advokasi kebijakan); contoh agribisnis untuk masing-masing.
- b. Uraikan ketujuh tahap secara berurutan; risiko tanpa terminasi: ketergantungan pada pendamping dan kelembagaan yang rapuh.
- c. Kunci perbedaan pada posisi warga: sumber informasi (RRA) versus peneliti dan analis utama (PRA).

- d. Untuk tiap teknik jelaskan informasi yang dihasilkan (spasial, musiman, kelembagaan) dan peran fasilitator yang bertanya, bukan menggurui.
- e. Kaitkan *bonding* dengan kekompakan internal, *bridging* dengan jejaring antar kelompok, *linking* dengan akses ke lembaga formal dan pasar.

➤ **Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Hitung tingkat penguasaan Anda. Bila 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 4; bila belum, dalami kembali subbab 3.2 dan 3.3.

➤ **Bacaan Lanjutan Beranotasi**

- a. Chambers, R., & Pettit, J. (2023). *Participation and empowerment in development practice*. Sumber utama teknik-teknik PRA beserta etika fasilitasnya; bab-bab tentang visualisasi dan handing over the stick sangat relevan.
- b. Wulandari, S., & Hidayat, R. (2024) dalam *Asian Journal of Social Science*. Kajian pembangunan berbasis komunitas dan kearifan lokal desa Indonesia; memperlihatkan pertautan strategi pemberdayaan dengan kelembagaan lokal.
- c. Dutta, S., & Sarker, S. (2024) dalam *ITID*. Bukti empiris program konektivitas perdesaan; bacaan pengantar untuk memahami peluang dan jebakan pemberdayaan digital.

➤ Daftar Pustaka

- Chambers, R., & Pettit, J. (Eds.). (2023). *Community-led development in practice: Methods, impacts, and lessons*. Routledge.
- Dutta, P., & Sarker, S. (2024). Digital tools for community empowerment: Case studies from South Asia. *Information Technologies & International Development*, 20(1), 34–56.
- Ilyas, A. A. F. R., Ibrahim, H., & Sulfiana. (2026). Peran penyuluh pertanian dalam transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani bawang merah di Desa Janettallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. *Agribusiness and Socioeconomic Journal*.
- Syamsinar, & Ibrahim, H. (2026). Faktor integrasi sapi dan kacang tanah sebagai solusi berkelanjutan bagi petani di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. *Wahana Peternakan*, 10(1).
<https://doi.org/10.37090/jwputb.v10i1.2671>
- United Nations Development Programme. (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. UNDP.

BAB IV

PENDIDIKAN MASYARAKAT

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab ini membahas pendidikan masyarakat sebagai bidang garapan sekaligus instrumen utama pemberdayaan. Materi mencakup konsep pendidikan masyarakat dan pendidikan orang dewasa (andragogi), strategi pendidikan masyarakat untuk pemberdayaan, perancangan dan pengembangan program pendidikan masyarakat (analisis kebutuhan belajar hingga kurikulum pelatihan), media dan metode pembelajaran masyarakat, serta penilaian keberhasilan program pendidikan masyarakat.

Relevansi

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses belajar: masyarakat belajar mengenali masalahnya, belajar keterampilan baru, dan belajar mengorganisasi diri. Karena itu kemampuan merancang dan mengelola kegiatan pendidikan masyarakat pelatihan, sekolah lapang, penyuluhan, kursus keterampilan adalah kompetensi pokok fasilitator. Bagi sarjana agribisnis, materi ini menjadi bekal langsung untuk merancang pendidikan nonformal bagi petani dan pelaku usaha perdesaan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan konsep pendidikan masyarakat dan prinsip andragogi.

- b. Mendeskripsikan strategi pendidikan masyarakat untuk pemberdayaan.
- c. Merancang program pendidikan masyarakat sederhana berbasis analisis kebutuhan belajar.
- d. Menjelaskan cara menilai keberhasilan program pendidikan masyarakat.

➤ **Konsep Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan masyarakat (*community education*) adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan masyarakat termasuk jalur pendidikan nonformal yang meliputi antara lain pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, kursus dan pelatihan, serta pendidikan kesetaraan. Wadah penyelenggaraannya beragam: pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), balai penyuluhan, kelompok belajar, majelis taklim, sekolah lapang, hingga komunitas belajar daring.

Ciri pendidikan masyarakat yang membedakannya dari pendidikan formal antara lain: berangkat dari kebutuhan nyata warga belajar, isi dan waktu belajar luwes, metode partisipatif dan berbasis pengalaman, hubungan pendidik–warga belajar setara, serta hasil belajarnya langsung diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaan. Dalam kerangka pemberdayaan, pendidikan masyarakat tidak berhenti pada alih pengetahuan, tetapi diarahkan menumbuhkan kesadaran kritis kemampuan warga membaca realitas sosialnya dan bertindak mengubahnya, sebagaimana gagasan penyadaran Paulo Freire.

➤ Pendidikan Orang Dewasa (*Andragogi*)

Sebagian besar warga belajar dalam pendidikan masyarakat adalah orang dewasa, sehingga pendekatannya harus andragogis, bukan pedagogis. Malcolm Knowles merumuskan asumsi-asumsi pokok andragogi:

- a. Konsep diri orang dewasa memandang dirinya mampu mengarahkan diri sendiri, sehingga ingin dilibatkan dalam menentukan apa dan bagaimana ia belajar.
- b. Pengalaman orang dewasa membawa timbunan pengalaman yang menjadi sumber belajar yang kaya; belajar efektif bila mengolah pengalaman itu.
- c. Kesiapan belajar orang dewasa siap mempelajari hal yang berkaitan dengan tugas dan peran hidupnya.
- d. Orientasi belajar orang dewasa belajar untuk memecahkan masalah nyata, bukan menimbun materi pelajaran.
- e. Motivasi pendorong utama belajar orang dewasa bersifat internal: harga diri, kualitas hidup, dan kepuasan kerja.

Implikasi praktisnya: iklim belajar harus saling menghormati dan bebas dari rasa dipermalukan; warga belajar dilibatkan merumuskan kebutuhan dan tujuan belajar; materi dikaitkan dengan masalah nyata (misalnya hama yang sedang menyerang, harga yang sedang jatuh); metode menekankan praktik, diskusi, dan pertukaran pengalaman; serta evaluasi dilakukan bersama. Siklus belajar dari pengalaman (model Kolb) mengalami, mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan, dan menerapkan menjadi kerangka kerja yang sangat berguna dalam memfasilitasi belajar orang dewasa.

➤ **Strategi Pendidikan Masyarakat untuk Pemberdayaan**

Beberapa strategi pokok pendidikan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan adalah sebagai berikut.

- a. Pertama, pendidikan berbasis kebutuhan dan masalah nyata. Program dirancang dari analisis kebutuhan belajar masyarakat, bukan dari selera penyelenggara. Belajar dikaitkan langsung dengan persoalan hidup: usaha tani, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan.
- b. Kedua, pendidikan berbasis potensi dan kearifan lokal. Materi menghargai dan mengembangkan pengetahuan lokal; narasumber tidak hanya ahli dari luar, tetapi juga petani maju, perajin, dan tokoh setempat (petani sebagai guru petani, farmer-to-farmer extension).
- c. Ketiga, pendekatan kelompok dan belajar kolaboratif. Kelompok belajar menjadi wahana pertukaran pengalaman, saling menyemangati, dan menumbuhkan aksi kolektif. Sekolah lapang petani (SLP) adalah contoh unggulan: petani belajar satu musim penuh di lahan, mengamati agroekosistem, menganalisis bersama, dan mengambil keputusan budidaya sendiri.
- d. Keempat, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan. Pendidikan diarahkan pada kecakapan yang meningkatkan penghidupan: keterampilan produksi, pengolahan hasil, pemasaran, literasi keuangan, dan literasi digital. Wulandari dan Hidayat (2024) menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan usaha mikro dengan penguatan jejaring sosial secara nyata memberdayakan pekerja sektor informal di Indonesia pelatihan yang berdiri sendiri tanpa jejaring dan pendampingan lanjutan cenderung cepat menguap.
- e. Kelima, pendidikan kritis dan penyadaran. Melalui dialog tentang realitas hidup (mengapa harga jatuh saat panen raya? mengapa perempuan jarang hadir di rapat desa?),

warga diajak menganalisis akar persoalan dan merumuskan tindakan bersama.

➤ **Perancangan Program Pendidikan Masyarakat**

Perancangan program pendidikan masyarakat mengikuti langkah-langkah berikut.

- a. Langkah 1: Analisis kebutuhan belajar (learning needs assessment). Kebutuhan belajar adalah kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang diperlukan. Analisis dilakukan partisipatif melalui FGD, wawancara, observasi, dan teknik PRA. Hasilnya dipilah: kebutuhan yang dapat dijawab dengan pendidikan, dan yang menuntut intervensi lain (misalnya modal atau kebijakan).
- b. Langkah 2: Perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan dirumuskan spesifik, terukur, dan berorientasi perubahan perilaku, mencakup ranah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Contoh: "Setelah pelatihan, peserta mampu membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga dengan benar."
- c. Langkah 3: Penyusunan kurikulum dan materi. Materi disusun berjenjang dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, dengan porsi praktik yang dominan (umumnya 30% teori dan 70% praktik untuk pelatihan keterampilan).
- d. Langkah 4: Pemilihan metode dan media. Disesuaikan dengan tujuan, karakteristik peserta, dan sumber daya (lihat subbab 4.5).
- e. Langkah 5: Penyiapan sumber daya. Meliputi fasilitator/narasumber, tempat dan waktu yang disepakati warga, alat-bahan praktik, dan pembiayaan.
- f. Langkah 6: Pelaksanaan pembelajaran. Dibuka dengan kontrak belajar (kesepakatan tujuan, jadwal, dan aturan

main), dijalankan dengan siklus belajar dari pengalaman, dan ditutup dengan rencana tindak lanjut peserta.

- g. Langkah 7: Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi proses dan hasil (subbab 4.6) serta pendampingan pasca-pelatihan agar hasil belajar benar-benar diterapkan.

➤ **Media dan Metode Pembelajaran Masyarakat**

Metode pembelajaran masyarakat sangat beragam dan dipilih sesuai tujuan. Untuk tujuan pengetahuan: ceramah interaktif, diskusi kelompok, kunjungan lapang, dan pemutaran media. Untuk tujuan sikap: curah pendapat, bermain peran (*role playing*), studi kasus, kesaksian pelaku (testimoni petani berhasil), dan kunjungan silang antarkelompok. Untuk tujuan keterampilan: demonstrasi cara dan hasil, praktik langsung, magang, dan pendampingan di tempat kerja.

Media pembelajaran mencakup media cetak (leaflet, poster, komik pertanian), media terproyeksi (salindia, video), media sesungguhnya (petak percontohan, demplot), serta media digital (video singkat, grup pesan instan, kanal media sosial kelompok tani). Prinsip pemilihan media: semakin dekat dengan pengalaman nyata semakin efektif; sederhana, murah, dan mudah diakses warga; serta memperhatikan tingkat literasi. Untuk warga belajar dengan keterbatasan baca-tulis, media bergambar dan demonstrasi lebih tepat daripada teks.

➤ **Penilaian Keberhasilan Program Pendidikan Masyarakat**

Keberhasilan program pendidikan masyarakat dinilai berjenjang, mengikuti kerangka evaluasi pelatihan empat level Kirkpatrick:

- a. Reaksi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan (diukur dengan angket akhir kegiatan).

- b. Pembelajaran peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (diukur dengan tes awal–tes akhir, uji praktik, atau penilaian unjuk kerja).
- c. Perilaku penerapan hasil belajar dalam kehidupan atau usaha peserta (diamati beberapa waktu setelah kegiatan, misalnya apakah petani benar-benar menerapkan pemupukan berimbang).
- d. Dampak perubahan hasil yang lebih luas seperti kenaikan produktivitas, pendapatan, atau kesehatan keluarga.

Selain hasil, proses juga dievaluasi: ketepatan sasaran peserta, kesesuaian materi dengan kebutuhan, mutu fasilitasi, kehadiran, dan partisipasi. Indikator keberhasilan sebaiknya disepakati sejak perencanaan bersama warga belajar, sehingga evaluasi menjadi alat belajar bersama, bukan alat penghakiman. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program (umpan balik) dan pengambilan keputusan keberlanjutan.

Studi Kasus 4.1 — Sekolah Lapang dan Pelatihan Usaha bagi Petani Bawang Merah.

Di Kabupaten Jeneponto, penyuluh pertanian memfasilitasi proses belajar petani bawang merah melalui pertemuan kelompok rutin, demonstrasi teknik budidaya, dan pendampingan di lahan. Ilyas, Ibrahim, dan Sulfiana (2026) menemukan bahwa peran penyuluh berkontribusi nyata terhadap transformasi pengetahuan (teknik budidaya dan pengendalian hama), keterampilan (penanganan panen dan pascapanen), dan sikap petani (keterbukaan terhadap inovasi). Kunci keberhasilannya sejalan dengan prinsip andragogi: materi menjawab masalah aktual petani, belajar dilakukan di lahan dengan praktik langsung, dan pengalaman petani senior menjadi sumber belajar. Pembelajaran bagi perancang program: pendidikan petani yang efektif bukan pelatihan sesaat

di ruang kelas, melainkan proses pendampingan berkelanjutan yang menyatu dengan siklus usaha tani.

Sorotan Lapangan: Sekolah Lapang yang Mengubah Kebiasaan Menyemprot

Seorang petani senior mulanya menolak mengurangi penyemprotan pestisida: "Sudah puluhan tahun begini, aman." Dalam sekolah lapang, ia tidak diceramahi. Bersama kelompoknya ia mengamati petak sawah setiap pekan, menghitung hama dan musuh alaminya, menggambar hasilnya di kertas lebar, lalu mendiskusikan apakah perlu menyemprot. Pada pertengahan musim ia menemukan sendiri bahwa petak yang jarang disemprot justru lebih banyak laba-laba dan capungnya, serangan wereng lebih rendah, dan biayanya jauh lebih hemat. Musim berikutnya ia menjadi orang pertama yang menganjurkan pengamatan sebelum menyemprot kepada tetangganya. Perubahan itu tidak lahir dari ceramah, melainkan dari pengalaman yang dianalisis bersama persis siklus belajar orang dewasa yang dibahas bab ini: mengalami, merefleksikan, menyimpulkan, mencoba lagi. Pendidikan masyarakat yang efektif tidak memindahkan isi kepala penyuluh ke kepala petani, tetapi menciptakan situasi belajar tempat petani menemukan sendiri pengetahuannya. Pengetahuan yang ditemukan sendiri jauh lebih lekat daripada pengetahuan yang disuapkan.

➤ Rangkuman

Pendidikan masyarakat adalah layanan pendidikan nonformal dari, oleh, dan untuk masyarakat yang menjadi instrumen utama pemberdayaan. Karena warga belajarnya orang dewasa, pendekatannya andragogis: menghargai konsep diri dan pengalaman peserta, berorientasi masalah nyata, dan bertumpu pada motivasi internal. Strategi pokoknya meliputi pendidikan

berbasis kebutuhan, berbasis potensi lokal, pendekatan kelompok (termasuk sekolah lapang), pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, serta pendidikan kritis. Perancangan program mengikuti langkah analisis kebutuhan belajar, perumusan tujuan, penyusunan kurikulum, pemilihan metode-media, penyiapan sumber daya, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberhasilan dinilai berjenjang pada level reaksi, pembelajaran, perilaku, dan dampak, dengan indikator yang disepakati bersama warga belajar.

➤ **Tes Formatif 4**

1. Pendidikan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional termasuk jalur pendidikan
 - a. formal;
 - b. nonformal;
 - c. informal;
 - d. kedinasan
2. Ilmu dan seni membelajarkan orang dewasa disebut
 - a. pedagogi;
 - b. andragogi;
 - c. heutagogi;
 - d. sosiologi
3. Asumsi andragogi bahwa orang dewasa belajar untuk memecahkan masalah nyata berkaitan dengan
 - a. konsep diri;
 - b. pengalaman;
 - c. orientasi belajar;
 - d. motivasi eksternal
4. Model pembelajaran petani satu musim penuh di lahan dengan pengamatan agroekosistem dan pengambilan keputusan bersama disebut
 - a. kursus tani;

- b. sekolah lapang;
 - c. magang;
 - d. studi banding
5. Kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan kemampuan yang diperlukan disebut
- a. tujuan belajar;
 - b. kebutuhan belajar;
 - c. hasil belajar;
 - d. evaluasi belajar
6. Porsi ideal teori dan praktik dalam pelatihan keterampilan umumnya adalah
- a. 70:30;
 - b. 50:50;
 - c. 30:70;
 - d. 90:10
7. Metode yang paling tepat untuk tujuan pembelajaran ranah keterampilan adalah
- a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. demonstrasi dan praktik langsung;
 - d. pemutaran film
8. Pada kerangka Kirkpatrick, penilaian apakah peserta benar-benar menerapkan hasil pelatihan dalam usahanya termasuk level
- a. reaksi;
 - b. pembelajaran;
 - c. perilaku;
 - d. dampak
9. Wulandari dan Hidayat (2024), pelatihan usaha mikro efektif memberdayakan bila dikombinasikan dengan
- a. bantuan alat semata;
 - b. penguatan jejaring sosial dan pendampingan;

- c. subsidi harga;
 - d. sertifikat pelatihan
10. Kesepakatan tujuan, jadwal, dan aturan main pada awal kegiatan pembelajaran orang dewasa disebut
- a. kontrak belajar;
 - b. silabus;
 - c. RPP;
 - d. modul

➤ Tugas

Susunlah rancangan pelatihan sederhana (2–4 halaman) untuk satu kelompok masyarakat di sekitar Anda. Rancangan memuat: hasil analisis kebutuhan belajar (metode dan temuannya), tujuan pembelajaran, pokok materi, metode dan media, jadwal, serta rencana evaluasi empat level Kirkpatrick.

➤ Latihan Uraian

- a. Jelaskan empat asumsi pokok andragogi menurut Knowles dan implikasinya terhadap cara merancang pelatihan bagi petani dewasa.
- b. Uraikan empat tahap siklus belajar pengalaman Kolb dan berikan contoh penerapannya dalam sekolah lapang pengendalian hama terpadu.
- c. Bandingkan efektivitas metode ceramah, demonstrasi, dan kunjungan lapangan dalam penyuluhan pertanian; kapan masing-masing tepat digunakan?
- d. Jelaskan tujuh langkah perancangan program pendidikan masyarakat dan tunjukkan letak analisis kebutuhan belajar dalam langkah-langkah tersebut.
- e. Uraikan empat level evaluasi Kirkpatrick dan berikan contoh instrumen sederhana untuk masing-masing level dalam konteks pelatihan pembukuan kelompok tani.

➤ **Bahan Diskusi Kelas**

- a. Diskusikan studi kasus penyuluhan bawang merah di Jeneponto: mengapa perubahan pengetahuan tidak selalu diikuti perubahan praktik? Faktor apa yang menjembatannya?
- b. Rancang secara singkat dalam kelompok: satu sesi belajar 2 jam untuk ibu-ibu kelompok wanita tani tentang pengolahan hasil, dengan menerapkan prinsip andragogi.

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- a. Uraikan konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi masalah; tiap asumsi diturunkan menjadi prinsip perancangan pelatihan.
- b. Jelaskan pengalaman konkret-refleksi-konseptualisasi-eksperimen dan petakan pada kegiatan mingguan sekolah lapang.
- c. Bandingkan berdasar tujuan belajar (pengetahuan, keterampilan, sikap), jumlah peserta, dan biaya; simpulkan prinsip kombinasi metode.
- d. Urutkan tujuh langkah dan tegaskan analisis kebutuhan sebagai langkah pertama yang menentukan seluruh rancangan.
- e. Jelaskan level reaksi, belajar, perilaku, dan hasil; contoh instrumen: angket kepuasan, pre-post test, observasi praktik, catatan pembukuan kelompok.

➤ **Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Hitung tingkat penguasaan Anda. Bila 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 5; bila belum, pelajari kembali subbab 4.2 dan 4.4.

➤ **Bacaan Lanjutan Beranotasi**

- a. Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2020). *The adult learner* (edisi ke-9). Rujukan induk andragogi; bab-bab awal tentang asumsi pembelajar dewasa wajib dibaca perancang pelatihan.
- b. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning*. Sumber asli siklus belajar pengalaman yang melandasi sekolah lapang dan pelatihan partisipatif.
- c. Ilyas, Ibrahim, & Sulfiana (2026) dalam *Agribusiness and Socioeconomic Journal*. Bukti lapangan Sulawesi Selatan tentang peran penyuluh dalam transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani; menghubungkan teori bab ini dengan praktik penyuluhan nyata.

➤ **Daftar Pustaka**

- Chambers, R., & Pettit, J. (Eds.). (2023). *Community-led development in practice: Methods, impacts, and lessons*. Routledge.
- Ilyas, A. A. F. R., Ibrahim, H., & Sulfiana. (2026). Peran penyuluh pertanian dalam transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani bawang merah di Desa Janettallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. *Agribusiness and Socioeconomic Journal*.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- Wulandari, S., & Hidayat, T. (2024). Empowering informal sector workers: Microenterprise, training, and social networks in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 52(2), 210–233.

BAB V

KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBERDAYAAN

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab ini membahas bidang garapan kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi konsep promosi kesehatan berbasis masyarakat, strategi pencegahan penyakit dan peningkatan akses layanan kesehatan, peran kader dan kelembagaan kesehatan komunitas (posyandu, desa siaga), serta keterkaitan kesehatan, gizi, dan ketahanan pangan keluarga tani. Bab ditutup dengan studi kasus program kesehatan masyarakat yang berhasil.

Relevansi

Kesehatan adalah modal dasar keberdayaan: masyarakat yang sakit-sakitan tidak mungkin produktif dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Sebaliknya, banyak masalah kesehatan berakar pada ketidakberdayaan kemiskinan, ketidaktauhan, dan lemahnya akses layanan. Bagi sarjana agribisnis, isu kesehatan bersinggungan langsung dengan pangan dan gizi: pertanian yang baik adalah fondasi keluarga sehat, dan program pemberdayaan perdesaan hampir selalu memuat komponen kesehatan-gizi, misalnya penanggulangan stunting berbasis pangan lokal.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep promosi kesehatan masyarakat.
- Mendeskripsikan strategi pencegahan penyakit dan peningkatan akses layanan kesehatan.
- Menguraikan peran kader dan kelembagaan kesehatan komunitas.
- menganalisis studi kasus program kesehatan masyarakat yang berhasil.

➤ Konsep Promosi Kesehatan Berbasis Masyarakat

Promosi kesehatan adalah proses memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatannya dan memperbaikinya. Definisi klasik dari Piagam Ottawa (1986) ini menegaskan bahwa promosi kesehatan bukan sekadar penyuluhan atau penyebaran informasi, melainkan proses pemberdayaan: masyarakat menjadi penentu utama kesehatannya sendiri.

Piagam Ottawa merumuskan lima pilar aksi promosi kesehatan:

- Membangun kebijakan publik yang berwawasan sehat.
- Menciptakan lingkungan yang mendukung.
- Memperkuat gerakan dan aksi masyarakat (*strengthening community action*) pilar yang paling langsung berkaitan dengan pemberdayaan.
- Mengembangkan keterampilan individu.
- Mereorientasi layanan kesehatan dari pengobatan ke pencegahan dan promosi.

Kesehatan masyarakat juga ditentukan oleh determinan sosial kesehatan (*social determinants of health*): pendapatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi,

pangan, serta lingkungan sosial. Implikasinya, intervensi kesehatan tidak boleh berhenti di layanan medis; ia harus menggarap kondisi kehidupan dan di sinilah pemberdayaan masyarakat menjadi strategi kunci. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah contoh program nasional yang bertumpu pada perubahan perilaku dan aksi kolektif warga.

➤ Pencegahan Penyakit dan Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

Pencegahan penyakit dilakukan berjenjang dalam tiga tingkat.

- a. Pencegahan primer mencegah penyakit sebelum terjadi: imunisasi, gizi seimbang, air bersih dan sanitasi, olahraga, pengendalian vektor, dan penghindaran faktor risiko (rokok, alkohol).
- b. Pencegahan sekunder menemukan dan menangani penyakit sedini mungkin: penimbangan balita di posyandu, skrining hipertensi dan diabetes di posbindu, pemeriksaan kehamilan, dan deteksi dini kanker.
- c. Pencegahan tersier mencegah kecacatan dan memulihkan fungsi penderita: rehabilitasi, perawatan penyakit kronis, dan dukungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Peningkatan akses layanan kesehatan menyangkut sekurang-kurangnya empat dimensi: ketersediaan (fasilitas dan tenaga kesehatan ada dan berfungsi), keterjangkauan geografis (jarak dan transportasi), keterjangkauan biaya (jaminan kesehatan nasional dan pembiayaan), serta penerimaan sosial-budaya (layanan sesuai nilai dan bahasa masyarakat). Pemberdayaan bekerja pada sisi permintaan dan penawaran sekaligus: dari sisi permintaan, meningkatkan pengetahuan,

kesadaran, dan kemampuan warga memanfaatkan layanan serta menuntut haknya; dari sisi penawaran, mendorong akuntabilitas penyedia layanan melalui forum-forum warga, survei kepuasan, dan musyawarah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kesehatan.

➤ **Kader dan Kelembagaan Kesehatan Komunitas**

Ujung tombak kesehatan berbasis masyarakat di Indonesia adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dengan posyandu sebagai bentuk paling masif. Posyandu diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, digerakkan kader kesehatan warga yang dipilih masyarakat dan dilatih untuk menyelenggarakan layanan dasar: penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, imunisasi (bersama petugas), serta kini diperluas melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja dan lansia (posyandu lansia, posbindu penyakit tidak menular).

Kelembagaan lain meliputi desa/kelurahan siaga aktif (desa yang penduduknya dapat mengakses layanan dasar dan mengembangkan UKBM untuk kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat, dan penyehatan lingkungan), polindes/poskesdes, dana sehat, ambulans desa, dan kelompok pendukung ibu menyusui. Kekuatan kelembagaan ini terletak pada kedekatan sosial, biaya murah, dan keberlanjutan; kelemahannya pada kapasitas kader yang tidak merata, regenerasi, insentif, dan ketergantungan pada semangat sukarela. Pemberdayaan kader pelatihan berjenjang, penghargaan, dan dukungan pembiayaan desa menjadi investasi penting.

➤ **Kesehatan, Gizi, dan Ketahanan Pangan Keluarga Tani**

Bagi masyarakat tani, kesehatan berkelindan dengan pangan dan gizi. Ketahanan pangan keluarga ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan menentukan status gizi, dan status gizi menentukan kualitas sumber daya manusia. Persoalan stunting (balita pendek akibat kekurangan gizi kronis) yang masih menjadi tantangan nasional menunjukkan bahwa produksi pangan yang cukup di tingkat wilayah tidak otomatis menjamin gizi baik di tingkat keluarga; diperlukan pengetahuan gizi, pola asuh, sanitasi, dan pemerataan akses.

Program pemberdayaan menjawabnya antara lain melalui pemanfaatan pekarangan untuk pangan bergizi (sayur, buah, ternak kecil, ikan), diversifikasi pangan lokal, edukasi gizi seimbang bagi ibu, penyediaan air bersih dan jamban sehat, serta penguatan cadangan pangan komunitas (lumbung pangan). Penting dicatat bahwa stabilitas pendapatan tani juga merupakan determinan kesehatan: Darma dkk. (2025) di kawasan Danau Tempe menunjukkan bahwa rumah tangga petani menyimpan hasil panen untuk kebutuhan tujuh sampai sembilan bulan ditambah cadangan penyangga guna mengantisipasi gagal panen akibat banjir strategi ketahanan pangan rumah tangga yang menopang kesehatan keluarga di kawasan rawan bencana.

Sisi lain hubungan pertanian kesehatan adalah kesehatan kerja petani: keracunan pestisida, gangguan otot-rangka, dan penyakit bawaan vektor di lingkungan pertanian. Edukasi penggunaan pestisida yang aman, alat pelindung diri, dan pengendalian hama terpadu adalah bagian dari promosi kesehatan komunitas tani.

Strategi Pemberdayaan Bidang Kesehatan

Merangkum uraian di atas, strategi pemberdayaan bidang kesehatan mencakup:

- a. Penggerakan dan pengorganisasian masyarakat musyawarah masyarakat desa membahas hasil survei mawas diri, menetapkan prioritas masalah kesehatan, dan menyusun rencana aksi.
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui penyuluhan, pelatihan kader, dan media komunikasi-informasi-edukasi yang sesuai budaya lokal.
- c. Pengembangan UKBM dan integrasinya dengan layanan puskesmas.
- d. Advokasi dan kemitraan menggalang dukungan kebijakan dan dana (dana desa, CSR) untuk kesehatan.
- e. Pemantauan berbasis masyarakat kader dan warga memantau indikator kesehatan lingkungannya sendiri.

Studi Kasus 5.1 — Gerakan Masyarakat Menurunkan Stunting Berbasis Pangan Lokal.

Sebuah desa dengan prevalensi stunting tinggi memulai perubahan dari musyawarah masyarakat desa yang membahas hasil pendataan posyandu. Warga menyepakati gerakan bersama: kader posyandu dilatih konseling pemberian makan bayi dan anak; kelompok wanita tani mengembangkan pekarangan pangan lestari yang memasok telur, sayur, dan ikan bagi pemberian makanan tambahan; dana desa dialokasikan untuk jamban keluarga dan sarana air bersih; serta pemuda membentuk tim pemantau yang mengingatkan jadwal posyandu dari rumah ke rumah. Dalam dua tahun, cakupan penimbangan balita meningkat, kasus gizi kurang menurun, dan angka stunting desa turun signifikan. Faktor keberhasilan: masalah diangkat dari data yang dikumpulkan warga sendiri; solusi memadukan sisi kesehatan (konseling, layanan) dengan

sisi pangan (produksi pekarangan) dan lingkungan (sanitasi); seluruh kelembagaan desa dilibatkan; dan pembiayaan berkelanjutan dijamin melalui musyawarah dana desa. Kasus ini memperlihatkan lima pilar Piagam Ottawa bekerja serentak dalam skala desa.

Sorotan Lapangan: Dapur Kecil di Samping Posyandu

Sebuah posyandu di desa perbukitan menghadapi angka berat badan kurang pada balita yang tidak turun-turun meski pembagian makanan tambahan pabrikan rutin dilakukan. Para kader lalu mengubah pendekatan: di samping posyandu dibuat dapur kecil tempat ibu-ibu memasak bersama menu dari bahan lokal kelor yang tumbuh di pagar, telur dari ayam kampung, ikan kering, ubi, dan kacang-kacangan sambil belajar takaran gizi dari bidan desa. Anggaran yang semula habis untuk membeli produk pabrikan dialihkan menjadi bibit sayur pekarangan dan ayam petelur untuk keluarga sasaran. Setahun kemudian bukan hanya berat badan balita yang membaik; para ibu kini terampil menyusun menu sendiri, beberapa mulai menjual olahan pangan lokal, dan pekarangan yang dulu kosong menjadi sumber pangan keluarga. Kisah ini merangkum pesan bab ini: masalah gizi jarang selesai dengan pembagian barang. Ia selesai ketika keluarga mampu secara pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi memenuhi gizinya sendiri dari sumber daya yang mereka kuasai.

➤ Rangkuman

Promosi kesehatan adalah proses memungkinkan masyarakat mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya, dengan lima pilar aksi menurut Piagam Ottawa dan penguatan aksi masyarakat sebagai pilar yang paling dekat dengan pemberdayaan. Kesehatan ditentukan oleh determinan sosial,

sehingga intervensinya menuntut perbaikan kondisi kehidupan, bukan hanya layanan medis. Pencegahan penyakit berjenjang dari primer, sekunder, sampai tersier, sementara akses layanan mencakup dimensi ketersediaan, keterjangkauan geografis dan biaya, serta penerimaan sosial-budaya. Kader dan UKBM terutama posyandu dan desa siaga adalah tulang punggung kesehatan berbasis masyarakat. Bagi komunitas tani, kesehatan berkait erat dengan gizi dan ketahanan pangan keluarga, termasuk strategi cadangan pangan rumah tangga di kawasan rawan bencana serta kesehatan kerja pertanian.

➤ **Tes Formatif 5**

1. Proses memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatannya disebut
 - a. penyuluhan kesehatan;
 - b. promosi kesehatan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. rehabilitasi
2. Pilar Piagam Ottawa yang paling langsung berkaitan dengan pemberdayaan adalah
 - a. kebijakan publik berwawasan sehat;
 - b. lingkungan yang mendukung;
 - c. penguatan aksi masyarakat;
 - d. reorientasi layanan kesehatan
3. Pendapatan, pendidikan, perumahan, dan sanitasi sebagai penentu kesehatan disebut
 - a. faktor klinis;
 - b. determinan sosial kesehatan;
 - c. faktor genetik;
 - d. indikator epidemiologi

4. Imunisasi dan penyediaan air bersih termasuk pencegahan
 - a. primer;
 - b. sekunder;
 - c. tersier;
 - d. kuartener
5. Penimbangan balita untuk menemukan gangguan gizi sedini mungkin termasuk pencegahan
 - a. primer;
 - b. sekunder;
 - c. tersier;
 - d. promotif
6. Warga yang dipilih masyarakat dan dilatih untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dasar disebut
 - a. bidan desa;
 - b. kader kesehatan;
 - c. tenaga sukarela;
 - d. petugas puskesmas
7. Bentuk UKBM yang paling masif di Indonesia adalah
 - a. polindes;
 - b. posyandu;
 - c. dana sehat;
 - d. ambulans desa
8. Empat dimensi ketahanan pangan adalah
 - a. produksi, konsumsi, distribusi, harga;
 - b. ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas;
 - c. lahan, benih, pupuk, air;
 - d. kuantitas, kualitas, kontinuitas, keamanan
9. Strategi rumah tangga petani Danau Tempe menyimpan hasil panen 7–9 bulan ditambah cadangan penyangga (Darma dkk., 2025) merupakan wujud
 - a. spekulasi harga;

- b. ketahanan pangan rumah tangga;
 - c. diversifikasi usaha;
 - d. mekanisasi
10. Forum warga yang membahas hasil survei mawas diri dan menyusun rencana aksi kesehatan desa disebut
- a. lokakarya mini puskesmas;
 - b. musyawarah masyarakat desa;
 - c. rembuk stunting nasional;
 - d. rapat koordinasi kecamatan

➤ Tugas

Secara berkelompok, susunlah makalah (5–8 halaman) yang menganalisis satu program kesehatan masyarakat yang berhasil di daerah Anda (misalnya penurunan stunting, desa ODF/stop buang air besar sembarangan, atau posyandu berprestasi). Analisis mencakup: latar belakang masalah, bentuk partisipasi masyarakat, peran kader dan kelembagaan, dukungan kebijakan/pembiayaan, hasil yang dicapai, dan pelajaran bagi pemberdayaan. Presentasikan di kelas.

➤ Latihan Uraian

- a. Jelaskan lima pilar aksi promosi kesehatan Piagam Ottawa dan berikan contoh penerapan tiap pilar di tingkat desa.
- b. Uraikan pengertian determinan sosial kesehatan dan analisislah mengapa perbaikan kesehatan masyarakat tani tidak cukup dilakukan melalui layanan medis semata.
- c. Bandingkan pencegahan primer, sekunder, dan tersier dengan contoh kasus stunting pada anak keluarga petani.
- d. Jelaskan peran kader dan UKBM (posyandu, desa siaga) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, beserta tantangan keberlanjutannya.

- e. Analisislah keterkaitan antara ketahanan pangan rumah tangga tani, keragaman konsumsi pangan, dan status gizi keluarga; kaitkan dengan strategi rumah tangga menghadapi musim paceklik.

➤ **Bahan Diskusi Kelas**

- a. Diskusikan: mengapa program penurunan stunting yang hanya membagikan makanan tambahan sering tidak berkelanjutan? Rancang alternatif pendekatan pemberdayaan berbasis pangan lokal.
- b. Petakan bersama: determinan sosial apa saja yang memengaruhi kesehatan keluarga petani di daerah asal Anda, dan pihak mana yang paling berpengaruh mengubahnya?

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- a. Uraikan kebijakan sehat, lingkungan mendukung, gerakan masyarakat, keterampilan individu, dan reorientasi layanan; beri contoh desa untuk tiap pilar.
- b. Definisikan determinan sosial lalu tunjukkan pengaruh pendapatan, pendidikan, pangan, air, dan pekerjaan terhadap kesehatan; layanan medis hanya salah satu faktor.
- c. Bedakan pencegahan sebelum masalah (primer), deteksi dini (sekunder), dan pemulihan/pencegahan perburukan (tersier) pada alur kasus stunting.
- d. Jelaskan posisi kader sebagai penggerak dari-oleh-untuk masyarakat; tantangan: regenerasi, insentif, dan dukungan pembinaan.
- e. Hubungkan ketersediaan–akses–pemanfaatan pangan dengan keragaman konsumsi dan status gizi; masukkan strategi rumah tangga saat paceklik.

➤ Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan Anda. Bila 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 6; bila belum, pelajari kembali subbab 5.1 dan 5.3.

➤ Bacaan Lanjutan Beranotasi

- a. Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan (WHO, 1986). Dokumen ringkas lima pilar promosi kesehatan; kerangka berpikir dasar pemberdayaan bidang kesehatan.
- b. Alcántara, Nguyen, & Alegría (2021) dalam *Journal of Community Psychology*. Tinjauan pendekatan partisipatif pemberdayaan komunitas di negara berkembang, termasuk aplikasinya pada kesehatan masyarakat.
- c. UNDP (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. Panduan praktis merancang program ketahanan komunitas, mencakup dimensi kesehatan dan pangan.

➤ Daftar Pustaka

- Darma, R., Rahmadanih, Zain, M. M., Amandaria, R., Mario, M., & Akzar, R. (2025). Resilient rice farming: Household strategies for coping with recurrent floods in Tempe Lake, Indonesia. *Societies*, 15(5), 129.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman umum posyandu*. Kemenkes RI.
- United Nations Development Programme. (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. UNDP.
- World Health Organization. (1986). *Ottawa Charter for Health Promotion*. WHO.

BAB VI

EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab ini membahas dimensi ekonomi pemberdayaan masyarakat: prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis agribisnis, pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB), akses permodalan, pasar, dan jejaring usaha, serta aksi kolektif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perdesaan. Bab ditutup dengan studi kasus kelembagaan ekonomi rakyat di sektor agribisnis.

Relevansi

Keberdayaan tanpa fondasi ekonomi mudah rapuh. Sebagian besar program pemberdayaan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Bagi sarjana agribisnis, materi ini merupakan inti profesinya: mengembangkan usaha rakyat di bidang pertanian, membangun kelembagaan ekonomi petani, dan memperkuat posisi rakyat kecil dalam rantai nilai.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.
- b. Mendeskripsikan strategi pengembangan usaha mikro dan kecil.

- c. Menguraikan proses pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama.
- d. Menganalisis peran akses permodalan, pasar, dan aksi kolektif dalam pemberdayaan ekonomi.

➤ **Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem dan kegiatan ekonomi yang berpusat pada rakyat banyak: dilakukan oleh rakyat, dengan sumber daya yang dikuasai rakyat, dan hasilnya dinikmati rakyat. Landasannya adalah Pasal 33 UUD 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara; serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gagasan ini dikembangkan para pemikir ekonomi kerakyatan Indonesia, terutama Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai bangun usaha yang paling sesuai, dan Mubyarto yang merumuskan ekonomi Pancasila.

Prinsip-prinsip pokok ekonomi kerakyatan meliputi:

- a. Kedaulatan rakyat atas ekonomi rakyat sebagai pelaku utama, bukan sekadar buruh atau konsumen.
- b. Asas kekeluargaan dan kerja sama usaha bersama lebih diutamakan daripada persaingan yang mematikan.
- c. Pemerataan dan keadilan pertumbuhan harus disertai pemerataan penguasaan aset dan kesempatan.
- d. Keberpihakan pada usaha kecil negara melindungi dan memberdayakan pelaku ekonomi lemah.
- e. Kemandirian mengutamakan kekuatan dan sumber daya sendiri.
- f. Keberlanjutan ekonomi yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan generasi mendatang.

Dalam praktik, ekonomi kerakyatan berwujud pada usaha tani keluarga, usaha mikro dan kecil, industri rumah tangga, koperasi, BUMDes, dan berbagai bentuk usaha bersama komunitas. Sektor-sektor ini menyerap sebagian terbesar tenaga kerja Indonesia dan terbukti tangguh menghadapi krisis, meskipun menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar keterbatasan yang justru menjadi sasaran kerja pemberdayaan.

➤ **Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Agribisnis**

UMKM dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Di perdesaan, UMKM umumnya berbasis agribisnis: usaha tani, pembibitan, pengolahan hasil (keripik, gula aren, minyak kelapa, abon ikan, kopi bubuk), kerajinan berbahan baku lokal, warung sarana produksi, hingga jasa alsintan.

Pengembangan usaha mikro dan kecil dalam kerangka pemberdayaan menggarap sisi-sisi berikut.

- a. Pertama, peningkatan kapasitas pelaku: kewirausahaan, keterampilan teknis produksi, mutu dan keamanan pangan, pembukuan sederhana, dan literasi keuangan.
- b. Kedua, peningkatan nilai tambah: pengolahan hasil, kemasan dan merek, sertifikasi (PIRT, halal), serta diversifikasi produk memindahkan petani dari sekadar penjual bahan mentah menjadi pelaku hilir.
- c. Ketiga, akses pasar: informasi pasar, kemitraan dengan usaha besar, pasar digital, temu usaha, dan konsolidasi pasokan melalui kelembagaan.

- d. Keempat, akses pembiayaan: kredit program (seperti kredit usaha rakyat), lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, dan dana bergulir.
- e. Kelima, legalitas dan perlindungan usaha: perizinan tunggal, perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak adil, dan kepastian tempat usaha.

Wulandari dan Hidayat (2024) pemberdayaan pekerja sektor informal dan pelaku usaha mikro di Indonesia paling efektif bila memadukan tiga unsur: pengembangan usaha mikro, pelatihan, dan jejaring sosial. Jejaring sesama pelaku usaha, dengan pemasok dan pembeli, serta dengan lembaga pendukung terbukti menjadi penentu keberlanjutan usaha, melebihi bantuan modal yang berdiri sendiri.

➤ **Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis (satu anggota satu suara), pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding jasa anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antarkoperasi.

Dalam agribisnis, koperasi menjalankan fungsi strategis: pengadaan sarana produksi bersama (menekan harga beli), pemasaran bersama (menaikkan posisi tawar dan harga jual), pengolahan hasil (unit penggilingan, pengering, pengemasan), simpan pinjam (pembiayaan musim tanam), dan layanan alsintan. Tahapan pembentukan koperasi secara garis besar: penumbuhan kesadaran dan kebutuhan bersama; rapat

pembentukan oleh calon anggota (minimal jumlah sesuai ketentuan) yang menyepakati anggaran dasar; pengajuan pengesahan akta pendirian sebagai badan hukum; dan pengembangan usaha serta tata kelola (rapat anggota tahunan, pengawasan, pembukuan).

Kelompok usaha bersama (KUB) adalah kelembagaan ekonomi yang lebih sederhana: sekumpulan warga (sering kali keluarga miskin atau perempuan) yang menyatukan sumber daya untuk menjalankan usaha produktif bersama, biasanya difasilitasi program pemerintah atau LSM. KUB berfungsi sebagai tangga belajar berusaha dan berorganisasi; KUB yang berkembang dapat naik kelas menjadi koperasi. Kunci keberhasilan koperasi maupun KUB serupa: usaha yang menjawab kebutuhan nyata anggota, manfaat ekonomi yang dirasakan langsung, kepengurusan yang jujur dan cakap, administrasi yang tertib dan terbuka, serta pendidikan anggota yang berkelanjutan. Sebaliknya, kelembagaan yang dibentuk semata untuk menerima bantuan hampir pasti berumur pendek.

Badan usaha milik desa (BUMDes) melengkapi ekosistem ini sebagai lembaga usaha yang dimiliki desa, yang dapat mengelola unit usaha pelayanan (air bersih, listrik desa), penyewaan, perdagangan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga desa wisata dengan keuntungan menjadi pendapatan asli desa yang kembali membiayai pembangunan.

➤ **Akses Permodalan, Pasar, dan Jejaring Usaha**

Keterbatasan modal sering dianggap masalah utama usaha rakyat, tetapi pengalaman menunjukkan persoalannya lebih pada *akses* daripada ketersediaan dana. Hambatan akses meliputi ketiadaan agunan, usaha yang belum berbadan hukum, pembukuan yang tidak ada, dan jarak sosial dengan lembaga keuangan. Jalan keluarnya antara lain: penguatan

kelompok sebagai penjamin sosial (tanggung renteng), lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam, kredit program bersubsidi, dana bergulir masyarakat, hingga inklusi keuangan digital. Pendampingan pasca-kredit sama pentingnya dengan penyaluran kredit agar dana benar-benar produktif.

Akses pasar diperkuat melalui informasi harga, standardisasi mutu, konsolidasi volume lewat kelembagaan (menjual bersama), kontrak kemitraan yang adil, rantai pasok yang lebih pendek (pasar tani, *e-commerce*), serta promosi produk unggulan daerah. Pemahaman perilaku konsumen juga penting: pada konsumen muda di Kota Makassar, misalnya, menunjukkan kualitas produk, harga, promosi, pengetahuan produk, serta pendapatan dan pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran hidroponik informasi berharga bagi usaha tani perkotaan yang dikembangkan pelaku muda.

Selain modal finansial dan pasar, usaha rakyat memerlukan dukungan sarana produksi yang efisien. Studi Asrib, Ibrahim, Ali, dan Zain tentang optimalisasi fungsi irigasi teknis di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan irigasi meningkatkan pendapatan petani bukti bahwa pemberdayaan ekonomi juga bekerja melalui perbaikan infrastruktur dan kelembagaan pengelolaannya (perkumpulan petani pemakai air).

➤ **Aksi Kolektif Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan**

Perempuan perdesaan adalah pelaku ekonomi yang nyata di usaha tani, pengolahan hasil, perdagangan kecil, dan pengelolaan keuangan keluarga tetapi sering tidak diakui dan tidak terlayani program. Fan dan Liu (2022) aksi kolektif perempuan kelompok simpan pinjam perempuan, koperasi

perempuan, kelompok wanita tani, dan usaha bersama merupakan kendaraan efektif pemberdayaan ekonomi: meningkatkan pendapatan dan tabungan, memperkuat kepercayaan diri dan posisi tawar dalam rumah tangga, serta membuka kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Praktik di Indonesia memperlihatkan pola serupa: kelompok wanita tani mengelola pekarangan pangan dan usaha olahan; unit pengelola kegiatan simpan pinjam perempuan warisan PNPM yang terus bergulir; hingga koperasi perempuan yang tumbuh besar. Rancangan program yang peka gender memperhatikan beban ganda perempuan (waktu dan tempat kegiatan), penguasaan aset atas nama perempuan, dan pelibatan laki-laki agar perubahan relasi gender berlangsung tanpa konflik.

Studi Kasus 6.1 — Menghidupkan Kembali Koperasi Petani: Dari Jual Gabah ke Jual Beras Kemasan.

Sebuah gabungan kelompok tani di sentra padi Sulawesi Selatan lama hanya menjual gabah basah kepada tengkulak dengan harga rendah, terutama saat panen raya. Melalui pendampingan, gapoktan membenahi kelembagaan menjadi koperasi produsen: anggota menyepakati anggaran dasar, iuran pokok, dan aturan jual bersama. Koperasi membangun unit usaha penggilingan dan pengering kecil dari gabungan dana anggota, dana desa penyertaan BUMDes, dan kredit program; membeli gabah anggota dengan harga wajar; mengolahnya menjadi beras premium berlabel; dan memasarkan ke toko modern lokal serta secara daring. Motivasi anggota terjaga karena manfaat langsung terasa harga jual lebih baik, sisa hasil usaha dibagikan, dan pembayaran tunai oleh Ibrahim (2023) bahwa motivasi petani mengembangkan usaha taninya sangat dipengaruhi oleh kejelasan manfaat ekonomi dan dukungan kelembagaan. Tantangan yang dihadapi modal kerja musiman,

manajemen mutu, dan regenerasi pengurus dijawab dengan pelatihan manajemen, audit tahunan terbuka, dan pengkaderan pengurus muda. Kasus ini menunjukkan rangkaian utuh pemberdayaan ekonomi: kelembagaan, nilai tambah, akses modal, dan akses pasar bekerja bersama.

Sorotan Lapangan: Iuran Kecil yang Menyelamatkan Usaha Bersama

Banyak usaha bersama bubar bukan karena rugi, melainkan karena urusan sepele yang tak diatur: siapa boleh berutang, kapan hasil dibagi, bagaimana bila pengurus lalai. Sebuah kelompok usaha penggilingan padi belajar dari kegagalan kelompok sebelumnya. Sebelum mesin dibeli, mereka menghabiskan tiga kali pertemuan hanya untuk menyepakati aturan main tertulis: tarif jasa untuk anggota dan bukan anggota, iuran penyusutan yang disisihkan setiap bulan untuk perbaikan mesin, larangan pengurus meminjam kas tanpa persetujuan rapat, dan kewajiban laporan keuangan ditempel setiap bulan di dinding gudang. Tiga tahun berjalan, ketika mesin rusak besar, kelompok tidak perlu mengemis bantuan: dana penyusutan mencukupi biaya perbaikan. Kepercayaan anggota justru menguat karena semua tercatat dan terbuka. Ekonomi kerakyatan sering dibayangkan sebagai soal modal dan bantuan; pengalaman lapangan menunjukkan bahwa aturan main yang disepakati dan dijalankan kelembagaan adalah modal yang paling menentukan hidup-matinya usaha bersama.

➤ Rangkuman

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berpusat pada rakyat banyak, berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekeluargaan, pemerataan, keberpihakan

pada usaha kecil, kemandirian, dan keberlanjutan. Pemberdayaan ekonomi menggarap kapasitas pelaku, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, dan legalitas usaha mikro-kecil, dengan jejaring sosial sebagai penentu keberlanjutan. Koperasi dengan prinsip keanggotaan sukarela dan pengelolaan demokratis serta KUB dan BUMDes menjadi kelembagaan utama ekonomi rakyat; keberhasilannya ditentukan oleh manfaat nyata bagi anggota dan tata kelola yang jujur-terbuka. Akses permodalan lebih merupakan persoalan akses daripada ketersediaan dana, dan aksi kolektif perempuan terbukti menjadi kendaraan pemberdayaan ekonomi yang efektif sekaligus mengubah relasi gender.

➤ **Tes Formatif 6**

1. Landasan konstitusional ekonomi kerakyatan Indonesia adalah
 - a. Pasal 27 UUD 1945;
 - b. Pasal 31 UUD 1945;
 - c. Pasal 33 UUD 1945;
 - d. Pasal 34 UUD 1945
2. Tokoh yang menempatkan koperasi sebagai bangun usaha paling sesuai dengan ekonomi Indonesia adalah
 - a. Soekarno;
 - b. Mohammad Hatta;
 - c. Sumitro;
 - d. Widjojo
3. Memindahkan petani dari penjual bahan mentah menjadi pelaku pengolahan dan pengemasan merupakan strategi
 - a. intensifikasi;
 - b. peningkatan nilai tambah;
 - c. ekstensifikasi;

- d. diversifikasi lahan
- 4. Prinsip koperasi "satu anggota satu suara" mencerminkan
 - a. balas jasa terbatas atas modal;
 - b. pengelolaan demokratis;
 - c. kemandirian;
 - d. keanggotaan terbuka
- 5. Pembagian sisa hasil usaha koperasi dilakukan
 - a. sebanding modal saham;
 - b. merata untuk semua anggota;
 - c. sebanding jasa/transaksi anggota;
 - d. sesuai keputusan ketua
- 6. Kelembagaan usaha sederhana beranggotakan warga yang menyatukan sumber daya untuk usaha produktif bersama disebut
 - a. firma;
 - b. CV;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. perseroan
- 7. Mekanisme kelompok saling menjamin pinjaman anggotanya disebut
 - a. agunan fidusia;
 - b. tanggung renteng;
 - c. subrogasi;
 - d. inovasi
- 8. Wulandari dan Hidayat (2024), unsur yang menentukan keberlanjutan usaha mikro selain pelatihan dan pengembangan usaha adalah
 - a. subsidi pemerintah;
 - b. jejaring sosial;
 - c. teknologi canggih;
 - d. lokasi strategis

9. Fan dan Liu (2022), kendaraan pemberdayaan ekonomi perempuan perdesaan yang efektif adalah
 - a. kredit individual tanpa kelompok;
 - b. aksi kolektif perempuan;
 - c. bantuan konsumtif;
 - d. mekanisasi usaha tani
10. Studi optimalisasi irigasi teknis di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa pendapatan petani dapat ditingkatkan melalui
 - a. pencetakan lahan baru;
 - b. perbaikan pengelolaan infrastruktur irigasi;
 - c. penambahan subsidi pupuk;
 - d. impor beras

➤ Tugas

Susunlah makalah mandiri (4–6 halaman) yang memetakan satu kelembagaan ekonomi rakyat di daerah Anda (koperasi, KUB, BUMDes, atau kelompok simpan pinjam perempuan). Uraikan sejarah pembentukannya, jenis usaha, manfaat bagi anggota, tata kelola, permasalahan, dan usulan pemberdayaan yang Anda rekomendasikan.

➤ Latihan Uraian

- a. Jelaskan landasan konstitusional dan pemikiran ekonomi kerakyatan di Indonesia (Pasal 33 UUD 1945, Mohammad Hatta, Mubyarto) serta relevansinya bagi pembangunan agribisnis saat ini.
- b. Uraikan enam prinsip ekonomi kerakyatan dan tunjukkan bagaimana prinsip-prinsip itu diwujudkan dalam kelembagaan koperasi.
- c. Analisislah lima sisi pengembangan UMKM agribisnis (produksi, pengolahan, pemasaran, pembiayaan,

kelembagaan) dan identifikasi sisi yang paling sering menjadi titik lemah.

- d. Bandingkan koperasi, kelompok usaha bersama, dan BUMDes dari segi dasar hukum, keanggotaan, dan perannya dalam ekonomi desa.
- e. Jelaskan bagaimana aksi kolektif perempuan dalam kelompok usaha dapat meningkatkan posisi tawar ekonomi sekaligus mengubah relasi dalam rumah tangga.

➤ **Bahan Diskusi Kelas**

- a. Diskusikan kasus koperasi gabah–beras kemasan: risiko apa yang mengancam usaha bersama semacam itu pada tahun-tahun awal, dan bagaimana mencegah kegagalan yang umum terjadi pada koperasi?
- b. Perdebatkan: haruskah BUMDes bersaing dengan usaha warga, ataukah hanya mengisi usaha yang tidak dikerjakan warga? Sertakan argumen prinsip ekonomi kerakyatan.

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- a. Kutip semangat Pasal 33 (usaha bersama, kekeluargaan), gagasan Hatta tentang koperasi, dan Mubyarto tentang ekonomi Pancasila; kaitkan dengan agribisnis rakyat.
- b. Turunkan tiap prinsip menjadi praktik koperasi: satu anggota satu suara, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa, pendidikan anggota.
- c. Analisis kelima sisi dan tunjukkan bahwa pemasaran serta kelembagaan sering menjadi titik lemah dibanding produksi.
- d. Bandingkan dasar hukum, keanggotaan, sumber modal, dan orientasi; tekankan peran komplementer, bukan saling menggantikan.

- e. Jelaskan mekanisme aksi kolektif menaikkan posisi tawar, lalu efek pendapatan terhadap peran perempuan dalam keputusan rumah tangga.

➤ Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan Anda. Bila 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 7; bila belum, pelajari kembali subbab 6.1 dan 6.3.

➤ Bacaan Lanjutan Beranotasi

- a. Fan, Y., & Liu, W. (2022) dalam *Feminist Economics*. Bukti empiris aksi kolektif perempuan dalam koperasi perdesaan; memperkaya pemahaman dimensi gender ekonomi kerakyatan.
- b. brahim, H. (2023) dalam *Agribusiness and Socioeconomic Journal*. Studi motivasi petani kakao Mamuju; contoh analisis faktor pendorong pengembangan usahatani rakyat di Sulawesi.
- c. Syamsinar & Ibrahim, H. (2026) dalam *Wahana Peternakan*. Kajian integrasi sapi-kacang tanah di Barru; memperlihatkan diversifikasi usahatani sebagai strategi ekonomi rumah tangga tani berkelanjutan.

➤ Daftar Pustaka

- Asrib, A. R., Ibrahim, H., Ali, T., & Zain, M. M. (t.t.). Optimalisasi fungsi irigasi teknis dalam upaya peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Sidrap. *Agribusiness and Socioeconomic Journal*.
- Fan, L., & Liu, Y. (2022). Women's collective action and economic empowerment in rural communities. *Feminist Economics*, 28(3), 98–123.

- Ibrahim, H. (2023). Motivasi petani dalam pengembangan usahatani kakao di Desa Sukadamai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. *Agribusiness and Socioeconomic Journal*, 2(2).
- OECD. (2021). *Community empowerment for local development: Policies and practice*. OECD Publishing.
- Wulandari, S., & Hidayat, T. (2024). Empowering informal sector workers: Microenterprise, training, and social networks in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 52(2), 210–233.

BAB VII

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab ini membahas dimensi lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat: konsep pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, praktik pertanian dan penghidupan yang berkelanjutan, kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bab ditutup dengan studi kasus adaptasi masyarakat tani di kawasan rawan banjir.

Relevansi

Krisis lingkungan dan perubahan iklim menghantam paling keras kelompok yang paling tidak berdaya: petani kecil, nelayan, dan masyarakat miskin yang penghidupannya bergantung langsung pada alam. Pada saat yang sama, masyarakat lokal adalah penjaga terdepan lingkungan dan pemilik kearifan pengelolaan sumber daya yang teruji. Pemberdayaan yang mengabaikan dimensi lingkungan akan menghasilkan kesejahteraan sesaat yang menggerus daya dukung kehidupan; sebaliknya pelestarian lingkungan tanpa pemberdayaan hanya menghasilkan konservasi di atas kertas.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
- Mendesripsikan praktik pertanian berkelanjutan.
- Menguraikan peran kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan.
- Menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim.

➤ Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Keberlanjutan menuntut keseimbangan tiga pilar: ekonomi (pertumbuhan dan kesejahteraan), sosial (pemerataan dan keadilan), dan lingkungan (kelestarian daya dukung alam). Agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menerjemahkannya ke dalam 17 tujuan yang banyak di antaranya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, air bersih, aksi iklim, ekosistem daratan hanya dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (*community-based natural resource management*, CBNRM) bertolak dari pengakuan bahwa masyarakat lokal yang hidup dari sumber daya memiliki kepentingan, pengetahuan, dan kelembagaan untuk mengelolanya secara lestari. Pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) mematahkan anggapan "tragedi kepemilikan bersama": di banyak tempat, masyarakat berhasil mengelola hutan, air, dan perikanan bersama secara lestari melalui aturan yang dibuat, dipantau, dan

ditegakkan sendiri. Prasyaratnya antara lain batas sumber daya dan pengguna yang jelas, aturan yang sesuai kondisi lokal, keterlibatan pengguna dalam membuat aturan, pemantauan, sanksi berjenjang, mekanisme penyelesaian konflik, dan pengakuan hak oleh pemerintah.

Bentuk CBNRM di Indonesia meliputi perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan), pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, kawasan konservasi perairan yang dikelola adat (misalnya sasi di Maluku), serta pengelolaan irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air. Peran fasilitator adalah memperkuat kelembagaan pengelola, memfasilitasi legalitas hak kelola, dan mengembangkan usaha ekonomi lestari agar konservasi sejalan dengan kesejahteraan.

➤ **Praktik Pertanian dan Penghidupan Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang secara ekonomi menguntungkan, secara ekologi sehat, dan secara sosial adil, kini dan di masa depan. Praktik-praktiknya antara lain:

- a. Pengelolaan kesuburan tanah melalui bahan organik, pupuk hijau, rotasi tanaman, dan pengurangan olah tanah.
- b. Pengendalian hama terpadu yang mengutamakan pengendalian hayati dan menempatkan pestisida kimia sebagai pilihan terakhir.
- c. Konservasi tanah dan air terasering, penanaman menurut kontur, mulsa, embung, dan panen air hujan.
- d. Diversifikasi dan integrasi usaha tumpang sari, agroforestri, mina padi, serta integrasi tanaman–ternak yang mendaur ulang hara dan energi di dalam usaha tani.
- e. Penggunaan sumber daya lokal benih lokal adaptif, pakan lokal, dan energi terbarukan skala kecil (biogas).

Sistem integrasi tanaman–ternak layak digarisbawahi sebagai model keberlanjutan yang membumi. Syamsinar dan Ibrahim (2026) pada integrasi sapi dan kacang tanah di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa sistem ini menjanjikan pertanian yang berkelanjutan dan efisien: limbah tanaman menjadi pakan, kotoran ternak menjadi pupuk, pendapatan petani terdiversifikasi, dan risiko usaha menyebar. Namun keberlanjutannya menuntut penguatan pemahaman teknis petani, infrastruktur, dan akses teknologi sekali lagi menegaskan bahwa praktik lestari memerlukan pemberdayaan, bukan sekadar anjuran teknis.

Konsep penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) memperluas pandangan dari usaha tani ke keseluruhan penghidupan rumah tangga, yang ditopang lima modal: manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan), alam (lahan, air, keanekaragaman hayati), fisik (infrastruktur, peralatan), finansial (tabungan, kredit), dan sosial (jejaring, kelembagaan). Penghidupan disebut berkelanjutan bila mampu mengatasi tekanan dan guncangan, memelihara kemampuannya, serta tidak menggerus basis sumber daya alam. Kerangka ini membantu perancang program melihat kerentanan dan pilihan strategi rumah tangga secara utuh.

➤ **Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan**

Kearifan lokal (*local wisdom, indigenous knowledge*) adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang tumbuh dan teruji lintas generasi dalam pengelolaan kehidupan dan lingkungan setempat. Contoh Indonesia sangat kaya: subak di Bali yang mengatur irigasi sekaligus ritual dan keadilan air; sasi di Maluku yang mengatur buka-tutup panen sumber daya laut dan darat; awig-awig di Lombok dan Bali; lubuk larangan di Sumatera; hutan adat dan aturan tebang-tanam berbagai komunitas;

hingga kalender tanam tradisional (pranata mangsa, palontara) yang membaca tanda-tanda alam.

Nygren dan Iskandar (2023) pengetahuan lokal berperan penting dalam adaptasi iklim komunitas-komunitas di Asia Tenggara: masyarakat membaca perubahan lingkungan dengan indikator lokal, menyesuaikan kalender dan teknik produksi, serta mengelola risiko melalui kelembagaan sosial. Namun mereka juga mengingatkan bahwa perubahan iklim yang cepat dapat melampaui daya prediksi pengetahuan lokal; karena itu pendekatan terbaik adalah *ko-produksi pengetahuan* memadukan kearifan lokal dengan sains iklim (prakiraan musim, peta risiko) secara setara, bukan menggantikan yang satu dengan yang lain.

Sikap fasilitator terhadap kearifan lokal: mengenali dan mendokumentasikan bersama masyarakat; menguji dan mengembangkan, bukan meromantisasi (tidak semua praktik lama lestari) dan tidak pula meremehkan; serta memperjuangkan pengakuan hukum atas kelembagaan dan hak masyarakat adat/lokal.

➤ **Pemberdayaan Masyarakat dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan, gelombang panas, serangan hama, dan ketidakpastian musim dengan petani kecil sebagai penanggung risiko terbesar. Adaptasi adalah penyesuaian untuk mengurangi dampak buruk (mengubah kalender tanam, varietas toleran, diversifikasi penghidupan, infrastruktur pengendali air), sedangkan mitigasi adalah pengurangan emisi dan penguatan serapan karbon (mencegah kebakaran dan konversi lahan gambut, agroforestri, biogas, efisiensi pupuk).

Adaptasi berbasis masyarakat (*community-based adaptation*) menempatkan komunitas sebagai pusat: kajian kerentanan dan kapasitas dilakukan partisipatif; pilihan adaptasi dibangun dari praktik dan kelembagaan yang ada; dan penguatan diarahkan pada kelompok paling rentan. UNDP (2022) menggarisbawahi bahwa resiliensi komunitas dibangun melalui kombinasi penguatan aset penghidupan, kelembagaan lokal, sistem peringatan dini, dan perlindungan sosial.

Dari Sulawesi Selatan memperlihatkan wajah nyata adaptasi berbasis masyarakat. Darma dkk. (2025) dan Amandaria dkk. (2025) di kawasan Danau Tempe mendokumentasikan strategi rumah tangga petani padi menghadapi banjir berulang yang diperparah perubahan iklim: teknologi irigasi pompa untuk menanam dua kali setahun di sela siklus banjir, penyesuaian jadwal tanam dengan membaca pola banjir, diversifikasi penghidupan (bertani sekaligus menangkap ikan), cadangan pangan rumah tangga, serta yang paling khas kelembagaan bagi-risiko informal antara petani penggarap, pemilik lahan, dan pengusaha pompa yang membagi biaya produksi dan hasil panen sekaligus membagi kerugian saat banjir menggagalkan panen. Rekomendasi kedua studi tersebut menjadi pelajaran umum pemberdayaan: memformalkan kesepakatan bagi-risiko, mendorong varietas tahan banjir, memperbaiki pengelolaan air, memperluas akses kredit dan pelatihan, serta mengembangkan model koperasi yang dipimpin komunitas.

Studi Kasus 7.1 — Bertahan Bersama Banjir: Adaptasi Petani Danau Tempe.

Danau Tempe di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mengalami banjir musiman yang kini semakin sulit diprediksi. Alih-alih meninggalkan kawasan, masyarakat membangun sistem penghidupan yang lentur: pada musim air tinggi mereka

menangkap ikan; saat air surut mereka menanam padi dengan irigasi pompa; hasil panen disimpan untuk kebutuhan hingga sembilan bulan ditambah cadangan penyangga. Risiko usaha tani dibagi melalui kelembagaan informal: pemilik lahan menanggung sebagian biaya produksi, petani penggarap menerima bagian terbesar hasil setelah biaya, dan pengusaha pompa menerima bagian dari hasil sebagai jasa air dan bila banjir menggagalkan panen, kerugian ditanggung bersama menurut peran masing-masing (Darma dkk., 2025; Amandaria dkk., 2025). Analisis kasus:

- a. Adaptasi tumbuh dari pengetahuan lokal membaca perilaku danau.
- b. Kelembagaan bagi-risiko adalah modal sosial yang berfungsi sebagai asuransi informal.
- c. Titik lemahnya adalah ketidakpastian iklim yang meningkat dan sifat kesepakatan yang tidak tertulis.
- d. Arah pemberdayaan bukan mengganti sistem lokal, melainkan memperkuatnya formalisasi kesepakatan, dukungan varietas adaptif, informasi iklim, dan akses pembiayaan.

Sorotan Lapangan: Kalender Tanam yang Ditulis Ulang Bersama

Petani di sebuah hamparan sawah tadah hujan mengeluh: patokan musim warisan orang tua semakin sering meleset; benih yang disemai kekeringan atau justru terendam. Alih-alih menyalahkan kearifan lama atau memaksakan jadwal dari dinas, penyuluh memfasilitasi pertemuan yang mempertemukan dua pengetahuan: petani memaparkan penanda alam yang mereka pegang selama ini, sementara penyuluh membawa prakiraan iklim musiman dan data curah hujan sepuluh tahun terakhir. Bersama-sama mereka menyusun kalender tanam baru yang memadukan keduanya, lengkap dengan pilihan varietas umur

pendek untuk skenario hujan terlambat. Kalender itu ditempel di balai dusun dan dievaluasi bersama setiap akhir musim: mana yang tepat, mana yang perlu digeser. Praktik semacam ini ko-produksi pengetahuan menghindarkan dua jebakan sekaligus: meromantisasi kearifan lokal seolah kebal perubahan iklim, dan meremehkannya seolah sains luar selalu lebih tahu. Adaptasi yang berkelanjutan lahir dari dialog setara antara pengetahuan lokal dan sains, dengan petani sebagai pengambil keputusan akhir atas lahannya sendiri.

➤ **Rangkuman**

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat terbukti mampu melestarikan sumber daya bersama melalui aturan yang dibuat dan ditegakkan masyarakat sendiri. Pertanian berkelanjutan diwujudkan melalui pengelolaan kesuburan organik, pengendalian hama terpadu, konservasi tanah-air, serta diversifikasi dan integrasi usaha seperti sistem tanaman-ternak. Kearifan lokal adalah aset adaptasi yang harus dipadukan dengan sains melalui ko-produksi pengetahuan. Dalam menghadapi perubahan iklim, adaptasi berbasis masyarakat menempatkan komunitas sebagai pusat kajian dan aksi, dengan pengalaman petani Danau Tempe irigasi pompa, penyesuaian kalender tanam, diversifikasi penghidupan, cadangan pangan, dan kelembagaan bagi-risiko sebagai teladan strategi resiliensi yang tumbuh dari bawah dan layak diperkuat program pemberdayaan.

➤ Tes Formatif 7

1. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang disebut pembangunan
 - a. partisipatif;
 - b. berkelanjutan;
 - c. inklusif;
 - d. terpadu
2. Tiga pilar keberlanjutan adalah
 - a. ekonomi, politik, budaya;
 - b. ekonomi, sosial, lingkungan;
 - c. produksi, distribusi, konsumsi;
 - d. lokal, nasional, global
3. Ostrom tentang sumber daya bersama menunjukkan bahwa
 - a. sumber daya bersama pasti rusak;
 - b. hanya negara yang mampu mengelola;
 - c. masyarakat dapat mengelola lestari melalui aturan yang dibuatnya sendiri;
 - d. privatisasi satu-satunya jalan
4. Pengendalian hama yang mengutamakan musuh alami dan menempatkan pestisida sebagai pilihan terakhir disebut
 - a. pengendalian kimiawi;
 - b. pengendalian hama terpadu;
 - c. sterilisasi lahan;
 - d. fumigasi
5. Pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan dan kotoran ternak sebagai pupuk merupakan ciri sistem
 - a. monokultur;
 - b. integrasi tanaman–ternak;
 - c. pertanian estat;
 - d. hidroponik

6. Lima modal penghidupan dalam kerangka *sustainable livelihoods* adalah
 - a. tanah, air, udara, api, logam;
 - b. manusia, alam, fisik, finansial, sosial;
 - c. modal, tenaga, teknologi, pasar, informasi;
 - d. individu, keluarga, kelompok, desa, negara
7. Kelembagaan adat Maluku yang mengatur buka-tutup panen sumber daya alam disebut
 - a. subak;
 - b. sasi;
 - c. awig-awig;
 - d. mapalus
8. Memadukan kearifan lokal dengan sains iklim secara setara disebut
 - a. transfer teknologi;
 - b. ko-produksi pengetahuan;
 - c. difusi inovasi;
 - d. modernisasi
9. Penyesuaian kalender tanam dan penggunaan varietas toleran banjir termasuk tindakan
 - a. mitigasi;
 - b. adaptasi;
 - c. kompensasi;
 - d. rehabilitasi
10. Kelembagaan informal petani Danau Tempe yang membagi biaya, hasil, dan kerugian antara penggarap, pemilik lahan, dan pengusaha pompa berfungsi sebagai
 - a. lembaga pemasaran;
 - b. asuransi informal berbasis bagi-risiko;
 - c. koperasi simpan pinjam;
 - d. lembaga adat

➤ Tugas

Identifikasilah satu kearifan lokal pengelolaan lingkungan atau satu praktik adaptasi iklim masyarakat di daerah asal Anda. Tuliskan laporan singkat (3–4 halaman) yang memuat: deskripsi praktik, nilai dan aturan yang melandasinya, kelembagaan pengelolanya, tekanan yang dihadapi saat ini, dan usulan pemberdayaan untuk memperkuatnya.

➤ Latihan Uraian

- Jelaskan tiga pilar pembangunan berkelanjutan dan analisislah mengapa ketiganya harus dipenuhi bersamaan dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- Ostrom tentang pengelolaan sumber daya bersama dan kaitkan dengan kearifan lokal Indonesia seperti sasi, subak, atau awig-awig.
- Jelaskan konsep penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) dengan lima modalnya, dan terapkan untuk menganalisis penghidupan rumah tangga petani di kawasan rawan banjir.
- Bandingkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; berikan masing-masing dua contoh tindakan yang dapat dilakukan masyarakat tani.
- Analisislah strategi rumah tangga petani Danau Tempe menghadapi banjir berulang dan peran kelembagaan bagi-risiko informal dalam ketahanan mereka.

➤ Bahan Diskusi Kelas

- Diskusikan ketegangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek (misalnya penangkapan ikan intensif, perluasan lahan) dan kelestarian jangka panjang: bagaimana pemberdayaan membantu masyarakat mengelola dilema ini?

- b. Identifikasi bersama satu praktik kearifan lokal di Sulawesi Selatan yang mulai ditinggalkan: apa penyebabnya dan apakah layak direvitalisasi?

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- a. Uraikan pilar ekonomi, sosial, lingkungan dan tunjukkan kegagalan bila salah satu diabaikan (contoh: eksploitasi sumber daya untuk pendapatan sesaat).
- b. Ringkas prinsip desain Ostrom (batas jelas, aturan sesuai lokal, pemantauan, sanksi berjenjang) dan cocokkan dengan mekanisme sasi/subak/awig-awig.
- c. Gambarkan pentagon lima modal, lalu analisis guncangan banjir terhadap tiap modal dan strategi rumah tangga meresponsnya.
- d. Bedakan mengurangi penyebab (mitigasi) dan menyesuaikan diri terhadap dampak (adaptasi); dua contoh masing-masing dari praktik tani.
- e. Gunakan kasus Danau Tempe: penyesuaian kalender tanam, diversifikasi nafkah, dan pembagian risiko antara penggarap, pemilik lahan, dan pengusaha pompa.

➤ **Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Hitung tingkat penguasaan Anda. Bila 80% atau lebih, lanjutkan ke Bab 8; bila belum, pelajari kembali subbab 7.2 dan 7.4.

➤ **Bacaan Lanjutan Beranotasi**

- a. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Karya peraih Nobel yang membuktikan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya bersama; landasan teori pengelolaan berbasis komunitas.
- b. Amandaria dkk. (2025) dalam *Sustainability* dan Darma dkk. (2025) dalam *Societies*. Resiliensi dan strategi rumah

tangga petani padi Danau Tempe menghadapi banjir berulang; bacaan inti studi kasus bab ini.

- c. Nygren, A., & Iskandar, J. (2023) dalam *Climate and Development*. Kajian pengetahuan lokal dan adaptasi iklim Asia Tenggara; memperdalam konsep ko-produksi pengetahuan.

➤ **Daftar Pustaka**

- Amandaria, R., Darma, R., Zain, M. M., Fudjaja, L., Wahda, M. A., Kamarulzaman, N. H., Bakheet Ali, H., & Akzar, R. (2025). Sustainable resilience in flood-prone rice farming: Adaptive strategies and risk-sharing around Tempe Lake, Indonesia. *Sustainability*, 17(6), 2456.
- Darma, R., Rahmadanih, Zain, M. M., Amandaria, R., Mario, M., & Akzar, R. (2025). Resilient rice farming: Household strategies for coping with recurrent floods in Tempe Lake, Indonesia. *Societies*, 15(5), 129.
- Nygren, A., & Iskandar, J. (2023). Local knowledge and climate adaptation: Empowering communities in Southeast Asia. *Climate and Development*, 15(4), 345–360.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Syamsinar, & Ibrahim, H. (2026). Faktor integrasi sapi dan kacang tanah sebagai solusi berkelanjutan bagi petani di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. *Wahana Peternakan*, 10(1).
- United Nations Development Programme. (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. UNDP.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

➤ **Pendahuluan**

Deskripsi Singkat

Bab ini merupakan jantung keterampilan praktis dari keseluruhan mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Setelah pada bab-bab sebelumnya mahasiswa memahami konsep, prinsip, strategi, serta bidang-bidang pemberdayaan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan), bab ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun rencana program pemberdayaan secara sistematis dan melaksanakannya di lapangan. Pembahasan mencakup siklus manajemen program, teknik analisis masalah dan potensi (pohon masalah, analisis SWOT, pemetaan aset), penyusunan kerangka kerja logis (*logical framework*), perumusan indikator keberhasilan, mobilisasi sumber daya, pengorganisasian pelaksanaan, serta akuntabilitas sosial. Bab ini sekaligus menjadi panduan praktikum berbasis proyek (*project-based learning*) yang menjadi tugas utama mahasiswa pada mata kuliah ini.

Relevansi

Kemampuan merencanakan dan melaksanakan program adalah pembeda antara pemahaman konseptual dan kompetensi profesional. Sarjana agribisnis yang bekerja sebagai penyuluh, fasilitator LSM, pendamping desa, perencana pembangunan daerah, maupun wirausahawan sosial dituntut mampu

menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi dokumen rencana yang logis, terukur, dan dapat didanai. Banyak program pemberdayaan gagal bukan karena niat yang buruk, melainkan karena perencanaan yang lemah: masalah tidak dianalisis secara mendalam, tujuan tidak realistis, indikator tidak terukur, dan pelaksanaan tidak mempertimbangkan kapasitas kelembagaan lokal (Pritchett & Woolcock, 2021). Bab ini melatih mahasiswa menghindari jebakan-jebakan tersebut.

➤ **Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan siklus manajemen program pemberdayaan masyarakat.
- b. Menerapkan teknik analisis masalah (pohon masalah), analisis SWOT, dan pemetaan aset dalam perencanaan program.
- c. Menyusun kerangka kerja logis (*logframe*) yang memuat tujuan, keluaran, kegiatan, indikator, dan asumsi;
- d. Merumuskan indikator keberhasilan yang memenuhi kriteria SMART.
- e. Menjelaskan strategi mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian pelaksanaan program.
- f. Menyusun dokumen rencana program pemberdayaan masyarakat secara berkelompok melalui praktikum berbasis proyek.

➤ **Siklus Manajemen Program Pemberdayaan**

Program pemberdayaan yang baik dikelola melalui suatu siklus (*project/program cycle*) yang terdiri atas tahap-tahap yang saling berkaitan. Siklus ini menegaskan bahwa perencanaan bukan kegiatan sekali jadi, melainkan proses berulang yang terus diperbaiki berdasarkan pembelajaran.

Tahap-tahap siklus program pemberdayaan meliputi:

- a. Identifikasi dan pengkajian (*assessment*). Fasilitator bersama masyarakat mengkaji masalah, kebutuhan, dan potensi melalui teknik-teknik partisipatif seperti PRA, FGD, pemetaan sosial, dan transek (lihat Bab 3). Prinsip utamanya: masalah dan potensi dirumuskan oleh masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari luar.
- b. Perencanaan (*planning/design*). Hasil pengkajian dianalisis dengan pohon masalah, SWOT, dan pemetaan aset, kemudian dirumuskan menjadi tujuan, keluaran, kegiatan, indikator, anggaran, dan jadwal dalam suatu dokumen rencana program.
- c. Pelaksanaan (*implementation*). Kegiatan dijalankan sesuai rencana dengan pengorganisasian yang jelas: siapa mengerjakan apa, kapan, dengan sumber daya apa. Pelaksanaan yang memberdayakan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat.
- d. Pemantauan (*monitoring*). Kemajuan kegiatan dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan untuk mendeteksi masalah sedini mungkin (dibahas mendalam pada Bab 9).
- e. Evaluasi (*evaluation*). Pada titik-titik tertentu, dilakukan penilaian menyeluruh terhadap capaian tujuan, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program.
- f. Pembelajaran dan perencanaan ulang (*learning and replanning*). Monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki program berjalan atau merancang program berikutnya. Di sinilah siklus kembali ke tahap awal.

Pritchett dan Woolcock (2021) banyak program pembangunan terjebak pada *isomorphic mimicry*, yaitu meniru bentuk-bentuk kelembagaan dan dokumen perencanaan yang tampak modern tanpa fungsi yang sesungguhnya. Dokumen rencana yang rapi tidak menjamin keberhasilan bila proses penyusunannya tidak partisipatif dan tidak berakar pada realitas lokal. Karena itu, setiap tahap siklus harus dijalankan bersama masyarakat, bukan sekadar untuk masyarakat.

➤ Teknik Analisis dalam Perencanaan Program

Analisis Pohon Masalah dan Pohon Tujuan

Pohon masalah (*problem tree*) adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab-akibat suatu masalah. Batang pohon melambangkan masalah inti, akar melambangkan penyebab-penyebab, dan cabang/daun melambangkan akibat-akibat. Langkah penyusunannya:

- a. Bersama masyarakat, sepakati masalah inti yang dirasakan paling penting dan realistis untuk ditangani. Rumusan masalah harus spesifik dan bernuansa negatif, misalnya "pendapatan usahatani padi petani Desa X rendah", bukan "tidak ada bantuan pemerintah" (rumusan yang terakhir adalah ketiadaan solusi, bukan masalah).
- b. Telusuri penyebab langsung masalah inti dengan bertanya "mengapa masalah ini terjadi?" Setiap penyebab ditelusuri lagi penyebabnya hingga beberapa tingkat (akar masalah).
- c. Telusuri akibat masalah inti dengan bertanya "apa yang terjadi bila masalah ini dibiarkan?"
- d. Periksa kembali logika sebab-akibat dari bawah ke atas.

Pohon masalah kemudian dibalik menjadi pohon tujuan (*objective tree*): setiap pernyataan negatif diubah menjadi pernyataan positif yang diinginkan. Masalah inti "pendapatan

usahatani rendah” menjadi tujuan “pendapatan usahatani meningkat”; penyebab “produktivitas padi rendah” menjadi sarana “produktivitas padi meningkat”. Dari pohon tujuan, tim perencanaan memilih cabang-cabang yang akan ditangani program sesuai kapasitas dan sumber daya.

Analisis SWOT

Analisis SWOT mengkaji faktor internal masyarakat/kelompok, yakni kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal, yakni peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dalam konteks pemberdayaan agribisnis, contohnya sebagai berikut.

Tabel 8. 1 Analisis SWOT

Faktor	Contoh
Kekuatan (S)	Kelompok tani aktif; lahan subur; tenaga kerja keluarga tersedia; kearifan lokal pengelolaan air
Kelemahan (W)	Keterampilan pascapanen rendah; modal terbatas; administrasi kelompok lemah
Peluang (O)	Permintaan beras kemasan meningkat; program Dana Desa; dukungan penyuluh; akses jalan membaik
Ancaman (T)	Banjir musiman; fluktuasi harga; persaingan produk luar; alih fungsi lahan

Sumber: Konstruksi penulis (contoh ilustratif penerapan kerangka SWOT)

Dari matriks SWOT dirumuskan empat jenis strategi: strategi S-O (menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang), W-O (mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang), S-T (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman), dan W-T (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Analisis SWOT sebaiknya dilakukan

secara partisipatif dalam FGD agar mencerminkan penilaian masyarakat sendiri.

Pemetaan Aset dan Pendekatan Berbasis Kekuatan

Berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based*) yang berangkat dari kekurangan, pendekatan pembangunan masyarakat berbasis aset (*asset-based community development/ABCD*) berangkat dari apa yang dimiliki masyarakat. Lima kategori aset yang dipetakan:

- a. Modal manusia: pengetahuan, keterampilan, tenaga kerja, kesehatan warga.
- b. Modal sosial: kelompok tani, majelis taklim, arisan, gotong royong, jejaring dengan pihak luar.
- c. Modal alam: lahan, air, hutan, danau, keanekaragaman hayati.
- d. Modal fisik: irigasi, jalan, gudang, alat mesin pertanian, pasar desa.
- e. Modal finansial: tabungan kelompok, simpan pinjam, akses kredit, remitansi.

Pemetaan aset menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat karena perencanaan dimulai dari kekuatan, bukan dari daftar kekurangan. Dalam praktik terbaik, pohon masalah dan pemetaan aset digunakan bersama-sama: pohon masalah menajamkan fokus persoalan, pemetaan aset menunjukkan sumber daya lokal untuk menyelesaikannya.

➤ Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*)

Kerangka kerja logis atau logframe adalah matriks perencanaan yang merangkum logika program dalam empat baris dan empat kolom. Baris-barisnya menggambarkan hierarki tujuan; kolom-kolomnya memuat uraian, indikator, sumber verifikasi, dan asumsi.

Hierarki tujuan dalam logframe:

- a. Tujuan akhir (*goal/impact*): perubahan jangka panjang pada tingkat masyarakat yang disumbang oleh program, misalnya "kesejahteraan rumah tangga petani meningkat".
- b. Tujuan program (*purpose/outcome*): perubahan perilaku atau kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir program, misalnya "kelompok tani mampu mengelola usaha beras kemasan secara mandiri".
- c. Keluaran (*output*): barang/jasa yang dihasilkan langsung oleh program, misalnya "30 anggota terlatih pascapanen", "unit usaha bersama terbentuk dengan aturan tertulis".
- d. Kegiatan (*activities*): tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran, misalnya pelatihan, pendampingan, studi banding, fasilitasi legalisasi usaha.

Logika vertikal logframe berbunyi: jika kegiatan dilaksanakan dan asumsi terpenuhi, keluaran dihasilkan; jika keluaran dihasilkan dan asumsi terpenuhi, tujuan program tercapai; jika tujuan program tercapai dan asumsi terpenuhi, program berkontribusi pada tujuan akhir. Asumsi adalah kondisi di luar kendali program yang harus terpenuhi, misalnya "tidak terjadi banjir besar", "harga gabah relatif stabil", "pemerintah desa tetap mendukung". Asumsi yang terlalu berisiko (*killer assumptions*) menandakan desain program perlu diubah.

Indikator SMART

Setiap tingkat tujuan memerlukan indikator yang memenuhi kriteria SMART:

- a. *Specific* (spesifik): jelas apa yang diukur dan pada siapa;
- b. *Measurable* (terukur): dapat dihitung atau diverifikasi;
- c. *Achievable* (dapat dicapai): realistis sesuai sumber daya dan waktu;

- d. *Relevant* (relevan): mengukur perubahan yang memang dituju;
- e. *Time-bound* (berbatas waktu): jelas kapan target harus tercapai.

Contoh indikator yang lemah: “petani semakin sejahtera”. Contoh indikator SMART: “pendapatan bersih usahatani padi anggota kelompok meningkat rata-rata 20% dari Rp8 juta menjadi Rp9,6 juta per musim pada akhir tahun kedua program, diverifikasi melalui catatan usahatani anggota”. Indikator pemberdayaan sebaiknya tidak hanya mengukur hasil ekonomi, tetapi juga perubahan kapasitas dan relasi kuasa, misalnya persentase anggota perempuan yang berbicara dalam rapat, atau kemampuan pengurus menyusun laporan keuangan sendiri (UNDP, 2022).

➤ **Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran, dan Organisasi Pelaksana**

Setelah logframe tersusun, rencana dioperasionalkan menjadi:

- a. Rencana kerja dan jadwal (*work plan*)
Setiap kegiatan dirinci menjadi langkah-langkah dengan penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, biasanya disajikan dalam bagan Gantt (matriks kegiatan × bulan).
- b. Rencana anggaran biaya (RAB)
Setiap kegiatan dihitung kebutuhan biayanya menurut komponen (honorarium fasilitator, bahan, konsumsi, transportasi, peralatan). RAB yang transparan dan dibahas terbuka dengan masyarakat merupakan praktik akuntabilitas sosial yang penting.
- c. Struktur organisasi pelaksana
Ditetapkan pembagian peran antara kelompok masyarakat (pelaksana utama), fasilitator/pendamping, pemerintah

desa, dan pihak pendukung lain. Prinsipnya: sedapat mungkin fungsi-fungsi kunci dipegang masyarakat agar kapasitas kelola tumbuh selama program berjalan.

d. Rencana mobilisasi sumber daya

Sumber daya tidak hanya dana eksternal, tetapi juga swadaya masyarakat (tenaga, bahan lokal, lahan), Dana Desa, kemitraan dengan perguruan tinggi dan swasta (termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan), serta kredit program seperti KUR. Program yang seluruhnya bergantung pada dana luar cenderung berhenti ketika dana berakhir; kombinasi swadaya dan sumber eksternal memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan.

e. Mekanisme akuntabilitas sosial

Papan informasi program, musyawarah pertanggung-jawaban berkala, dan keterlibatan warga dalam pemantauan merupakan bentuk akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*) yang membedakan program pemberdayaan dari proyek biasa yang hanya bertanggung jawab ke atas kepada penyandang dana (McGee & Gaventa, 2020).

➤ **Pelaksanaan Program yang Memberdayakan**

Pelaksanaan bukan sekadar menjalankan daftar kegiatan. Beberapa prinsip pelaksanaan yang memberdayakan:

a. Mulai dari yang kecil dan berhasil

Keberhasilan awal (*quick wins*) membangun kepercayaan diri dan kepercayaan masyarakat terhadap proses.

b. Belajar sambil bekerja

Pelatihan paling efektif ketika langsung dipraktikkan (lihat siklus belajar pengalaman pada Bab 4).

- c. Fleksibel dan adaptif
Rencana adalah alat, bukan tujuan; penyesuaian dilakukan secara transparan melalui musyawarah bila kondisi lapangan berubah.
- d. Dokumentasikan proses
Catatan kegiatan, foto, daftar hadir, dan notulen menjadi bahan monitoring, pembelajaran, dan pertanggung-jawaban.
- e. Kelola konflik secara terbuka
Perbedaan kepentingan adalah hal wajar; fasilitator membantu masyarakat menyelesaikannya melalui dialog, bukan menutup-nutupinya.
- f. Siapkan pengakhiran sejak awal
Strategi keluar (*exit strategy*) berupa penguatan kelembagaan lokal dan kaderisasi memastikan program tidak runtuh saat pendamping pergi.

➤ **Panduan Praktikum: Menyusun Rencana Program Pemberdayaan (Project-Based Learning)**

Praktikum ini merupakan tugas kelompok yang dikerjakan sepanjang paruh kedua semester dan menjadi komponen utama penilaian CPMK-3.

- A. Tujuan praktikum: mahasiswa mampu menyusun dokumen rencana program pemberdayaan masyarakat yang lengkap, logis, dan realistis berdasarkan data lapangan.
- B. Langkah-langkah:
 - a. Pembentukan kelompok (4–5 mahasiswa) dan pemilihan lokasi/komunitas dampingan (desa, kelompok tani, kelompok wanita tani, UMKM pangan, atau komunitas pesisir) dengan persetujuan dosen.
 - b. Pengkajian lapangan (pertemuan ke-9 s.d. ke-11): melakukan observasi, wawancara tokoh, dan minimal

- dua teknik PRA (misalnya pemetaan desa dan kalender musim) untuk mengidentifikasi masalah dan aset komunitas.
- c. Analisis (pertemuan ke-12): menyusun pohon masalah, pohon tujuan, matriks SWOT, dan peta aset berdasarkan data lapangan.
 - d. Perancangan program (pertemuan ke-13): menyusun logframe (tujuan akhir, tujuan program, keluaran, kegiatan, indikator SMART, sumber verifikasi, asumsi), rencana kerja, RAB sederhana, struktur pelaksana, dan rencana monev.
 - e. Penulisan dokumen rencana program (sistematika pada Lampiran 2).
 - f. Presentasi dan uji publik (pertemuan ke-14–15): setiap kelompok mempresentasikan rencananya; kelompok lain dan dosen berperan sebagai penguji yang menilai kelogisan dan kelayakan rencana.
- C. Sistematika dokumen rencana program: halaman judul; ringkasan; latar belakang dan hasil pengkajian; analisis masalah dan aset; tujuan dan logframe; rencana kegiatan dan jadwal; RAB; organisasi pelaksana; rencana monitoring dan evaluasi; strategi keberlanjutan; lampiran (dokumentasi PRA, foto, daftar informan). Panjang dokumen 15–25 halaman.
- D. Penilaian menggunakan rubrik pada Lampiran 3, mencakup: kualitas data pengkajian (20%), ketajaman analisis (20%), kelogisan logframe dan indikator (25%), kelayakan rencana kerja dan anggaran (15%), strategi keberlanjutan (10%), serta presentasi dan kerja sama tim (10%).

➤ **Studi Kasus: Merancang Program Penguatan Usaha Beras Kemasan Kelompok Tani**

Sebuah tim mahasiswa mendampingi kelompok tani di sebuah desa sentra padi. Pengkajian PRA menemukan masalah inti: pendapatan anggota dari usahatani padi rendah. Pohon masalah menunjukkan tiga akar utama: (1) petani menjual gabah basah saat panen raya ketika harga jatuh; (2) tidak ada fasilitas pengeringan dan penggilingan milik kelompok; (3) kelembagaan kelompok lemah dalam administrasi dan pemasaran. Pemetaan aset menemukan kekuatan: lahan sawah irigasi teknis yang produktif (bandingkan kasus optimalisasi irigasi Sidrap pada Bab 6; Asrib dkk., t.t.), pengurus muda yang terampil menggunakan telepon pintar, gudang desa yang tidak terpakai, dan Dana Desa yang dapat diakses melalui musyawarah desa.

Tim bersama kelompok menyusun logframe dengan tujuan program “kelompok tani mengelola usaha beras kemasan yang menguntungkan secara mandiri dalam dua tahun”. Keluarannya: (1) unit usaha bersama terbentuk dengan aturan main tertulis; (2) 30 anggota terlatih pascapanen dan pembukuan; (3) kemitraan pemasaran dengan dua toko dan satu platform daring terjalin. Indikator tujuan dirumuskan SMART: “harga jual rata-rata produk anggota naik minimal 15% pada akhir tahun kedua”. Asumsi kunci: harga beras tidak anjlok drastis dan dukungan pemerintah desa berlanjut. RAB memadukan Dana Desa (mesin pengering), swadaya anggota (rehabilitasi gudang secara gotong royong), dan pendampingan penyuluh. Rencana monev menetapkan pertemuan bulanan pemantauan dan musyawarah pertanggungjawaban tiap enam bulan.

Kasus ini memperlihatkan alur utuh: pengkajian partisipatif → analisis masalah dan aset → logframe → rencana kerja dan anggaran → mekanisme akuntabilitas. Mahasiswa dapat menirukan alur yang sama pada praktikum kelompoknya.

Sorotan Lapangan: Proposal yang Ditolak dan Apa yang Terjadi Kemudian

Sebuah kelompok pemuda desa mengajukan proposal bantuan usaha ke berbagai instansi dan selalu ditolak. Proposal mereka sebenarnya tebal: latar belakang panjang, banyak lampiran, dan permohonan dana yang besar. Seorang pendamping mengajak mereka membedahnya dan menemukan penyakit yang umum: masalah dirumuskan sebagai “belum adanya bantuan” (ketiadaan solusi, bukan masalah); tujuan berbunyi “meningkatkan kesejahteraan” tanpa ukuran; kegiatan tidak berhubungan logis dengan tujuan; dan tidak ada satu pun kontribusi swadaya. Kelompok lalu mengulang prosesnya dari awal: melakukan pengkajian kecil, menyusun pohon masalah, memilih satu masalah yang sanggup mereka tangani, membangun logframe sederhana dengan indikator terukur, dan mencantumkan swadaya berupa tenaga dan tempat. Proposal baru itu lebih tipis, memohon dana lebih kecil dan disetujui. Lebih penting dari persetujuan dana, kelompok kini memahami logika programnya sendiri sehingga mampu menjelaskannya kepada siapa pun. Dokumen perencanaan yang baik bukan yang paling tebal, melainkan yang paling jernih logikanya dan paling jujur kemampuannya.

➤ **Rangkuman**

- a. Program pemberdayaan dikelola melalui siklus: pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran; seluruh tahap dijalankan bersama masyarakat.
- b. Pohon masalah menganalisis sebab-akibat masalah inti; pohon tujuan membalikinya menjadi hierarki tujuan; SWOT mengkaji faktor internal-eksternal; pemetaan aset menegaskan kekuatan lokal sebagai titik berangkat.
- c. Logframe merangkum logika program: kegiatan → keluaran → tujuan program → tujuan akhir, disertai indikator, sumber verifikasi, dan asumsi.
- d. Indikator yang baik memenuhi kriteria SMART dan mencakup dimensi keberdayaan, bukan hanya hasil fisik-ekonomi.
- e. Rencana operasional meliputi jadwal kerja, RAB, organisasi pelaksana, mobilisasi sumber daya (termasuk swadaya), dan mekanisme akuntabilitas sosial.
- f. Pelaksanaan yang memberdayakan bersifat adaptif, mendokumentasikan proses, mengelola konflik secara terbuka, dan menyiapkan strategi keluar sejak awal.

➤ **Tes Formatif**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Urutan siklus program pemberdayaan yang benar adalah
 - a. perencanaan–pengkajian–pelaksanaan–evaluasi
 - b. pengkajian–perencanaan–pelaksanaan–pemantauan–evaluasi–pembelajaran
 - c. pelaksanaan–perencanaan–pengkajian–evaluasi
 - d. pengkajian–pelaksanaan–perencanaan–pemantauan

2. Rumusan masalah inti yang tepat untuk pohon masalah adalah
 - a. tidak ada bantuan traktor dari pemerintah
 - b. kurangnya proyek di desa
 - c. produktivitas padi petani Desa X rendah
 - d. perlunya pelatihan bagi petani
3. Dalam pohon masalah, akar pohon melambangkan
 - a. akibat masalah;
 - b. masalah inti;
 - c. penyebab masalah;
 - d. solusi masalah
4. Strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal dalam matriks SWOT disebut strategi
 - a. W-T;
 - b. S-O;
 - c. W-O;
 - d. S-T
5. Lima kategori aset dalam pendekatan ABCD adalah modal
 - a. uang, tanah, mesin, gedung, saham
 - b. manusia, sosial, alam, fisik, finansial
 - c. pribadi, keluarga, desa, kecamatan, kabupaten
 - d. formal, informal, tradisional, modern, digital
6. Dalam hierarki logframe, "30 anggota terlatih pascapanen" merupakan contoh
 - a. tujuan akhir;
 - b. tujuan program;
 - c. keluaran;
 - d. asumsi
7. Kondisi di luar kendali program yang harus terpenuhi agar logika program berjalan disebut

- a. indikator;
 - b. asumsi;
 - c. keluaran;
 - d. baseline
8. "Pendapatan bersih usahatani anggota meningkat 20% pada akhir tahun kedua, diverifikasi melalui catatan usahatani" memenuhi kriteria indikator
- a. SWOT;
 - b. PRA;
 - c. SMART;
 - d. ABCD
9. Pertanggungjawaban pelaksana program kepada masyarakat penerima manfaat disebut akuntabilitas
- a. ke atas;
 - b. ke bawah (sosial);
 - c. finansial;
 - d. administratif
10. Strategi keluar (*exit strategy*) program pemberdayaan yang tepat adalah
- a. menghentikan seluruh kegiatan secara mendadak
 - b. memperpanjang ketergantungan pada pendamping
 - c. penguatan kelembagaan lokal dan kaderisasi sejak awal program
 - d. menyerahkan seluruh aset kepada pemerintah kabupaten

➤ Tugas

Laksanakan praktikum penyusunan rencana program pemberdayaan sesuai panduan pada subbab 8.7 secara berkelompok. Kumpulkan dokumen rencana program lengkap dan siapkan presentasi uji publik.

➤ Latihan Uraian

- a. Jelaskan tahap-tahap siklus program pemberdayaan dan uraikan mengapa pembelajaran (learning) menjadikan siklus itu berputar, bukan berhenti.
- b. Susunlah contoh pohon masalah sederhana (satu masalah inti, minimal tiga penyebab bertingkat, dua akibat) untuk kasus rendahnya pendapatan nelayan atau petani, lalu baliklah menjadi pohon tujuan.
- c. Jelaskan logika vertikal kerangka kerja logis dan peran asumsi di setiap tingkatnya; apa yang harus dilakukan bila ditemukan killer assumption?
- d. Rumuskan dua indikator SMART untuk tujuan program "kelompok wanita tani mampu mengelola usaha pengolahan hasil secara mandiri", satu indikator ekonomi dan satu indikator keberdayaan.
- e. Uraikan sumber-sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk program pemberdayaan desa selain dana pemerintah, dan jelaskan mengapa swadaya penting bagi keberlanjutan.

➤ Bahan Diskusi Kelas

- a. Kritisi bersama sebuah proposal program (disediakan dosen): apakah masalahnya dirumuskan dengan benar? Apakah indikatornya SMART? Apakah asumsinya realistis?
- b. Diskusikan fenomena isomorphic mimicry: mengapa banyak dokumen perencanaan desa tampak lengkap di atas kertas tetapi tidak berfungsi? Apa akar masalahnya?

➤ Petunjuk Jawaban Latihan Uraian

- a. Uraikan enam tahap siklus dan tunjukkan umpan balik pembelajaran ke pengkajian/perencanaan berikutnya.

- b. Pastikan masalah inti spesifik dan negatif; penyebab bertingkat dengan pertanyaan “mengapa”; pembalikan konsisten menjadi pernyataan positif.
- c. Jelaskan rantai kegiatan→keluaran→tujuan→dampak dengan asumsi di tiap jenjang; killer assumption menuntut perubahan desain, bukan diabaikan.
- d. Uji rumusan indikator terhadap kelima kriteria SMART; indikator keberdayaan dapat berupa kemampuan pengurus menyusun laporan atau bernegosiasi.
- e. Sebutkan swadaya, Dana Desa, kemitraan perguruan tinggi/swasta, kredit program; kaitkan swadaya dengan rasa memiliki dan keberlanjutan.

➤ Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci pada Lampiran 1. Hitung tingkat penguasaan = $(\text{jumlah benar}/10) \times 100\%$. Bila mencapai 80% ke atas, lanjutkan ke Bab 9; bila belum, pelajari kembali subbab 8.3 dan 8.4 yang menjadi inti keterampilan perencanaan.

➤ Bacaan Lanjutan Beranotasi

- a. Pritchett, L., & Woolcock, M. (2021) dalam *Governance and Development Review*. Kritik tajam terhadap peniruan bentuk tanpa fungsi (isomorphic mimicry) dalam pembangunan; penyeimbang penting agar dokumen perencanaan tidak menjadi formalitas.
- b. UNDP (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. Contoh kerangka perencanaan program pemberdayaan lembaga internasional, termasuk indikator keberdayaan.

- c. McGee, R., & Gaventa, J. (2020) dalam *Journal of Development Studies*. Pemikiran ulang akuntabilitas dalam program pembangunan; landasan konsep akuntabilitas sosial pada bab ini.

➤ **Daftar Pustaka**

- Asrib, A. R., Ibrahim, H., Ali, T., & Zain, M. M. (t.t.). Optimalisasi fungsi irigasi teknis dalam upaya peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Sidrap. *Agribusiness and Socioeconomic Journal*.
- Chambers, R., & Pettit, J. (2023). *Participation and empowerment in development practice*. Routledge.
- McGee, R., & Gaventa, J. (2020). Rethinking accountability and empowerment in development programs. *Journal of Development Studies*, 56(9), 1789–1805.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Applying evaluation criteria thoughtfully*. OECD Publishing.
- Pritchett, L., & Woolcock, M. (2021). Institutional capability and community-driven development. *Governance and Development Review*, 9(2), 77–101.
- United Nations Development Programme. (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. UNDP.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN REFLEKSI PROGRAM PEMBERDAYAAN

➤ Pendahuluan

Deskripsi Singkat

Bab terakhir ini membahas tahap penutup sekaligus penyempurna siklus program pemberdayaan: monitoring (pemantauan), evaluasi, dan refleksi. Pembahasan mencakup konsep dasar dan perbedaan monitoring dengan evaluasi; kriteria evaluasi program pembangunan; pendekatan evaluasi partisipatif; indikator keberdayaan masyarakat; teknik *most significant change*; pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai pembelajaran (*lesson learned*); serta refleksi kritis mahasiswa terhadap perannya sebagai calon fasilitator pemberdayaan. Bab ini menuntaskan CPMK-3, yaitu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan.

Relevansi

Tanpa monitoring dan evaluasi (monev), pelaksana program berjalan dalam gelap: tidak tahu apakah kegiatan berada di jalur yang benar, apakah tujuan tercapai, dan apa yang harus diperbaiki. Lembaga donor, pemerintah, dan masyarakat semakin menuntut bukti hasil (*evidence of results*) dan pertanggungjawaban. Lebih penting lagi, dalam paradigma pemberdayaan, monev bukan sekadar alat kontrol dari atas, melainkan sarana belajar bersama masyarakat: masyarakat yang mampu menilai programnya sendiri adalah masyarakat yang berdaya (Chambers & Pettit, 2023; UNDP, 2022). Bagi

mahasiswa, kemampuan monev merupakan kompetensi profesional yang dibutuhkan hampir semua lembaga pembangunan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Membedakan konsep monitoring dan evaluasi serta menjelaskan fungsinya dalam siklus program.
- b. Menjelaskan kriteria evaluasi program (relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan, koherensi).
- c. Menerapkan pendekatan evaluasi partisipatif dan teknik most significant change.
- d. Merumuskan indikator keberdayaan masyarakat.
- e. Menyusun laporan monev sederhana dan merumuskan pembelajaran (*lesson learned*).
- f. Melakukan refleksi kritis atas peran dirinya sebagai calon fasilitator pemberdayaan masyarakat.

➤ Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan dan analisis informasi secara rutin dan berkesinambungan selama program berjalan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan dibandingkan rencana. Pertanyaan kunci monitoring: apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal? Apakah keluaran dihasilkan? Apakah anggaran digunakan semestinya? Apakah muncul masalah yang perlu segera ditangani?

Evaluasi adalah penilaian sistematis dan berkala (biasanya tengah program dan akhir program) terhadap rancangan, pelaksanaan, dan hasil program untuk menentukan nilai atau manfaatnya. Pertanyaan kunci evaluasi: apakah tujuan tercapai? Mengapa berhasil atau gagal? Apa dampaknya bagi masyarakat? Apakah hasilnya akan berlanjut?

Perbedaan pokok keduanya dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 9. 1 Perbedaan Pokok Monitoring dan Evaluasi

Aspek	Monitoring	Evaluasi
Waktu	Terus-menerus selama program	Berkala: awal (baseline), tengah, akhir, pascaprogram
Fokus	Masukan, kegiatan, keluaran	Hasil (<i>outcome</i>), dampak, keberlanjutan
Pertanyaan	Apakah kita mengerjakan dengan benar?	Apakah kita mengerjakan hal yang benar?
Pelaku utama	Pelaksana program dan masyarakat	Dapat internal maupun evaluator eksternal, idealnya bersama masyarakat
Kegunaan	Perbaikan segera (koreksi jalur)	Keputusan strategis, pertanggungjawaban, pembelajaran

Sumber: Kompilasi penulis dari OECD (2021) dan UNDP (2022)

Monitoring dan evaluasi saling melengkapi: data monitoring yang tertib menjadi bahan baku evaluasi yang bermutu. Keduanya harus direncanakan sejak tahap desain program bukan dipikirkan belakangan dengan menetapkan indikator, data dasar (baseline), target, sumber data, metode, penanggung jawab, dan jadwal dalam suatu rencana monev.

➤ **Kriteria Evaluasi Program**

Kriteria evaluasi yang paling luas digunakan dalam program pembangunan adalah enam kriteria OECD-DAC (OECD, 2021):

- a. Relevansi (*relevance*): sejauh mana tujuan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prioritas daerah, dan kebijakan nasional.

- b. Koherensi (*coherence*): sejauh mana program selaras dan tidak tumpang tindih dengan intervensi lain di wilayah yang sama.
- c. Efektivitas (*effectiveness*): sejauh mana tujuan dan keluaran program tercapai.
- d. Efisiensi (*efficiency*): sejauh mana sumber daya (dana, waktu, tenaga) digunakan secara hemat untuk mencapai hasil.
- e. Dampak (*impact*): perubahan jangka panjang positif maupun negatif, disengaja maupun tidak yang ditimbulkan program.
- f. Keberlanjutan (*sustainability*): sejauh mana manfaat program berlanjut setelah dukungan eksternal berakhir.

Untuk program pemberdayaan, kriteria tersebut perlu dibaca dengan kacamata pemberdayaan. Efektivitas tidak cukup diukur dari fisik kegiatan (jumlah pelatihan, panjang saluran irigasi), tetapi dari perubahan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Keberlanjutan tidak hanya soal pemeliharaan aset, tetapi keberlanjutan kelembagaan dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif.

➤ Evaluasi Partisipatif

Evaluasi konvensional sering dilakukan oleh pihak luar dengan indikator yang ditetapkan dari atas; masyarakat hanya menjadi objek yang diwawancarai. Evaluasi partisipatif membalik posisi itu: masyarakat terlibat dalam menentukan apa yang dinilai, mengumpulkan data, menganalisis, dan memutuskan tindak lanjut. Prinsip-prinsipnya (Chambers & Pettit, 2023):

- a. Masyarakat adalah subjek evaluasi, bukan objek;
- b. Indikator keberhasilan dirumuskan bersama, termasuk indikator versi masyarakat sendiri;

- c. Metode sederhana, visual, dan dapat dikerjakan warga (skoring, diagram, cerita perubahan);
- d. Temuan dibahas terbuka dalam musyawarah dan langsung dihubungkan dengan perbaikan;
- e. Proses evaluasi itu sendiri membangun kapasitas warga belajar berpikir kritis tentang programnya.

Teknik-teknik evaluasi partisipatif antara lain:

- a. Skoring dan pemeringkatan: warga memberi skor keberhasilan tiap kegiatan (misalnya dengan biji jagung pada matriks) lalu mendiskusikan alasannya.
- b. Pemantauan oleh komite warga: kelompok kecil warga terlatih memeriksa kemajuan fisik dan keuangan secara berkala, lalu melaporkannya di papan informasi dan musyawarah.
- c. Kartu penilaian masyarakat (*community score card*): warga menilai mutu layanan program, kemudian hasilnya dibahas bersama penyedia layanan untuk disepakati perbaikannya bentuk akuntabilitas sosial yang memperkuat suara warga (McGee & Gaventa, 2020).
- d. Most significant change (MSC): teknik evaluasi berbasis cerita. Warga diminta menuturkan perubahan paling berarti yang mereka alami akibat program; cerita-cerita dikumpulkan, didiskusikan, dan dipilih secara berjenjang yang paling signifikan beserta alasannya. MSC menangkap perubahan kualitatif rasa percaya diri, perubahan relasi dalam keluarga, keberanian berbicara yang sering luput dari indikator kuantitatif.

➤ **Indikator Keberdayaan Masyarakat**

Bagaimana mengetahui masyarakat “semakin berdaya”? Keberdayaan bersifat multidimensi sehingga indikatornya pun berlapis (Alcántara dkk., 2021; UNDP, 2022). Beberapa dimensi dan contoh indikatornya:

- a. Dimensi individu (psikologis): meningkatnya kepercayaan diri; kemampuan menyampaikan pendapat; pengetahuan dan keterampilan baru yang dipraktikkan.
- b. Dimensi kelembagaan (organisasional): kelompok memiliki aturan main tertulis yang dijalankan; pertemuan rutin berjalan; pengurus mampu menyusun rencana dan laporan keuangan; kaderisasi berjalan.
- c. Dimensi relasional (sosial-politik): warga (termasuk perempuan dan kelompok marginal) hadir dan bersuara dalam musyawarah desa; usulan kelompok masuk dalam dokumen perencanaan desa; kelompok mampu bernegosiasi dengan pedagang, bank, atau pemerintah.
- d. Dimensi ekonomi: pendapatan dan aset produktif meningkat; akses terhadap modal dan pasar membaik; ketergantungan pada tengkulak menurun.
- e. Dimensi keberlanjutan: kegiatan tetap berjalan tanpa pendamping; kelompok mereplikasi praktik baik ke warga lain.

Pengukuran memadukan data kuantitatif (persentase, jumlah, nilai rupiah) dan kualitatif (cerita perubahan, hasil FGD). Perbandingan kondisi sebelum-sesudah program membutuhkan data dasar (baseline) yang dikumpulkan pada awal program inilah alasan rencana monev harus disusun sejak tahap perencanaan (Bab 8).

➤ **Pelaporan, Pembelajaran, dan Pemanfaatan Hasil**

Hasil monev baru bernilai bila dilaporkan dan digunakan. Prinsip pelaporan yang baik:

- a. Sesuai pengguna. Laporan untuk penyandang dana berbeda format dengan laporan untuk musyawarah warga; untuk warga, gunakan bahasa sederhana, tabel/gambar, dan papan informasi.
- b. Jujur dan berimbang. Laporkan keberhasilan maupun kegagalan beserta analisis penyebabnya; menutupi masalah menunda perbaikan dan merusak kepercayaan.
- c. Berorientasi keputusan. Setiap temuan disertai rekomendasi tindak lanjut yang jelas: apa yang dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Pembelajaran (*lesson learned*) adalah generalisasi dari pengalaman program yang dapat memandu program lain: misalnya, “pelatihan tanpa pendampingan lanjutan tidak mengubah praktik”; “melibatkan pemerintah desa sejak pengkajian mempermudah dukungan Dana Desa”. Pembelajaran dirumuskan dalam lokakarya refleksi akhir program bersama seluruh pemangku kepentingan, didokumentasikan, dan disebarluaskan.

Siklus pun kembali ke awal: pembelajaran menjadi masukan pengkajian dan perencanaan program berikutnya. Dengan demikian monev bukan akhir program, melainkan jembatan menuju program yang lebih baik.

➤ **Refleksi: Mahasiswa sebagai Calon Fasilitator Pemberdayaan**

Bagian penutup buku ini mengajak mahasiswa merenungkan kembali perjalanan pembelajaran dari Bab 1 hingga Bab 9 serta perannya kelak. Beberapa bahan refleksi:

- a. Pemberdayaan adalah soal relasi kuasa, bukan sekadar proyek. Dari konsep power (Bab 1), tangga partisipasi (Bab 2), hingga akuntabilitas sosial (Bab 8–9), benang merahnya sama: menggeser posisi masyarakat dari objek menjadi subjek. Fasilitator yang baik rela “berkurang” agar masyarakat “bertambah”.
- b. Kerendahan hati profesional. Chambers dan Pettit (2023) menyebutnya *handing over the stick* menyerahkan tongkat kepada masyarakat. Pengetahuan akademik mahasiswa penting, tetapi pengetahuan lokal masyarakat sama pentingnya; keduanya saling melengkapi.
- c. Integritas dan etika. Fasilitator memegang kepercayaan masyarakat; transparansi anggaran, kejujuran data money, dan keberpihakan pada kelompok lemah adalah harga mati.
- d. Belajar sepanjang hayat. Setiap komunitas unik; metode yang berhasil di satu desa belum tentu cocok di desa lain. Sikap reflektif mengevaluasi diri sendiri sebagaimana mengevaluasi program adalah bekal profesional yang paling tahan lama.

Pertanyaan refleksi untuk dijawab secara pribadi dalam jurnal pembelajaran:

- a. Perubahan cara pandang apa yang paling berarti yang Anda alami selama mengikuti mata kuliah ini?
- b. Kekuatan dan kelemahan apa yang Anda temukan pada diri Anda saat praktikum lapangan?
- c. Peran apa yang ingin Anda ambil dalam pemberdayaan masyarakat setelah lulus, dan kompetensi apa yang masih perlu Anda kembangkan?

➤ **Studi Kasus: Evaluasi Partisipatif Program Penguatan Kelompok Tani**

Melanjutkan kasus Bab 8, pada akhir tahun pertama program beras kemasan, kelompok tani bersama pendamping menyelenggarakan evaluasi partisipatif. Komite pemantau warga memaparkan data monitoring: pelatihan pascapanen terlaksana 100%, unit usaha terbentuk, tetapi penjualan beras kemasan baru mencapai 60% target karena kemasan pertama dinilai kurang menarik pasar dan pengurusan izin edar tersendat.

Warga kemudian melakukan skoring keberhasilan tiap kegiatan dan mengumpulkan cerita perubahan dengan teknik MSC. Cerita yang terpilih sebagai perubahan paling signifikan justru bukan soal pendapatan: seorang ibu anggota kelompok menuturkan bahwa untuk pertama kalinya ia berani memaparkan laporan keuangan di depan musyawarah desa perubahan relasional yang tidak tertangkap indikator penjualan. Musyawarah evaluasi menyepakati tindak lanjut: memperbaiki desain kemasan dengan melibatkan pengurus muda, meminta pendampingan penyuluh untuk perizinan, dan mempertahankan mekanisme laporan terbuka enam bulanan. Kesepakatan ditempel di papan informasi desa.

Kasus ini menunjukkan evaluasi yang berfungsi ganda: menghasilkan koreksi program yang konkret sekaligus menjadi ruang belajar dan penguatan keberdayaan warga.

Sorotan Lapangan: Papan Informasi yang Mengubah Arah Program

Sebuah program pembangunan sarana air bersih mewajibkan hal sederhana: seluruh rencana, anggaran, dan kemajuan pekerjaan ditempel di papan informasi dusun dan dibacakan dalam pertemuan bulanan. Mulanya pengurus keberatan

“warga tidak akan mengerti angka-angka” tetapi justru dari situ pengawasan hidup. Seorang warga bertanya mengapa volume pasir yang datang tidak sesuai catatan; pemeriksaan bersama menemukan kekeliruan pemasok yang segera dikoreksi sebelum menjadi masalah besar. Pada evaluasi akhir tahun, warga memberi skor rendah bukan pada mutu bangunan, melainkan pada pembagian air yang belum merata ke rumah-rumah di ujung dusun hal yang luput dari indikator teknis program. Musyawarah lalu menyepakati perubahan jaringan pipa pada tahap berikutnya. Monitoring dan evaluasi sering dibayangkan sebagai urusan formulir untuk memuaskan penyandang dana. Pengalaman ini menunjukkan wajah aslinya yang lebih penting: mekanisme agar program terus dikoreksi oleh orang-orang yang paling merasakan akibatnya. Transparansi bukan beban administratif, melainkan alat kemudi bersama.

➤ **Rangkuman**

- a. Monitoring adalah pemantauan rutin kemajuan pelaksanaan; evaluasi adalah penilaian berkala terhadap hasil, dampak, dan nilai program; keduanya direncanakan sejak desain program.
- b. Enam kriteria evaluasi OECD-DAC: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan dibaca dengan kacamata pemberdayaan.
- c. Evaluasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek penilai melalui teknik skoring, komite pemantau warga, kartu penilaian masyarakat, dan most significant change.
- d. Indikator keberdayaan bersifat multidimensi: individu, kelembagaan, relasional, ekonomi, dan keberlanjutan; memadukan ukuran kuantitatif dan kualitatif.

- e. Hasil monev dilaporkan secara jujur, sesuai pengguna, dan berorientasi keputusan; pembelajaran (*lesson learned*) menjadi masukan siklus program berikutnya.
- f. Refleksi kritis atas peran, etika, dan kerendahan hati profesional adalah bekal utama mahasiswa sebagai calon fasilitator pemberdayaan.

➤ Tes Formatif

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Kegiatan pengumpulan informasi secara rutin selama program berjalan untuk membandingkan pelaksanaan dengan rencana disebut
 - a. evaluasi;
 - b. monitoring;
 - c. refleksi;
 - d. audit
2. Pertanyaan “apakah tujuan program tercapai dan mengapa” merupakan pertanyaan khas
 - a. *monitoring*;
 - b. evaluasi;
 - c. baseline;
 - d. mobilisasi
3. Data kondisi awal yang dikumpulkan sebelum program dimulai sebagai pembanding disebut
 - a. endline;
 - b. baseline;
 - c. deadline;
 - d. outline
4. Kriteria evaluasi yang menilai sejauh mana manfaat program berlanjut setelah dukungan eksternal berakhir adalah
 - a. relevansi;

- b. efisiensi;
 - c. keberlanjutan;
 - d. koherensi
5. Kriteria yang menilai kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan masyarakat adalah
- a. relevansi;
 - b. efektivitas;
 - c. dampak;
 - d. efisiensi
6. Teknik evaluasi berbasis cerita perubahan paling berarti yang dipilih secara berjenjang oleh masyarakat disebut
- a. *community score card*;
 - b. *most significant change*;
 - c. SWOT;
 - d. transek
7. Ciri utama evaluasi partisipatif adalah
- a. dilakukan sepenuhnya oleh evaluator eksternal
 - b. indikator ditetapkan penyandang dana tanpa masukan warga
 - c. masyarakat terlibat menentukan indikator, mengumpulkan data, dan memutuskan tindak lanjut
 - d. hasilnya dirahasiakan dari masyarakat
8. Meningkatnya keberanian anggota perempuan berbicara dalam musyawarah desa merupakan indikator keberdayaan dimensi
- a. ekonomi;
 - b. relasional;
 - c. fisik;
 - d. finansial
9. Prinsip pelaporan money yang baik adalah
- a. hanya melaporkan keberhasilan agar dana berlanjut

- b. menggunakan bahasa teknis yang sama untuk semua pengguna
 - c. jujur melaporkan keberhasilan dan kegagalan disertai rekomendasi
 - d. menunda pelaporan hingga program selesai seluruhnya
10. "Pelatihan tanpa pendampingan lanjutan tidak mengubah praktik petani" merupakan contoh
- a. asumsi program;
 - b. *lesson learned*;
 - c. baseline;
 - d. indikator masukan

➤ Tugas

Susunlah rencana monitoring dan evaluasi untuk rencana program yang kelompok Anda buat pada praktikum Bab 8, memuat: matriks indikator (per tingkat logframe) dengan baseline dan target, metode dan jadwal pengumpulan data, pembagian peran (termasuk komite warga), serta rancangan satu kegiatan evaluasi partisipatif (pilih: skoring, community score card, atau MSC). Sertakan pula refleksi pribadi 1–2 halaman menjawab tiga pertanyaan refleksi pada subbab 9.7.

➤ Latihan Uraian

- a. Bandingkan monitoring dan evaluasi dari segi waktu, fokus, pertanyaan kunci, dan kegunaannya; jelaskan mengapa keduanya harus direncanakan sejak tahap desain program.
- b. Jelaskan enam kriteria evaluasi OECD-DAC dan terapkan secara singkat untuk menilai program pelatihan pascapanen bagi kelompok tani.

- c. Uraikan prinsip dan teknik evaluasi partisipatif; mengapa proses evaluasi itu sendiri dapat menjadi sarana pemberdayaan?
- d. Jelaskan langkah-langkah teknik most significant change dan jenis perubahan apa yang paling baik ditangkap teknik ini dibandingkan indikator kuantitatif.
- e. Rumuskan masing-masing satu indikator keberdayaan untuk dimensi individu, kelembagaan, relasional, ekonomi, dan keberlanjutan pada kasus kelompok usaha beras kemasan.

➤ **Bahan Diskusi Kelas**

- a. Diskusikan: bila hasil evaluasi menunjukkan program gagal mencapai target, bagaimana sebaiknya temuan itu dilaporkan kepada penyandang dana dan kepada masyarakat? Apa risiko dari laporan yang "diperhalus"?
- b. Refleksi bersama di akhir perkuliahan: perubahan cara pandang apa yang paling berarti yang dialami kelas ini selama satu semester, dan kompetensi apa yang masih perlu dikembangkan? Gunakan format most significant change.

➤ **Petunjuk Jawaban Latihan Uraian**

- a. Gunakan tabel perbandingan pada subbab 9.2; alasan perencanaan sejak awal: kebutuhan baseline dan indikator yang disepakati.
- b. Terapkan keenam kriteria satu per satu pada kasus pelatihan pascapanen dengan pertanyaan kunci masing-masing.
- c. Tekankan posisi warga sebagai subjek penilai dan efek belajar dari proses menilai programnya sendiri.

- d. Urutkan langkah pengumpulan dan seleksi berjenjang cerita; keunggulan MSC pada perubahan kualitatif dan tak terduga.
- e. Rumuskan satu indikator per dimensi dengan merujuk daftar contoh subbab 9.5, disesuaikan konteks usaha beras kemasan.

➤ **Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci pada Lampiran 1. Bila tingkat penguasaan Anda 80% ke atas, Anda telah menuntaskan seluruh materi buku ini selamat! Bila belum, pelajari kembali subbab 9.2 hingga 9.5.

➤ **Bacaan Lanjutan Beranotasi**

- a. OECD (2021). *Applying evaluation criteria thoughtfully*. Penjelasan resmi enam kriteria evaluasi OECD-DAC beserta rambu penerapannya secara kontekstual.
- b. Chambers, R., & Pettit, J. (2023). *Participation and empowerment in development practice*. Bab-bab tentang evaluasi partisipatif dan pembelajaran; sumber teknik skoring dan refleksi bersama masyarakat.
- c. McGee, R., & Gaventa, J. (2020) dalam *Journal of Development Studies*. Kajian mekanisme akuntabilitas sosial seperti community score card; relevan untuk merancang monev yang memberdayakan.

➤ **Daftar Pustaka**

Alcántara, M., Nguyen, T., & Alegría, R. (2021). Community empowerment and social change: Participatory approaches in the Global South. *Journal of Community Psychology*, 49(5), 1542–1560.

- Chambers, R., & Pettit, J. (2023). *Participation and empowerment in development practice*. Routledge.
- McGee, R., & Gaventa, J. (2020). Rethinking accountability and empowerment in development programs. *Journal of Development Studies*, 56(9), 1789–1805.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Applying evaluation criteria thoughtfully*. OECD Publishing.
- United Nations Development Programme. (2022). *Community resilience and empowerment: Guidelines for programming*. UNDP.

LAMPIRAN

➤ Lampiran 1. Kunci Jawaban Tes Formatif

Nomor	Bab 1	Bab 2	Bab 3	Bab 4	Bab 5	Bab 6	Bab 7	Bab 8	Bab 9
1	b	b	c	b	b	c	b	b	b
2	c	b	b	b	c	b	b	c	b
3	d	c	c	c	b	b	c	c	b
4	b	d	b	b	a	b	b	b	c
5	b	b	c	b	b	c	b	b	a
6	c	b	b	c	b	c	b	c	b
7	b	b	d	c	b	b	b	b	c
8	c	b	c	c	b	b	b	c	b
9	b	b	b	b	b	b	b	b	c
10	c	b	b	a	b	b	b	c	b

Rumus tingkat penguasaan: $(\text{jumlah jawaban benar} \div 10) \times 100\%$. Kriteria: 90–100% = baik sekali; 80–89% = baik; 70–79% = cukup; <70% = kurang (ulangi mempelajari bab terkait).

➤ Lampiran 2. Sistematika Dokumen Rencana Program Pemberdayaan (Tugas Praktikum)

- Halaman judul: judul program, lokasi, nama kelompok penyusun, program studi, tahun.
- Ringkasan (maksimum 1 halaman): masalah inti, tujuan, kegiatan pokok, kebutuhan biaya, hasil yang diharapkan.
- Bab I Pendahuluan: gambaran umum lokasi dan komunitas; proses pengkajian yang dilakukan (teknik, waktu, informan).
- Bab II Hasil Pengkajian dan Analisis: temuan pengkajian; pohon masalah dan pohon tujuan; matriks SWOT; peta aset komunitas.

- e. Bab III Rancangan Program: nama program; tujuan akhir, tujuan program, keluaran; matriks kerangka kerja logis lengkap dengan indikator SMART, sumber verifikasi, dan asumsi.
- f. Bab IV Rencana Pelaksanaan: uraian kegiatan; jadwal (bagan Gantt); rencana anggaran biaya; struktur organisasi pelaksana; rencana mobilisasi sumber daya dan swadaya.
- g. Bab V Rencana Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan: matriks indikator monev; metode dan jadwal; peran komite warga; strategi keberlanjutan dan exit strategy.
- h. Lampiran: dokumentasi PRA (peta, kalender musim, diagram Venn, transek), foto kegiatan, daftar informan, daftar hadir.

Ketentuan penulisan: 15–25 halaman inti (di luar lampiran); kertas A4; huruf Times New Roman 12; spasi 1,5; margin 3 cm; dikumpulkan dalam bentuk cetak dan berkas digital.

➤ **Lampiran 3. Rubrik Penilaian Praktikum Penyusunan Rencana Program**

Aspek (bobot)	Baik sekali (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (<55)
Kualitas data pengkajian (20%)	Data lengkap dari ≥2 teknik PRA, sumber beragam, terdokumentasi rapi	Data cukup, 2 teknik PRA, dokumentasi memadai	Data terbatas, teknik PRA kurang tepat	Data sangat minim atau tidak berbasis lapangan
Ketajaman analisis (20%)	Pohon masalah, SWOT, dan peta aset logis, saling terkait, berbasis data	Analisis benar namun keterkaitan antarteknik kurang	Analisis dangkal, sebagian tidak berbasis data	Analisis keliru atau tidak ada
Kelogisan logframe dan indikator (25%)	Logika vertikal runtut; seluruh indikator SMART; asumsi realistis	Logika baik; sebagian indikator kurang terukur	Logika lemah; indikator umum/tidak terukur	Logframe tidak logis atau tidak ada
Kelayakan rencana kerja dan anggaran (15%)	Jadwal realistis; RAB rinci, wajar, memuat swadaya	Jadwal dan RAB cukup realistis	Jadwal/RAB kurang rinci atau kurang wajar	Tidak realistis atau tidak ada

Aspek (bobot)	Baik sekali (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (<55)
Strategi keberlanjutan (10%)	Exit strategy jelas; penguatan kelembagaan dan kaderisasi konkret	Strategi ada namun kurang operasional	Strategi umum, tidak spesifik	Tidak ada strategi keberlanjutan
Presentasi dan kerja sama tim (10%)	Paparan jelas, tanggapan tepat, seluruh anggota berperan	Paparan baik, sebagian anggota dominan	Paparan kurang jelas, peran tim timpang	Paparan buruk, kerja tim tidak tampak

➤ **Lampiran 4. Panduan Ringkas Teknik PRA untuk Praktikum**

- a. Pemetaan desa/wilayah. Ajak 8–15 warga (usahakan beragam: laki-laki, perempuan, muda, tua) menggambar peta desa di tanah atau kertas lebar: batas wilayah, permukiman, sawah/kebun, sumber air, fasilitas umum, dan lokasi masalah. Fasilitator hanya bertanya dan mencatat; biarkan warga yang menggambar dan berdebat. Hasil: gambaran spasial potensi dan masalah menurut warga.
- b. Kalender musim. Buat matriks 12 bulan; ajak warga mengisi pola hujan, tanam-panen tiap komoditas, serangan hama, kebutuhan tenaga kerja, masa paceklik, kegiatan sosial-keagamaan, dan bulan pengeluaran besar. Hasil: pemahaman waktu kritis untuk menentukan jadwal kegiatan program.
- c. Diagram Venn kelembagaan. Siapkan lingkaran kertas berbagai ukuran. Warga menuliskan lembaga yang ada (pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, majelis taklim, tengkulak, bank, penyuluh) ukuran lingkaran menunjukkan pentingnya lembaga, jaraknya dari lingkaran pusat (masyarakat) menunjukkan kedekatan hubungan. Hasil: peta relasi kelembagaan dan pihak yang potensial digandeng.
- d. Transek (penelusuran wilayah). Berjalanlah bersama 3–5 warga mengikuti lintasan yang membelah tipe-tipe lahan desa; catat pada tiap zona: penggunaan lahan, jenis tanah/air, tanaman-ternak, masalah, dan peluang. Hasil: profil agroekosistem desa dari pengamatan langsung.

- e. Wawancara semi-terstruktur. Gunakan panduan pertanyaan terbuka (bukan kuesioner kaku); wawancara tokoh dan warga biasa, termasuk perempuan dan warga miskin; lakukan triangulasi dengan membandingkan jawaban antarinforman dan dengan pengamatan.
- f. Diskusi kelompok terarah (FGD). Peserta 6–12 orang yang relatif setara; siapkan 4–6 pertanyaan kunci; fasilitator menjaga agar semua bersuara dan tidak ada yang mendominasi; notulis mencatat pendapat, bukan menyimpulkan sepihak.

Etika PRA: minta izin pemerintah desa dan persetujuan warga; jelaskan tujuan secara jujur; jangan menjanjikan bantuan; hargai waktu warga (hindari musim sibuk); kembalikan hasil pengkajian kepada warga untuk diperiksa kebenarannya.

➤ **Lampiran 5. Contoh Terisi: Dokumen Rencana Program Pemberdayaan**

Berikut disajikan contoh dokumen rencana program yang telah diisi sebagai model bagi mahasiswa. Nama desa dan angka bersifat ilustratif.

RENCANA PROGRAM PENGUATAN USAHA BERAS KEMASAN KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA, DESA SUKAMAJU

Ringkasan: Pendapatan usahatani padi anggota Kelompok Tani Harapan Jaya rendah karena gabah dijual basah saat panen raya, tidak ada fasilitas pascapanen milik kelompok, dan kelembagaan lemah dalam administrasi serta pemasaran. Program dua tahun ini bertujuan menjadikan kelompok mampu mengelola usaha beras kemasan secara mandiri melalui pembentukan unit usaha bersama, pelatihan dan pendampingan pascapanen serta pembukuan, dan pengembangan kemitraan pemasaran. Kebutuhan biaya Rp185.000.000 dipenuhi dari Dana

Desa, swadaya anggota, dan pendampingan penyuluh. Hasil yang diharapkan: harga jual rata-rata produk anggota naik minimal 15% dan unit usaha beroperasi menguntungkan pada akhir tahun kedua.

a. Pendahuluan

Desa Sukamaju memiliki 310 hektare sawah irigasi teknis dengan dua musim tanam. Kelompok Tani Harapan Jaya beranggota 42 orang (12 di antaranya perempuan). Pengkajian dilakukan pada bulan Februari–Maret melalui pemetaan desa, kalender musim, diagram Venn kelembagaan, transek, wawancara 15 informan, dan dua kali FGD.

b. Hasil Pengkajian dan Analisis

Masalah inti hasil pohon masalah: pendapatan usahatani padi anggota rendah. Akar penyebab: (1) penjualan gabah basah saat harga jatuh karena tidak ada pengering dan kebutuhan uang tunai mendesak; (2) tidak ada fasilitas penggilingan-pengemasan kelompok karena keterbatasan modal dan belum ada unit usaha; (3) kelembagaan lemah karena administrasi tidak tertib dan kaderisasi pengurus berhenti. Akibat: ketergantungan pada tengkulak menguat dan minat generasi muda bertani menurun. Aset yang terpetakan: sawah irigasi produktif dan gudang desa tak terpakai (modal fisik-alam), pengurus muda melek digital dan tenaga kerja keluarga (modal manusia), tradisi gotong royong dan jejaring dengan penyuluh (modal sosial), tabungan kelompok Rp18 juta (modal finansial).

c. Rancangan Program

Tujuan akhir: kesejahteraan rumah tangga anggota kelompok meningkat. Tujuan program: kelompok mengelola usaha beras kemasan yang menguntungkan secara mandiri pada akhir tahun kedua. Keluaran: (K1) unit

usaha bersama terbentuk dengan aturan tertulis dan pengurus aktif; (K2) 30 anggota terampil pascapanen dan 6 pengurus terampil pembukuan; (K3) fasilitas pengering dan kemasan beroperasi; (K4) kemitraan pemasaran dengan minimal dua toko dan satu kanal daring berjalan.

Matriks kerangka kerja logis (ringkas):

Kegiatan pokok: musyawarah pembentukan unit usaha dan penyusunan aturan main; pelatihan pascapanen (3 angkatan); pelatihan dan pendampingan pembukuan; rehabilitasi gudang secara gotong royong; pengadaan dan instalasi pengering serta alat kemas; uji coba produksi dan desain kemasan; temu usaha dengan calon mitra; peluncuran produk; pendampingan pemasaran daring oleh pengurus muda; musyawarah pertanggungjawaban tiap semester.

Hierarki	Indikator	Sumber verifikasi	Asumsi
Tujuan akhir: kesejahteraan rumah tangga anggota meningkat	Pendapatan bersih usahatani anggota naik rata-rata 20% pada akhir tahun ke-2	Catatan usahatani anggota; survei sederhana	Harga beras tidak anjlok drastis
Tujuan program: usaha beras kemasan dikelola mandiri dan menguntungkan	Harga jual rata-rata produk anggota naik $\geq 15\%$; unit usaha laba positif 2 semester berturut	Pembukuan unit usaha; laporan musyawarah	Dukungan pemerintah desa berlanjut
K1 unit usaha terbentuk	Aturan tertulis disahkan; rapat pengurus $\geq 1 \times / \text{bulan}$	AD/ART; notulen	Tidak ada konflik kepengurusan berkepanjangan

Hierarki	Indikator	Sumber verifikasi	Asumsi
K2 anggota terampil	30 anggota lulus pelatihan; 6 pengurus menyusun laporan keuangan sendiri	Daftar hadir; hasil praktik; laporan keuangan	Peserta konsisten hadir
K3 fasilitas beroperasi	Pengering dan pengemas terpasang dan berfungsi $\geq 80\%$ hari kerja musim panen	Kartu operasi alat	Pasokan listrik memadai; tidak ada banjir besar
K4 kemitraan berjalan	≥ 2 toko mitra dan 1 kanal daring aktif dengan penjualan rutin	Nota penjualan; tangkapan layar kanal	Permintaan beras kemasan lokal stabil

d. Rencana Pelaksanaan

Jadwal (ringkas): Triwulan 1 pembentukan unit usaha, penyusunan aturan, rehabilitasi gudang; Triwulan 2 pelatihan pascapanen dan pembukuan, pengadaan alat; Triwulan 3 uji coba produksi, desain kemasan, perizinan; Triwulan 4 peluncuran, temu usaha, evaluasi tahunan partisipatif; Tahun 2 pemantapan produksi-pemasaran, kaderisasi, persiapan kemandirian penuh (exit). Rencana anggaran biaya (ringkas): pengering dan alat kemas Rp95 juta (Dana Desa); rehabilitasi gudang Rp25 juta (Rp10 juta bahan dari Dana Desa + swadaya tenaga senilai Rp15 juta); pelatihan dan pendampingan Rp30 juta (kemitraan penyuluh/ perguruan tinggi); modal kerja awal Rp25 juta (tabungan kelompok Rp18 juta + iuran); operasional dan perizinan Rp10 juta. Organisasi pelaksana: unit usaha bersama (pelaksana utama), pemerintah desa (pendukung kebijakan dan dana), penyuluh dan mahasiswa pendamping (fasilitasi teknis), komite pemantau warga 3 orang (pengawasan).

e. Rencana Monev dan Keberlanjutan

Monitoring bulanan oleh pengurus dan komite warga (kemajuan kegiatan, keuangan, operasi alat) dengan hasil ditempel di papan informasi. Evaluasi partisipatif tiap akhir tahun (skoring kegiatan dan most significant change) dalam musyawarah anggota. Baseline dikumpulkan sebelum pelatihan pertama. Strategi keberlanjutan: iuran jasa pengeringan-penggilingan untuk pemeliharaan alat; kaderisasi dua calon pengurus per bidang; penguatan legalitas usaha; pengurangan peran pendamping bertahap mulai semester ketiga hingga penuh mandiri pada akhir tahun kedua.

➤ Lampiran 6. Format Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Matriks Rencana Monev

Indikator	Baseline	Target	Metode/alat	Frekuensi	Penanggung jawab
(diisi per tingkat logframe)					

Sumber: Format disusun penulis

Format Laporan Monitoring Bulanan Kelompok

- Nama kelompok/unit usaha; bulan; penyusun.
- Kegiatan yang direncanakan bulan ini dan realisasinya (tabel: kegiatan, target, realisasi, %).
- Penggunaan dana bulan ini (tabel: uraian, anggaran, realisasi, saldo).
- Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut yang disepakati.
- Rencana bulan berikutnya.
- Tanda tangan penyusun dan komite pemantau warga; tanggal penempelan di papan informasi.

➤ Format Kartu Penilaian Masyarakat (Community Score Card)

Aspek layanan/kegiatan	Skor warga (1–5)	Alasan/bukti	Usulan perbaikan	Kesepakatan lanjut dan batas waktu	tindak
Contoh: ketepatan jadwal pelatihan					
Contoh: keterbukaan laporan keuangan					

Sumber: Adaptasi penulis dari format umum community score card

Diisi dalam pertemuan warga; hasil dibahas bersama pelaksana program; kesepakatan dipantau pada pertemuan berikutnya.

Panduan Singkat Pengumpulan Cerita Most Significant Change

- a. Pertanyaan pemandu kepada warga: “Menurut Bapak/Ibu, perubahan apa yang paling berarti dalam kehidupan Bapak/Ibu atau kelompok sejak program berjalan? Ceritakan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan mengapa perubahan itu paling berarti bagi Bapak/Ibu.”
- b. Catat cerita apa adanya (nama penutur, tanggal, lokasi); satu cerita satu lembar.
- c. Kumpulkan 10–20 cerita dari beragam penutur (laki-laki, perempuan, tua, muda, pengurus, anggota biasa).
- d. Dalam musyawarah, bacakan cerita-cerita; peserta memilih secara berjenjang cerita yang paling signifikan dan mencatat alasan pemilihan.
- e. Cerita terpilih dan alasannya menjadi bahan laporan kualitatif dan pembelajaran program.

Format Ringkas Laporan Evaluasi Tahunan Partisipatif

- a. Ringkasan capaian terhadap indikator (tabel: indikator, baseline, target, capaian, keterangan).
- b. Hasil skoring kegiatan oleh warga dan pokok-pokok diskusinya.
- c. Cerita perubahan paling signifikan terpilih dan alasan pemilihannya.
- d. Penilaian ringkas enam kriteria (relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan) dalam bahasa sederhana.
- e. Keputusan musyawarah: yang dilanjutkan, diperbaiki, dihentikan; pembagian tanggung jawab dan batas waktu.

- f. Lampiran: daftar hadir, foto, notulen.

➤ **Lampiran 7. Contoh Kisi-Kisi dan Soal Ujian (UTS/UAS)**

Kisi-kisi

CPMK	Bab sumber	Bentuk soal	Bobot
CPMK-1 memahami konsep dan prinsip	Bab 1–2	Pilihan ganda dan uraian	25%
CPMK-2 strategi dan metode	Bab 3–7	Pilihan ganda, uraian, kasus	40%
CPMK-3 merencanakan–melaksanakan–mengevaluasi	Bab 8–9 dan praktikum	Uraian kasus dan dokumen rencana	35%

Contoh Soal Uraian Kasus (UAS)

Sebuah kelompok wanita tani di daerah pesisir mengolah hasil perikanan secara perorangan dengan pendapatan tidak menentu. Pemerintah desa menawarkan dukungan Dana Desa. Berdasarkan kasus tersebut:

- Rumuskan masalah inti dan buat pohon masalah sederhana (minimal tiga penyebab dan dua akibat).
- Susun tujuan program dan dua keluaran beserta masing-masing satu indikator SMART.
- Sebutkan dua asumsi penting dan jelaskan risikonya.
- Rancang satu kegiatan evaluasi partisipatif yang sesuai beserta langkah pelaksanaannya.
- Jelaskan strategi keberlanjutan program setelah pendampingan berakhir.

Contoh Soal Uraian Reflektif

Jelaskan makna ungkapan *handing over the stick* dalam praktik fasilitasi pemberdayaan, dan uraikan dua situasi nyata (dari praktikum atau pengamatan Anda) ketika fasilitator sebaiknya “mundur” agar masyarakat mengambil kendali.

➤ **Lampiran 8. Rencana Kegiatan Perkuliahan Satu Semester (16 Pertemuan)**

Pertemuan	Materi/kegiatan	Bab sumber	Metode	Penilaian
1	Kontrak kuliah; tinjauan mata kuliah; hakikat pemberdayaan	Tinjauan; Bab 1	Ceramah interaktif, diskusi	Partisipasi
2	Konsep, prinsip, dan sejarah pemberdayaan di Indonesia	Bab 1	Ceramah, diskusi kasus	Tes formatif Bab 1
3	Partisipasi masyarakat: konsep dan tangga partisipasi	Bab 2	Ceramah, analisis kasus musyawarah desa	Partisipasi
4	Ruang partisipasi; hambatan dan strategi inklusi	Bab 2	Diskusi kelompok, debat	Tes formatif Bab 2; tugas
5	Strategi pemberdayaan: aras dan tahapan	Bab 3	Ceramah, diskusi	Partisipasi
6	Metode partisipatif: PRA dan fasilitasi	Bab 3; Lampiran 4	Simulasi PRA di kelas	Tes formatif Bab 3
7	Pemberdayaan bidang pendidikan masyarakat	Bab 4	Ceramah, latihan merancang sesi belajar	Tes formatif Bab 4
8	Ujian Tengah Semester	Bab 1–4	Ujian tertulis	UTS
9	Pemberdayaan bidang kesehatan masyarakat; pembentukan kelompok proyek dan penetapan lokasi	Bab 5; Bab 8 (8.7)	Ceramah, diskusi; koordinasi proyek	Tes formatif Bab 5

Pertemuan	Materi/kegiatan	Bab sumber	Metode	Penilaian
10	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; (paralel) pengkajian lapangan kelompok	Bab 6	Ceramah, studi kasus	Tes formatif Bab 6
11	Lingkungan hidup dan keberlanjutan; (paralel) pengkajian lapangan kelompok	Bab 7	Ceramah, diskusi kasus Danau Tempe	Tes formatif Bab 7
12	Analisis masalah dan aset; kerangka kerja logis	Bab 8	Praktik terbimbing: pohon masalah, SWOT, logframe	Kemajuan proyek
13	Rencana kerja, anggaran, organisasi, akuntabilitas	Bab 8	Praktik terbimbing; konsultasi kelompok	Tes formatif Bab 8
14	Monitoring, evaluasi, dan refleksi; penyusunan rencana monev proyek	Bab 9	Ceramah, praktik matriks monev	Tes formatif Bab 9
15	Presentasi dan uji publik rencana program kelompok; refleksi akhir	Bab 8–9; Lampiran 2–3	Presentasi, tanya jawab, refleksi MSC kelas	Proyek (dokumen dan presentasi)
16	Ujian Akhir Semester	Bab 5–9	Ujian tertulis (uraian kasus)	UAS

Bobot penilaian yang disarankan: partisipasi dan tugas 20%; tes formatif/kuis 10%; UTS 20%; proyek praktikum 30%; UAS 20%.

GLOSARIUM

Adaptasi iklim — penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap dampak perubahan iklim yang telah atau akan terjadi guna mengurangi kerugian.

Advokasi — upaya terorganisir untuk memengaruhi kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok lemah.

Agen perubahan — individu atau lembaga yang memfasilitasi proses perubahan sosial dalam masyarakat.

Akuntabilitas sosial — pertanggungjawaban penyelenggara program atau layanan publik kepada masyarakat, ditegakkan melalui keterlibatan warga dalam pengawasan.

Analisis SWOT — teknik analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) suatu kelompok atau organisasi.

Andragogi — ilmu dan seni membelajarkan orang dewasa yang bertumpu pada pengalaman, kebutuhan, dan pengarahan diri peserta.

Aras mikro — tingkat intervensi pemberdayaan pada individu dan keluarga.

Aras mezzo — tingkat intervensi pemberdayaan pada kelompok dan komunitas.

Aras makro — tingkat intervensi pemberdayaan pada sistem yang lebih luas melalui perubahan kebijakan dan struktur.

Asumsi (dalam logframe) — kondisi di luar kendali program yang harus terpenuhi agar logika program berjalan.

Baseline — data kondisi awal sebelum program dilaksanakan, dipakai sebagai pembanding untuk mengukur perubahan.

BUMDes — Badan Usaha Milik Desa; badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa untuk mengelola aset dan usaha bagi kesejahteraan warga.

Dana Desa — dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Determinan sosial kesehatan — kondisi sosial-ekonomi tempat orang lahir, tumbuh, bekerja, dan menua yang memengaruhi derajat kesehatannya.

Ekonomi kerakyatan — sistem ekonomi yang berpusat pada rakyat banyak, berasaskan kekeluargaan, dan bertujuan pada pemerataan kesejahteraan.

Evaluasi — penilaian sistematis dan berkala terhadap rancangan, pelaksanaan, dan hasil program untuk menentukan nilai dan manfaatnya.

Evaluasi partisipatif — evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan indikator, mengumpulkan data, menganalisis, dan memutuskan tindak lanjut.

Exit strategy (strategi keluar) — rencana pengakhiran pendampingan yang memastikan manfaat program berlanjut melalui penguatan kelembagaan lokal.

Fasilitator — pihak yang mempermudah proses belajar dan pengambilan keputusan masyarakat tanpa mengambil alih keputusan itu sendiri.

FGD (*focus group discussion*) — diskusi kelompok terarah yang menggali pandangan peserta tentang topik tertentu secara mendalam.

Gotong royong — bekerja bersama secara sukarela untuk kepentingan bersama; wujud modal sosial masyarakat Indonesia.

Indikator — ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan tercapainya suatu perubahan atau hasil.

Indikator SMART — indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Kader — warga masyarakat yang dilatih untuk menggerakkan dan melayani warga lain secara sukarela, misalnya kader posyandu.

Kearifan lokal — nilai, pengetahuan, dan praktik yang tumbuh dan diwariskan masyarakat setempat dalam mengelola kehidupan dan lingkungannya.

Keberlanjutan — kelangsungan manfaat program setelah dukungan eksternal berakhir; juga prinsip pembangunan yang menjaga daya dukung lingkungan.

Kelembagaan lokal — organisasi dan aturan main yang hidup dalam masyarakat, baik formal (kelompok tani, koperasi) maupun informal (adat, arisan).

Kelompok marginal — kelompok yang tersisih dari akses sumber daya dan pengambilan keputusan, seperti buruh tani, perempuan miskin, dan penyandang disabilitas.

Kelompok tani — kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kondisi untuk meningkatkan usaha anggotanya.

Kemandirian — kemampuan masyarakat mengatur diri, mengambil keputusan, dan memenuhi kebutuhannya dengan kekuatan sendiri.

Kerangka kerja logis (*logframe*) — matriks perencanaan yang merangkum hierarki tujuan program, indikator, sumber verifikasi, dan asumsi.

Ketahanan pangan — kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Koperasi — badan usaha beranggotakan orang-orang yang kegiatannya berdasar prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

KUB (kelompok usaha bersama) — kelompok warga yang menjalankan usaha ekonomi secara bersama untuk meningkatkan pendapatan anggota.

KUR (kredit usaha rakyat) — kredit program pemerintah bunga rendah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lesson learned (pembelajaran) — generalisasi dari pengalaman program yang dirumuskan untuk memandu program berikutnya.

Logika vertikal — rangkaian sebab-akibat dalam logframe: kegiatan menghasilkan keluaran, keluaran mencapai tujuan program, tujuan program menyumbang tujuan akhir.

Modal sosial — jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan warga bekerja sama; terdiri atas ikatan (*bonding*), jembatan (*bridging*), dan kaitan (*linking*).

Monitoring (pemantauan) — pengumpulan dan analisis informasi secara rutin selama program berjalan untuk membandingkan pelaksanaan dengan rencana.

Most significant change (MSC) — teknik evaluasi berbasis pemilihan cerita perubahan paling berarti menurut masyarakat.

Musyawarah desa — forum permusyawaratan tertinggi di desa untuk menyepakati hal-hal strategis pembangunan desa.

Needs assessment (pengkajian kebutuhan) — proses mengidentifikasi kebutuhan dan masalah masyarakat sebagai dasar perencanaan program.

Partisipasi — keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan.

Partisipasi semu (tokenisme) — bentuk pelibatan masyarakat yang hanya formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan.

Pemberdayaan masyarakat — proses meningkatkan kemampuan, kesadaran kritis, dan kendali masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi hidupnya.

Pembangunan berkelanjutan — pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya.

Pemetaan aset — teknik mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya masyarakat (modal manusia, sosial, alam, fisik, finansial) sebagai dasar pembangunan.

Pemetaan sosial — teknik menggambarkan kondisi sosial masyarakat, meliputi kelompok, kelembagaan, jaringan, dan relasi kuasa.

Pendekatan berbasis aset (ABCD) — pendekatan pembangunan yang berangkat dari kekuatan dan potensi masyarakat, bukan dari kekurangannya.

Pendidikan nonformal — layanan pendidikan terorganisir di luar sistem persekolahan formal, seperti pelatihan, kursus, dan penyuluhan.

Pengendalian hama terpadu (PHT) — pengelolaan hama yang memadukan cara budidaya, hayati, dan mekanis dengan pestisida sebagai pilihan terakhir.

Penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) — kerangka analisis penghidupan rumah tangga berbasis lima modal: manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial.

Penyuluhan pertanian — proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya agar mau dan mampu mengakses informasi serta meningkatkan usaha taninya.

Pertanian organik — sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan dan proses alami tanpa bahan kimia sintetis.

Piagam Ottawa — piagam promosi kesehatan (1986) yang memuat lima pilar aksi, termasuk penguatan gerakan masyarakat.

PjBL (*project-based learning*) — pembelajaran berbasis proyek yang menuntut mahasiswa menghasilkan karya nyata melalui kerja kelompok.

Pohon masalah — teknik analisis sebab-akibat masalah: masalah inti pada batang, penyebab pada akar, dan akibat pada cabang.

Pohon tujuan — hasil pembalikan pohon masalah menjadi pernyataan positif yang menggambarkan hierarki tujuan.

Posyandu — pos pelayanan terpadu; wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ibu, anak, dan gizi yang digerakkan kader.

Power (kuasa) — kemampuan memengaruhi keputusan dan mengendalikan sumber daya; inti analisis pemberdayaan.

PRA (*participatory rural appraisal*) — sekumpulan teknik pengkajian desa secara partisipatif yang menempatkan warga sebagai peneliti utama kondisi mereka sendiri.

Praktikum — kegiatan pembelajaran praktik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata.

Prinsip subsidiaritas — penyerahan kewenangan pengambilan keputusan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

Promosi kesehatan — proses memungkinkan masyarakat mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

Rencana anggaran biaya (RAB) — rincian kebutuhan biaya setiap kegiatan program menurut komponen belanja.

Rencana monev — rancangan monitoring dan evaluasi yang memuat indikator, baseline, target, metode, jadwal, dan penanggung jawab.

RRA (*rapid rural appraisal*) — pengkajian desa secara cepat oleh tim luar dengan mengumpulkan informasi langsung dari lapangan.

Ruang partisipasi undangan (*invited space*) — ruang keterlibatan warga yang dibuka oleh pemerintah atau lembaga, seperti musyawarah perencanaan pembangunan.

Ruang partisipasi rebutan (*claimed space*) — ruang keterlibatan yang diciptakan warga sendiri, seperti forum warga dan gerakan sosial.

Sasi — kearifan lokal Maluku berupa larangan panen sumber daya alam pada waktu tertentu agar lestari.

Stunting — kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, ditandai tinggi badan di bawah standar usianya.

Swadaya — sumbangan sumber daya masyarakat sendiri (tenaga, dana, bahan, lahan) dalam pembangunan.

Tangga partisipasi Arnstein — tipologi delapan anak tangga derajat partisipasi warga, dari manipulasi hingga kendali warga.

Tokenisme — lihat partisipasi semu.

Transek — teknik PRA berupa penelusuran wilayah desa mengikuti garis lintasan untuk mengamati penggunaan lahan dan potensi.

Tujuan akhir (*goal/impact*) — perubahan jangka panjang di tingkat masyarakat yang disumbang oleh program.

Tujuan program (*purpose/outcome*) — perubahan perilaku atau kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir program.

UKBM — upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, seperti posyandu, poskesdes, dan desa siaga.

UMKM — usaha mikro, kecil, dan menengah; tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Keluaran (*output*) — barang atau jasa yang dihasilkan langsung oleh kegiatan program.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. A. Majdah M. Zain, M.Si.

Penulis adalah Guru Besar pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada bidang ilmu pertanian, dilanjutkan dengan pendidikan magister dan doktoral pada bidang ilmu-ilmu pertanian dengan fokus kajian kelembagaan dan pembangunan agribisnis. Selama karier akademiknya, beliau aktif mengampu mata kuliah Kelembagaan Pertanian, serta terlibat dalam berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait penguatan kelembagaan petani, kebijakan pertanian, dan pengembangan agribisnis berkelanjutan di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur.



Dr. Ir. Helda Ibrahim, S.P., M.Si.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pertanian, magister sains, dan doktor dengan konsentrasi kajian sosial ekonomi pertanian dan kelembagaan agribisnis. Beliau merupakan koordinator mata kuliah Kelembagaan Pertanian dan aktif melakukan penelitian mengenai penguatan kapasitas kelembagaan petani, penyuluhan pertanian, serta pemberdayaan ekonomi perempuan tani.